



**Pedoman Teknis**

# **Evaluasi Tata Kelola Kelembagaan dan Pembelajaran SMK 3 Tahun**

# **Buku Pedoman Teknis Evaluasi Tata Kelola Kelembagaan Dan Pembelajaran SMK 3 Tahun**



**DIREKTORAT PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI**

# Buku Pedoman Teknis Evaluasi Tata Kelola Kelembagaan Dan Pembelajaran SMK 3 Tahun

Copyright ©2017 . Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah  
Kejuruan

<b>Pengarah</b>	Dr. Thamrin Kasman
<b>Penanggung Jawab</b>	Arie Wibowo Khurniawan, S.Si, M.Ak.
<b>Ketua</b>	Chrismi Widjajanti, SE, MBA.
<b>Tim Penyusun</b>	Prof. Dr. Badrun Kartowagiran Prof. Djemari Mardapi, Ph.D. Dr. Amat Jaedun, M.Pd. Dr. Edi Istiyono, M.Si. Dr. Heri Retnawati, M.Pd. Faridl Musyadad, M.Pd.
<b>Penyunting Akhir</b>	Tri Haryani, S.Pd Yuli Setiawan, S.Ab Mohamad Herdyka, ST, M.Kom
<b>Desain Tata Letak</b>	Karin Faizah Tauristy, S.Ds Rayi Citha Dwisendy, S.Ds
<b>Desain Laman Sampul</b>	Ari

**ISBN** 978-602-5517-27-3

**Penerbit**

Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan  
Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI

Komplek Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI  
Gedung E Lantai 13, Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Gelora,  
Tanah Abang, Jakarta Pusat 10270

# KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh  
Salam Sejahtera,

Menindaklanjuti Instruksi Presiden No 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah menjadikan Inpres tersebut sebagai momentum untuk meletakkan fundamental pendidikan kejuruan di Indonesia. Inpres tersebut juga telah memberikan penegasan akan pentingnya Sekolah Menengah Kejuruan dalam mempersiapkan sumber daya manusia yang terampil dan berkarakter agar dapat mengisi ruang-ruang pembangunan dan mendorong percepatan kemajuan Indonesia. Melalui Revitalisasi SMK diharapkan dapat menciptakan generasi penduduk usia produktif yang memiliki kompetensi keterampilan atau keahlian siap pakai yang dibutuhkan dunia usaha dan dunia industri. Dengan mencetak generasi yang unggul dan produktif nantinya diharapkan dapat memastikan tujuan pembangunan nasional yang berkelanjutan dapat tercapai.

Selain berpacu dalam meningkatkan kualitas peserta didik, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga terus berupaya meningkatkan kualitas tenaga pendidik, karena ini juga menjadi pondasi untuk kualitas pendidikan kejuruan yang baik. Melalui Revitalisasi ini kita harus bisa menuntaskan apa yang diamanatkan oleh pemerintah yaitu membalik piramida kualifikasi tenaga kerja yang saat ini mayoritas berpendidikan SD dan SMP menjadi tenaga kerja yang terdidik dan terampil dan berdaya saing tinggi melalui Sekolah Menengah Kejuruan.

Revitalisasi SMK ini dapat dijadikan salah satu solusi untuk mencetak peserta didik yang modern, bermartabat, inovatif, dan kreatif. Saya sangat mengapresiasi buku ini yang sudah menjelaskan tentang bagaimana Revitalisasi SMK yang sudah dilakukan dengan langkah nyata dan ditandai dengan progres yang baik dari upaya merevitalisasi SMK tersebut.

Semoga buku ini dapat bermanfaat dan menjadi referensi dalam upaya peningkatan kualitas bagi Sekolah Menengah Kejuruan khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Terima kasih.

Wassalamu`alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Jakarta, 2017



Dr. Thamrin Kasman



# DAFTAR ISI

Halaman Judul .....	i
Tim Penyusun .....	ii
Kata Pengantar .....	iii
Daftar Isi .....	v
Daftar Tabel .....	viii
Daftar Gambar .....	ix

## STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

A. Pendahuluan .....	1
B. Standar dan Peraturan .....	1
1. Pengertian .....	1
2. Tujuan SKL .....	1
3. Ruang Lingkup SKL .....	2
4. Kaitan SKL dan Hasil Belajar .....	2
5. Monitoring dan Evaluasi .....	5
C. Hasil Kajian dan Pembahasan .....	6
1. Capaian Standar Kompetensi Lulusan menurut KS dan Guru .....	6
2. Pencapaian SKL pada setiap kompetensi keahlian .....	7
3. Pencapaian SKL pada setiap aspek Kompetensi Lulusan .....	9
4. Manajemen Kemitraan SMK dengan Dunia Kerja dalam Prakerin .....	9
5. Sertifikasi Kompetensi Lulusan .....	10
D. Kesimpulan .....	12
E. Rekomendasi .....	12

## STANDAR ISI

A. Pendahuluan .....	15
B. Standar dan Peraturan .....	17
C. Hasil Kajian dan Pembahasan .....	25
D. Kesimpulan .....	27
E. Rekomendasi .....	28

## STANDAR PROSES

A. Pendahuluan .....	31
----------------------	----

B. Standar dan Peraturan .....	32
1. Kajian Yuridis .....	33
2. Kajian Filosofis .....	35
3. Kebijakan Revitalisasi SMK .....	36
C. Hasil Kajian dan Pembahasan .....	43
1. Evaluasi Proses Pembelajaran .....	43
2. Evaluasi Praktik Kerja Lapangan .....	45
3. Pembelajaran Melalui Teaching Factory .....	47
D. Kesimpulan .....	49
E. Rekomendasi .....	51

## **STANDAR PENILAIAN**

A. Pendahuluan .....	53
B. Standar dan Peraturan .....	54
1. Penilaian Oleh Pendidik .....	55
2. Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan .....	56
3. Penilaian Hasil Belajar oleh Pemerintah .....	56
C. Hasil Kajian Dan Pembahasan .....	61
D. Kesimpulan .....	68
E. Rekomendasi .....	69

## **STANDAR PENDIDIKAN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**

A. Pendahuluan .....	71
B. Standar dan Peraturan .....	72
C. Hasil Kajian dan Pembahasan .....	79
1. Menurut Kepala Sekolah & Responden Kepala Sekolah .....	83
2. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Menurut Guru .....	86
3. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Menurut Peserta Didik .....	87
D. Kesimpulan .....	88
E. Rekomendasi .....	89

## **STANDAR SARANA DAN PRASARANA**

A. Pendahuluan .....	91
B. Standar dan Peraturan .....	92
1. Pelibatan Dunia Usaha dan Dunia Industri .....	93
a. Dunia Usaha dan Industri sebagai Tempat Praktik Peserta Didik .....	93
b. Dunia Usaha dan Industri sebagai Tempat Magang Kerja .....	94
c. Penyelarasan Kurikulum .....	94
C. Hasil Kajian dan Pembahasan .....	96
D. Kesimpulan .....	98
E. Rekomendasi .....	99

## **STANDAR PEMBIAYAAN**

A. Pendahuluan .....	101
B. Standar dan Peraturan .....	102
C. Hasil Kajian dan Pembahasan .....	103
D. Kesimpulan .....	105
E. Rekomendasi .....	105
Daftar Pustaka .....	107
Rangkuman Buku Pedoman Teknis .....	111

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Perkembangan Keterampilan Menurut Simpson dan Dave.....	3
Tabel 2.	Standar Kompetensi Lulusan SMK/MAK.....	5
Tabel 3.	Deskripsi Hasil Standar Kompetensi Lulusan .....	6
Tabel 4.	Capaian SKL untuk masing-masing dari 13 kompetensi.....	7
Tabel 5.	Capaian SKL untuk masing-masing sekolah yang terpilih.....	8
Tabel 6.	Jenis Sertifikasi Kecakapan Kerja Konstruksi Gedung, Sanitasi, dan Perawatan (Direktorat SMK, 2016).....	11
Tabel 7.	Deskripsi Kompetensi Inti SMK.....	19
Tabel 8.	Kompetensi Inti SMK Kelas X-XII .....	20
Tabel 9.	Deskripsi Hasil Penelitian Standar Isi.....	25
Tabel 10a.	Kemampuan yang dibutuhkan .....	27
Tabel 10b.	Deskripsi Hasil Standar Proses Pembelajaran.....	43
Tabel 11.	Deskripsi Hasil Standar Proses Praktek Kerja Lapangan.....	46
Tabel 12.	Pencapaian Standar Penilaian di 13 Kompetensi Keahlian.....	62
Tabel 13.	Rerata skor butir penilaian dengan responden siswa.....	66
Tabel 14.	Deskripsi Hasil Standar Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan.....	83
Tabel 15.	Hasil Analisis Item Instrumen Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan.....	85
Tabel 16.	Hasil analisis item tiap kompetensi keahlian sekolah .....	87
Tabel 17.	Deskripsi Nilai Rata-rata Pemenuhan Standar Sarana dan Prasarana.....	96
Tabel 18.	Kondisi Sarana dan Prasarana SMK .....	97
Tabel 19.	Pencapaian Standar Pembiayaan Menurut Kepsek .....	103

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Kompetensi Sekolah Menengah Kejuruan.....	2
Gambar 2.	Skema Hubungan SKL, K-I, KD, Penilaian dan Hasil Belajar .....	5
Gambar 3.	Pencapaian Standar Kompetensi Lulusan.....	6
Gambar 4.	Pencapaian SKL per Responden .....	7
Gambar 5.	Pencapaian Standar Kompetensi Lulusan di Setiap Kompetensi Keahlian8	
Gambar 6.	Capaian SKL untuk masing-masing sekolah.....	9
Gambar 7.	Capaian kemampuan lulusan .....	9
Gambar 8.	Penyelarasan Bidang, Program, dan Kompetensi Keahlian SMK.....	16
Gambar 9.	Pemetaan permasalahan kurikulum .....	18
Gambar 10.	Pemetaan tingkat kompetensi.....	19
Gambar 11.	Gradasi dan Taksonomi Ranah Sikap .....	21
Gambar 12.	Dimensi pada Kompetensi Inti Pengetahuan.....	22
Gambar 13.	Kompetensi Sekolah Menengah Kejuruan.....	23
Gambar 14.	Penyelarasan Kurikulum SMK.....	24
Gambar 15.	Pelaksanaan praktik di SMK .....	25
Gambar 16.	Pencapaian Standar Isi .....	26
Gambar 17.	Kemampuan yang dibutuhkan .....	28
Gambar 18.	Pencapaian Standar Proses Pembelajaran .....	44
Gambar 19.	Pencapaian Standar Proses Praktek Kerja Lapangan.....	47
Gambar 20.	Diagram Pencapaian Standar Nasional Pendidikan .....	62
Gambar 21.	Pencapaian Standar Penilaian pada SMKN sampel.....	63
Gambar 22.	Pemahaman konsep dan pelaksanaan penilaian oleh guru .....	64
Gambar 23.	Pemahaman dan pelaksanaan penilaian guru menurut kepala sekolah...65	
Gambar 24.	Pencapaian Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan.....	83
Gambar 25.	Pencapaian Standar Pembiayaan Menurut Kepsek.....	103
Gambar 26.	Komponen Pembiayaan .....	104



# STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

## A. Pendahuluan

Kualitas pendidikan ditentukan oleh kualitas pembelajaran. Adapun kualitas pembelajaran dapat ditentukan oleh input, proses, dan output. Kualitas pembelajaran salah satunya dapat dilihat kualitas lulusan. Oleh karena itu, perlu adanya standar kualitas lulusan sekolah, termasuk sekolah kejuruan (SMK) secara nasional.

Demi mewujudkan tujuan pendidikan nasional tersebut diperlukan profil kualifikasi kemampuan lulusan yang dituangkan dalam standar kompetensi lulusan (SKL). Dalam Undang Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 35 disebutkan bahwa standar kompetensi lulusan merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik yang harus dipenuhinya atau dicapainya dari suatu satuan pendidikan (SMK). Dalam rangka melaksanakan undang-undang tersebut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menerbitkan Peraturan Menteri tentang SKL, yakni Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 54 Tahun 2013 dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 20 Tahun 2016.



## B. Standar dan Peraturan

### 1. Pengertian

Standar Kompetensi Lulusan (SKL) pada pendidikan SMK adalah kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup dimensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang diharapkan dapat dicapai setelah peserta didik menyelesaikan mata pelajaran. SKL adalah profil kompetensi lulusan yang akan dicapai oleh peserta didik setelah mempelajari semua mata pelajaran pada jenjang tertentu yang mencakup ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan. SKL merupakan acuan utama dalam pengembangan Kompetensi Inti (KI), selanjutnya Kompetensi Inti dijabarkan ke dalam Kompetensi Dasar (KD).

## 2. Tujuan SKL

Standar kompetensi lulusan digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi, standar proses, standar penilaian pendidikan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, dan standar biaya.

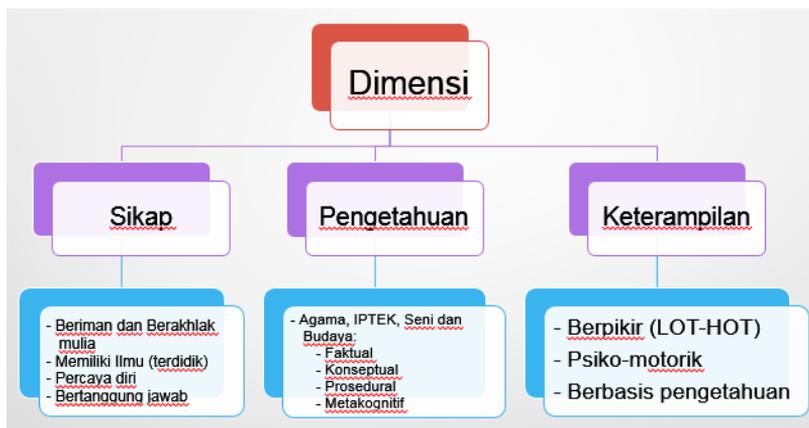
## 3. Ruang Lingkup SKL

Standar kompetensi lulusan SMK terdiri atas kriteria kualifikasi kemampuan peserta didik yang diharapkan dapat dicapai setelah menyelesaikan masa belajarnya di satuan pendidikan (SMK).

## 4. Kaitan SKL dan Hasil Belajar

Berdasarkan hasil belajar selama di satuan pendidikan yakni SMK, dapat diketahui kompetensi peserta didik yang telah dikuasai. Kriteria kualifikasi kemampuan peserta didik yang diharapkan setelah menempuh pembelajaran dinamakan SKL.

- a. Hasil belajar dirumuskan dalam tiga kelompok ranah taksonomi meliputi ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Pembagian taksonomi hasil belajar dilakukan untuk mengukur perubahan perilaku peserta didik selama proses belajar sampai pada pencapaian hasil belajar yang dirumuskan dalam aspek perilaku (behaviour) tujuan pembelajaran. Umumnya klasifikasi perilaku hasil belajar yang digunakan berdasarkan taksonomi Bloom yang pada Kurikulum 2013 yang telah disempurnakan oleh Anderson dan Krathwohl dengan pengelompokan menjadi : (1) Sikap (affective) merupakan perilaku, emosi dan perasaan dalam bersikap dan merasa, (2) Pengetahuan (cognitive) merupakan kapabilitas intelektual dalam bentuk pengetahuan atau berpikir, (3) Keterampilan (psychomotor) merupakan keterampilan manual atau motorik dalam bentuk melakukan.



Gambar 1. Kompetensi Sekolah Menengah Kejuruan

- 1) Ranah sikap dalam Kurikulum 2013 merupakan urutan pertama dalam perumusan kompetensi lulusan, selanjutnya diikuti dengan rumusan ranah pengetahuan dan keterampilan. Ranah sikap dalam Kurikulum

2013 menggunakan olahan Krathwohl, dimana pembentukan sikap peserta didik ditata secara hirarkhis mulai dari menerima (*accepting*), merespon/menanggapi(*responding*), menghargai (*valuing*), menghayati (*organizing/internalizing*), dan mengamalkan (*characterizing/actualizing*).

- 2) Ranah pengetahuan pada Kurikulum 2013 menggunakan taksonomi Bloom olahan Anderson, dimana perkembangan kemampuan mental intelektual peserta didik dimulai dari C1 yakni: (1) mengingat (*remember*), peserta didik mengingat kembali pengetahuan dari memorinya; (2) C2 yakni memahami (*understand*), merupakan kemampuan mengonstruksi makna dari pesan pembelajaran baik secara lisan, tulisan maupun grafik; (3) C3 yakni menerapkan (*apply*); merupakan penggunaan prosedur dalam situasi yang diberikan atau situasi baru;(4) C4 yakni menganalisis (*analyse*); merupakan penguraian materi ke dalam bagian-bagian dan bagaimana bagian-bagian tersebut saling berhubungan satu sama lainnya dalam keseluruhan struktur;(5) C5 yakni mengevaluasi (*evaluate*); merupakan kemampuan membuat keputusan berdasarkan kriteria dan standar;dan (6) C6 yakni mengkreasi (*create*); merupakan kemampuan menempatkan elemen-elemen secara bersamaan ke dalam bentuk modifikasi atau mengorganisasikan elemen-elemen ke dalam pola baru (struktur baru).
- 3) Ranah keterampilan pada Kurikulum 2013 yang mengarah pada pembentukan keterampilan abstrak menggunakan gradasi dari Dyers yang ditata sebagai berikut: (1) mengamati (*observing*);(2) menanya (*questioning*);(3) mencoba (*experimenting*);(4) menalar (*associating*); (5) menyaji (*communicating*); dan (6) mencipta (*creating*).
- 4) Pembentukan keterampilan kongkret menggunakan gradasi olahan Simpson dengan tingkatan: persepsi, kesiapan, meniru, membiasakan gerakan, mahir, menjadi gerakan alami, dan menjadi gerakan orisinal.

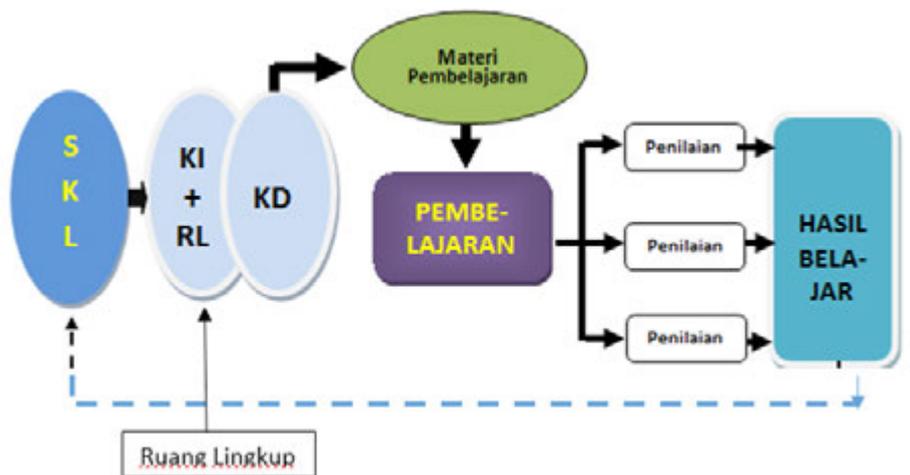
**Tabel 1. Perkembangan Keterampilan Menurut Simpson dan Dave**

NO	Tingkat Taksonomi Simpson	Uraian	Tingkatan Taksonomi Dave	Uraian	Tingkat Kompetensi Minimal/Kelas
1.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Persepsi</li> <li>• Kesiapan</li> <li>• Meniru</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menunjukkan perhatian untuk melakukan suatu gerakan.</li> <li>• Menunjukkan kesiapan mental dan fisik untuk melakukan suatu gerakan.</li> <li>• Meniru gerakan secara terbimbing.</li> </ul>	Imitasi	Meniru kegiatan yang telah didemonstrasikan atau dijelaskan, meliputi tahap coba-coba hingga mencapai respon yang tepat.	V/Kelas X

NO	Tingkat Taksonomi Simpson	Uraian	Tingkatan Taksonomi Dave	Uraian	Tingkat Kompetensi Minimal/Kelas
2.	Membiasakan gerakan ( <i>mechanism</i> )	Melakukan gerakan mekanistik.	Manipulasi	Melakukan suatu pekerjaan dengan sedikit percaya dan kemampuan melalui perintah dan berlatih.	V/Kelas XI
3.	Mahir ( <i>complex or overt response</i> )	Melakukan gerakan kompleks dan termodifikasi.	Presisi	Melakukan suatu tugas atau aktivitas dengan keahlian dan kualitas yang tinggi dengan unjuk kerja yang cepat, halus, dan akurat serta efisien tanpa bantuan atau instruksi.	VI/Kelas XII
4.	Menjadi gerakan alami ( <i>adaptation</i> )	Menjadi gerakan alami yang diciptakan sendiri atas dasar gerakan yang sudah dikuasai sebelumnya.	Artikulasi	Keterampilan berkembang dengan baik sehingga seseorang dapat mengubah pola gerakan sesuai dengan persyaratan khusus untuk dapat digunakan mengatasi situasi problem yang tidak sesuai SOP.	
5.	Menjadi tindakan orisinal ( <i>origination</i> )	Menjadi gerakan baru yang orisinal dan sukar ditiru oleh orang lain dan menjadi ciri khasnya.	Naturalisasi	Melakukan unjuk kerja level tinggi secara alamiah, tanpa perlu berpikir lama dengan mengkreasi langkah kerja baru.	

**Catatan:** Pada lampiran Permendikbud Nomor 103 Tahun 2014, taksonomi olahan Dave tidak dicantumkan tetapi dapat digunakan sebagai pengayaan.

- b. Kompetensi Inti merupakan tangga pertama pencapaian yang dituju semua mata pelajaran pada tingkat kelas tertentu. Penjabaran kompetensi inti untuk tiap mata pelajaran dirinci dalam rumusan Kompetensi Dasar. Kompetensi lulusan, kompetensi inti, dan kompetensi dasar dicapai melalui proses pembelajaran dan penilaian yang dapat diilustrasikan dengan skema berikut.



Gambar 2. Skema Hubungan SKL, K-I, KD, Penilaian dan Hasil Belajar

Rumusan standar kompetensi lulusan yang tercantum pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 54 Tahun 2013 untuk tingkat SMK/MAK adalah sebagai berikut.

**Tabel 2. Standar Kompetensi Lulusan SMK/MAK**

Dimensi	Kualifikasi Kemampuan
Sikap	Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap orang beriman, berakhlak mulia, berilmu, percaya diri, dan bertanggung-jawab dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.
Pengetahuan	Memiliki pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif dalam ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab serta dampak fenomena dan kejadian.
Keterampilan	Memiliki kemampuan pikir dan tindak yang efektif dan kreatif dalam ranah abstrak dan konkret sebagai pengembangan dari yang dipelajari di sekolah secara mandiri.

- c. Penguasaan kompetensi lulusan dikelompokkan menjadi beberapa Tingkat Kompetensi, yang diartikan sebagai kriteria capaian Kompetensi yang bersifat generik yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada setiap tingkat kelas dalam rangka pencapaian Standar Kompetensi Lulusan. Tingkat Kompetensi terdiri atas 8 (delapan) jenjang yang harus dicapai oleh peserta didik secara bertahap dan berkesinambungan.

## 5. Monitoring dan Evaluasi

Guna mengetahui ketercapaian dan kesesuaian antara standar kompetensi lulusan dan lulusan dari masing-masing satuan pendidikan, yakni SMK dan

kurikulum yang digunakan di SMK perlu dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dan berkelanjutan. Hasil dari monitoring dan evaluasi digunakan sebagai bahan masukan bagi penyempurnakan standar kompetensi lulusan di masa yang akan datang.

Dalam spektrum keahlian di SMK tahun 2016, telah ditetapkan bahwa dalam usaha mencapai Standar Kompetensi Lulusan yang telah ditetapkan, penyelenggaraan pendidikan di SMK diselenggarakan melalui program pendidikan 3 tahun dan 4 tahun. Masing-masing jenjang pendidikan tersebut disesuaikan dengan tingkat kompetensi yang harus dicapai pada masing-masing program tersebut.

## C. Hasil Kajian dan Pembahasan

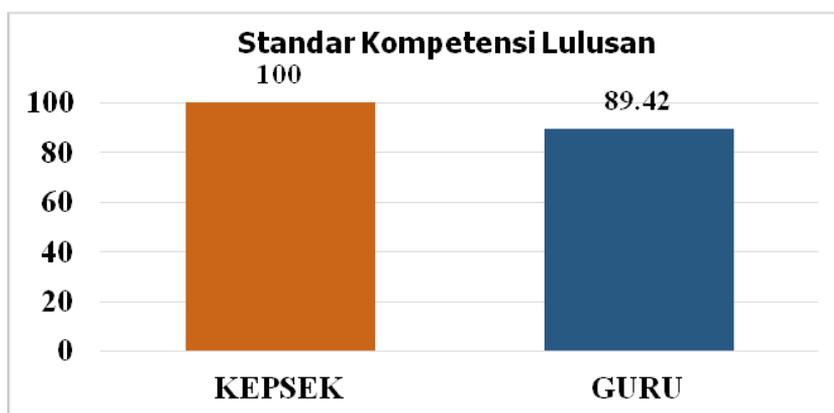
### 1. Capaian Standar Kompetensi Lulusan menurut KS dan Guru

Pencapaian standar kompetensi lulusan dilihat dari rata-rata skor perolehan 13 Kepala sekolah dan 26 Guru SMK. Berikut disajikan hasil analisis standar kompetensi lulusan pada Tabel 3.

**Tabel 3. Deskripsi Hasil Standar Kompetensi Lulusan**

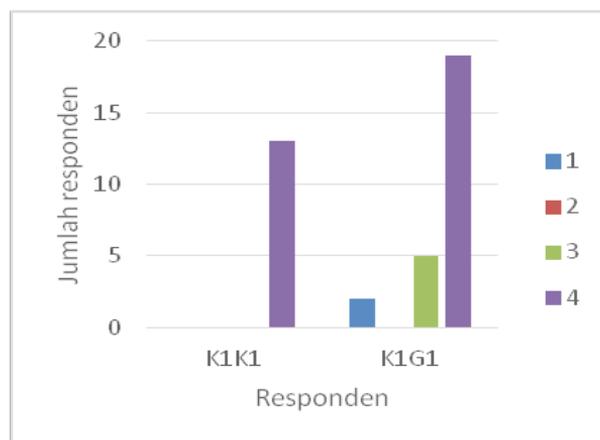
Responden	N	Minimum	Maksimum	Jumlah	Rata-rata	SD
KEPSEK	13	100	100	1.300	100	0,00
GURU	26	25	100	2.325	89,42	21,42

Tabel 1 menunjukkan bahwa secara keseluruhan standar kompetensi lulusan telah mencapai kriteria ketuntasan minimal (KKM) yakni 75. Rata-rata skor capaian SKL menurut Kepala sekolah lebih tinggi dibandingkan skor capaian SKL menurut guru, meskipun demikian skor menurut guru >75 kriteria ketuntasan minimal yakni sebesar 89,42. Hal ini dapat diartikan bahwa standar kompetensi lulusan baik menurut respon dari kepala sekolah maupun menurut guru telah mencapai kriteria ketuntasan minimal. Berikut disajikan pencapaian Standar Kompetensi Lulusan dalam bentuk diagram ditinjau dari rerata menurut responden kepala sekolah dan guru pada Gambar 3.



*Gambar 3. Pencapaian Standar Kompetensi Lulusan*

Adapun jika lebih dicermati capaian SKL yang setara dengan skor 1, 2, 3, maupun 4 menurut kepala sekolah dan guru dinyatakan pada Gambar 4. Berdasarkan Gambar 4, semua kepala sekolah menyatakan capaian SKL sudah sempurna setara skor 4. Respon guru tentang capaian SKL yang setara skor 4, 3, dan 1 berturut-turut 73,08%, 19,23%, dan 7,69%.



Gambar 4. Pencapaian SKL per Responden

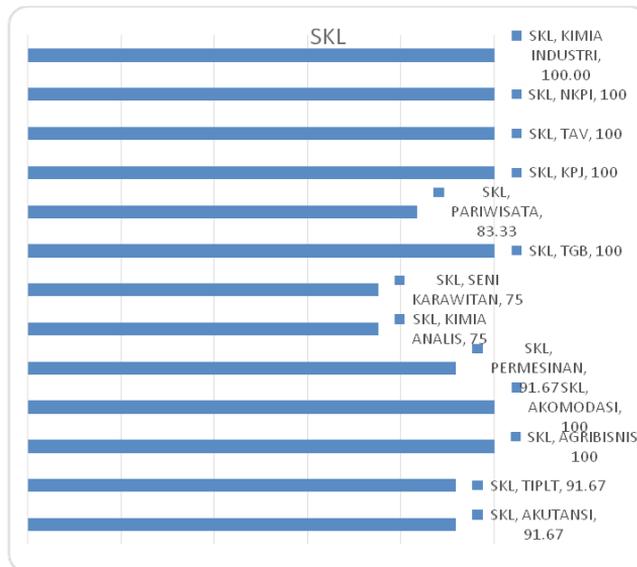
## 2. Pencapaian SKL pada setiap kompetensi keahlian

Tabel 4 menyatakan rerata capaian SKL untuk masing-masing dari 13 kompetensi keahlian SMK yang ada.

**Tabel 4. Capaian SKL untuk masing-masing dari 13 kompetensi**

No	Kompetensi Keahlian	Skor pencapaian
1	Akuntansi	91,67
2	Teknik Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik	91,67
3	Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura	100
4	Akomodasi Perhotelan	100
5	Pemesinan	91,67
6	Kimia Analis	75
7	Seni Karawitan	75
8	Teknik Gambar Bangunan	100
9	Pariwisata	83,33
10	Teknik Komputer Jaringan	100
11	Teknik Audio Video	100
12	Nautika Kapal Penangkapan Ikan	100
13	Kimia Industri	100
	Rerata Skor	92,95

Berdasarkan Tabel 4 standar Kompetensi Lulusan untuk seluruh kompetensi keahlian sudah memenuhi batas minimum (75) yakni memiliki rerata 92,95. Standar Kompetensi Lulusan di seluruh kompetensi keahlian tergolong baik. Hal ini disebabkan karena hampir semua sekolah memiliki standar kompetensi lulusan yang sangat lengkap seperti kerjasama, disiplin, etika kerja/moral, keuletan, kemampuan teori, kemampuan praktek, rasa percaya diri, ketelitian, kreativitas, kepemimpinan, dan tanggungjawab.



Gambar 5. Pencapaian Standar Kompetensi Lulusan di Setiap Kompetensi Keahlian

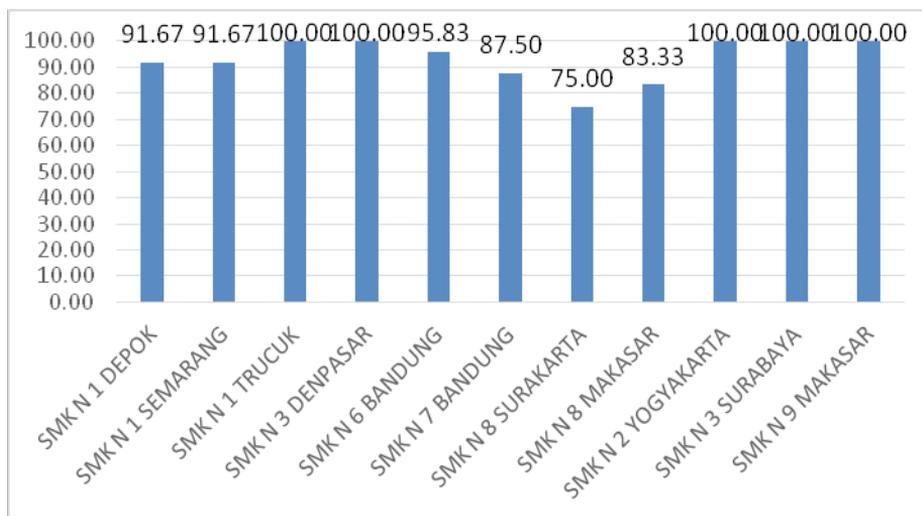
Berdasarkan Gambar 5 rerata terendah adalah kompetensi keahlian Seni Karawitan dan kompetensi keahlian Kimia Analis. Kompetensi keahlian yang memiliki nilai rerata sempurna 100 merupakan sekolah yang sudah lama. Kemudian kompetensi keahlian Seni Karawitan dan kompetensi keahlian Kimia Analisis adalah sekolah baru. Dengan demikian seluruh kompetensi keahlian yang ada sudah lulus atau melebihi 75. Standar Kompetensi Lulusan terpenuhi karena kurikulum yang digunakan sekolah didapatkan secara lengkap dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Seluruh sekolah dapat mengakses dokumen tersebut melalui internet dengan mudah. Dalam kegiatan penyiapan dan pengimplementasikan Kurikulum 2013 hampir seluruh guru sudah mendapatkan pelatihan Kurikulum 2013.

**Tabel 5. Capaian SKL untuk masing-masing sekolah yang terpilih**

	SMK N 1 Depok	SMKN 1 Semarang	SMKN 1 Trucuk	SMKN 3 Denpasar	SMKN 6 Bandung	SMKN 7 Bandung	SMKN 8 Surakarta	SMKN 8 Makasar	SMKN 2 Yogyakarta	SMKN 3 Surabaya	SMKN 9 Makasar	Total
Mean	91.67	91.67	100	100	95.83	87.50	75	83.33	100	100	100	92.94
N	3	3	3	3	6	6	3	3	3	3	3	39
Std. Deviation	14.43	14.43	0	0	10.21	30.62	43.30	14.43	0	0	0	18.09

Minimum	75	75	100	100	75.00	25	25	75	100	100	100	25
Maximum	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Sum	275	275	300	300	575	525	225	250	300	300	300	3625
% of Total Sum	7.6%	7.6%	8.3%	8.3%	15.9%	14.5%	6.2%	6.9%	8.3%	8.3%	8.3%	100.0%

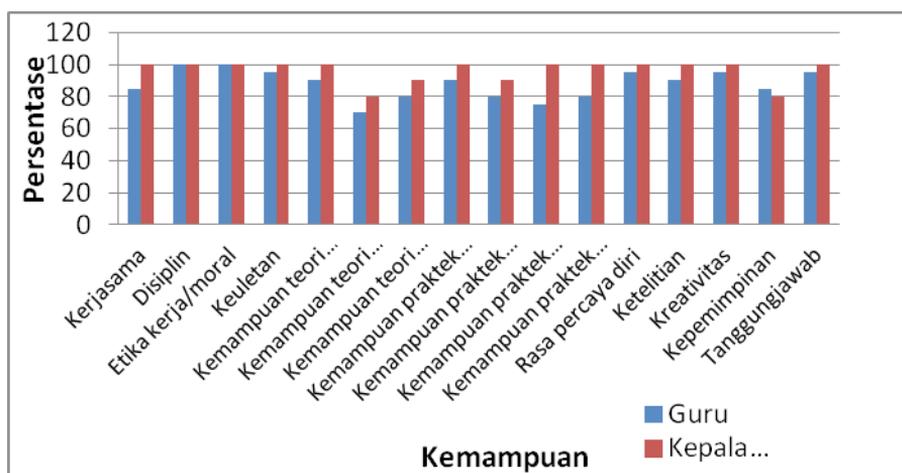
Ada tiga bidang keahlian yang diwakili tiga sekolah yang memiliki SKL rendah, yakni : SMKN 7 Bandung, SMKN 8 Surakarta, dan SMKN 8 Makasar.



Gambar 6. Capaian SKL untuk masing-masing sekolah

### 3. Pencapaian SKL pada setiap aspek Kompetensi Lulusan

Berdasarkan respon dari kepala sekolah dan guru kompetensi lulusan berdasarkan aspek kemampuan dinyatakan dengan Gambar 7. Berdsarkan Gambar 7 bahwa ada kemampuan yang masih rendah yakni kemampuan teori secara konseptual dan kemampuan praktik bertindak kolaboratif, masing-maing 70 dan 7.



Gambar 7. Capaian kemampuan lulusan

#### 4. Manajemen Kemitraan SMK dengan Dunia Kerja dalam Prakerin

Untuk meningkatkan kompetensi lulusan tentu perlu jalinan kerjasama dengan mitra yakni dunia industry. Hal ini senada dengan pernyataan Harbiyah Gani, Husein Usman, Soenarto (2015) pengembangan model manajemen kemitraan SMK dengan dunia kerja dalam prakerin untuk meningkatkan kompetensi lulusan, melalui aspek: kurikulum dan pembelajaran, kesiswaan, dan hubungan masyarakat. Aktivitas-aktivitas ini perlu agar efektif dan efisien tentu perlu ada tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring serta evaluasi.

- a. Pengembangan model manajemen kemitraan SMK dengan dunia kerja dalam prakerin untuk meningkatkan kompetensi lulusan, pada urusan kurikulum dan pembelajaran dengan cara melakukan perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi oleh SMK, masih sebatas melibat dunia kerja dalam pengembangan kurikulum dan pembelajaran mata pelajaran produktif saja. Adapun komponen dan indikator penting kemitraan urusan kurikulum dan pembelajaran, meliputi: (1) pengembangan kurikulum dan pembelajaran; (2) sinkronisasi kurikulum dan pembelajaran prakerin dengan dunia kerja; (3) keterlibatan langsung dunia kerja dalam pengembangan prakerin; (4) kurikulum dan pembelajaran khusus prakerin; dan (5) isi kurikulum dan pembelajaran prakerin yang bersifat muatan lokal dunia kerja.
- b. Pengembangan model manajemen kemitraan SMK dengan dunia kerja dalam prakerin untuk meningkatkan kompetensi lulusan, pada urusan kesiswaan dengan cara melakukan perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi, masih sangat bersifat umum sekali. Indikator yang meliputi: (1) seleksi siswa prakerin; (2) promosi sekolah ke dunia kerja; (3) penempatan siswa prakerin; (4) analisis kebutuhan siswa prakerin agar terjadi kesesuaian; (5) kunjungan ke dunia kerja sebelum prakerin; (6) koordinasi timbal balik dan terus menerus; (7) supervisi; (8) bimbingan; dan (9) evaluasi.
- c. Pengembangan model manajemen kemitraan SMK dengan dunia kerja dalam prakerin untuk meningkatkan kompetensi lulusan, pada urusan hubungan masyarakat, dengan cara melakukan perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi, sudah terlaksana dengan baik, walaupun belum mempunyai model manajemen kemitraan yang jelas. Indikator hubungan masyarakat meliputi: (1) magang siswa, (2) pelaksanaan prakerin siswa, (3) penempatan lulusan, (4) evaluasi kesesuaian tempat prakerin, (5) perbandingan jumlah siswa dengan tempat prakerin, (6) kesesuaian waktu, (7) pemanfaatan *dana corporate social responsibility* (CSR) yang di dunia kerja, (8) uji kompetensi, dan (9) seleksi lulusan untuk bekerja di dunia kerja.

#### 5. Sertifikasi Kompetensi Lulusan

Mutu lulusan pendidikan vokasi secara ideal ditentukan berdasarkan penguasaan atas suatu standar kompetensi kerja yakni Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (Tim Revitalisasi Pendidikan Vokasi Kemendikbud, 2016). Berdasarkan standar kompetensi tersebut, dirumuskan suatu sistem

pengujian dan sertifikasi. Namun sampai dengan saat ini belum semua program keahlian telah tersedia SKKNI-nya dan beberapa SKKNI yang sudah ada belum direfleksikan dalam kurikulum. Saat ini sedang diadakan koordinasi tingkat kementerian/lembaga dalam membuat SKKNI bagi tiap program keahlian kejuruan yang ada.

Beberapa upaya telah dilakukan untuk meminimalisasi kesenjangan kompetensi kerja lulusan pendidikan vokasi dengan kebutuhan dunia usaha/dunia industri, antara lain melalui penyusunan skema sertifikasi bagi lulusan pendidikan vokasi dengan melibatkan asosiasi profesi dan DUDI maupun dalam pelaksanaan uji kompetensi.

Lulusan yang memperoleh sertifikat adalah lulusan yang memenuhi persyaratan kecakapan kerja. Persyaratan tersebut dimulai dari (1) pembelajaran yang benar di sekolahnya, yaitu menjadikan peserta didik sebagai subjek pembelajar yang memiliki karakter, kompetensi, mandiri, bertanggung jawab, kreatif, inovatif, dan kemampuan kewirausahaan; (2) tersedianya peralatan uji sesuai dengan standar kompetensi di sekolahnya; dan (3) asesor yang memiliki sertifikat. Sertifikasi Kecakapan Kerja tersebut diberikan oleh BNSP dan Asosiasi Profesi.

Seperti peserta didik di SMK, sertifikasi kecakapan kerja dilakukan karena pada umumnya lulusan SMK langsung terjun ke dunia kerja sebelum melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya. Oleh karena itu, lulusan SMK diwajibkan memiliki minimal satu kecakapan kerja bersertifikat. Sebagai contoh, lulusan SMK dengan kompetensi keahlian konstruksi gedung, sanitasi, dan perawatan wajib memiliki minimal 1 (satu) dari 7 (tujuh) kecakapan kerja bersertifikat, seperti pada Tabel 6.

**Tabel 6 . Jenis Sertifikasi Kecakapan Kerja Konstruksi Gedung, Sanitasi, dan Perawatan (Direktorat SMK, 2016)**

Kompetensi Keahlian	Jenis Sertifikat Kecakapan Kerja
Konstruksi Gedung, Sanitasi dan Perawatan	Gambar Teknik Mekanika Teknik Dasar-dasar Konstruksi dan Teknik Pengukuran Tanah Utilitas Bangunan, Sistem Kelistrikan, dan Proteksi Gedung Sistem Suplay Air Bersih, Air Kotor, dan Sanitasi Sistem HVAC Estimasi Biaya Perawatan dan Sanitasi Gedung

Dalam rangka membekali lulusan SMK dengan sertifikat kompetensi yang diakui dunia usaha/dunia industri sehingga lulusan SMK tersebut memiliki daya saing yang tinggi, maka sejak tahun 2015 Dit. Pembinaan SMK, Kemendikbud dengan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) telah melaksanakan kegiatan pengembangan SMK menjadi Lembaga Sertifikasi Pihak Pertama (LSP-P1). Adapun lingkup kegiatan pengembangan SMK menjadi LSP-P1 terdiri dari (i)

fasilitasi persiapan dan pelatihan asesor kompetensi; (ii) penyiapan Tempat Uji Kompetensi (TUK); (iii) penyiapan materi uji kompetensi; serta (iv) pelatihan penyusunan dan penerapan dokumen mutu. Nantinya setiap calon lulusan SMK akan mengikuti uji kompetensi/sertifikasi kompetensi yang dilaksanakan di LSP-P1 di sekolah masing-masing atau pada LSP-P1 SMK terdekat. Jika lulus uji kompetensi, peserta akan mendapatkan sertifikat sebagai bukti pengakuan atas kompetensi yang dimilikinya. Pembentukan LSP-P1 dilakukan dengan strategi sebagai berikut.

- a. Pendekatan area: jika di suatu wilayah terdapat beberapa SMK yang belum memiliki LSP-P1 maka akan dikembangkan satu LSP-P1 yang selanjutnya dapat dimanfaatkan oleh semua SMK yang ada di wilayah tersebut;
- b. Pembentukan LSP-P1 difokuskan pada sekolah yang memiliki peserta didik >600: saat ini SMK yang memiliki peserta didik >600 ada sekitar 4.000 SMK, dengan jumlah total peserta didik sebesar 90% total dari jumlah peserta didik SMK seluruh Indonesia.

## **D. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan berdasarkan peraturan yang berlaku, maka:

1. Secara umum capaian SKL sudah terpenuhi, hanya ada tiga kompetensi keahlian yang masih agak rendah, yakni: karawitan, kimia analisis, dan pariwisata.
2. Belum optimalnya kemitraan antara SMK dengan dunia industri dalam prakerin
3. Secara umum capaian kemampuan yang harus dimiliki lulusan secara umum sudah tinggi, hanya rendah pada kemampuan berpikir konseptual dan kemampuan praktik bertindak kolaboratif.

## **E. Rekomendasi**

Berdasarkan analisis pada standar kemampuan lulusan, maka dapat direkomendasikan bahwa:

1. Perlu dilakukan peningkatan capaian SKL pada kompetensi keahlian: karawitan, kimia analisis, dan pariwisata dengan cara mengembangkan model manajemen kemitraan SMK dengan dunia kerja dalam prakerin melalui aspek :
  - a. kurikulum dan pembelajaran, meliputi: (1) pengembangan kurikulum dan pembelajaran; (2) sinkronisasi kurikulum dan pembelajaran prakerin dengan dunia kerja; (3) keterlibatan langsung dunia kerja dalam pengembangan prakerin; (4) kurikulum dan pembelajaran khusus prakerin; dan (5) isi kurikulum dan pembelajaran prakerin yang bersifat muatan lokal dunia kerja.
  - b. kesiswaan, meliputi: (1) seleksi siswa prakerin; (2) promosi sekolah ke dunia kerja; (3) penempatan siswa prakerin; (4) analisis kebutuhan siswa prakerin agar terjadi kesesuaian; (5) kunjungan ke dunia kerja sebelum prakerin; (6) koordinasi timbal balik dan terus menerus; (7) supervisi; (8) bimbingan; dan (9) evaluasi.

- c. hubungan masyarakat, meliputi: (1) magang siswa, (2) pelaksanaan prakerin siswa, (3) penempatan lulusan, (4) evaluasi kesesuaian tempat prakerin, (5) perbandingan jumlah siswa dengan tempat prakerin, (6) kesesuaian waktu, (7) pemanfaatan dana *corporate social responsibility* (crs) yang di dunia kerja, (8) uji kompetensi, dan (9) seleksi lulusan untuk bekerja di dunia kerja.

Aktivitas-aktivitas ini perlu agar efektif dan efisien tentu perlu ada tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring serta evaluasi

2. Mengembangkan model pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan berpikir konseptual dan tidak kalah penting kemampuan *higher order thinking* atau berpikir tingkat tinggi, misalnya antara lain: model *Problem Based Learning* dan model pembelajaran inkuiri
3. Mengembangkan model pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan praktik bertindak kolaboratif, antara lain dengan model *Project Based Learning*.



## A. Pendahuluan

Revitalisasi SMK sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memiliki konsekuensi dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan vokasi karena pengelolaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus, Pendidikan Menengah (SMA dan SMK) dilakukan oleh Pemerintah Provinsi. Pengelolaan pendidikan anak usia dini, Pendidikan Dasar (SD dan SMP) dan Pendidikan Masyarakat (kursus dan pelatihan) dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota (Tim Revitalisasi Pendidikan Vokasi Kemendikbud, 2016).



Provinsi perlu mempersiapkan diri untuk menerima tanggung jawab pengelolaan SMK dari Kabupaten/Kota, mulai dari aspek perencanaan, pendanaan, pembinaan, dan evaluasinya. Perpindahan kewenangan Lembaga Kursus dan Pelatihan ke Pemda Kabupaten/Kota juga membutuhkan waktu penyesuaian.

Dengan demikian perlu disusun sistem dan aturan terkait dengan pengelolaan pendidikan vokasi pada jalur pendidikan formal maupun pada jalur pendidikan nonformal. Pemerintah Provinsi juga harus siap dalam menghadapi perpindahan

pengelolaan ini sehingga tidak berpengaruh pada kualitas pembelajaran. Adaptasi perpindahan pengelolaan lembaga pendidikan ini hendaknya juga diikuti dengan komitmen peningkatan mutu oleh Pemda terhadap pengelolaan satuan pendidikan di wilayahnya.

Saat ini pemerintah telah melakukan penyelarasan secara periodik dan melibatkan pengguna lulusan. Penyelarasan adalah mempertemukan antara sisi pasokan (supply) dan sisi permintaan (demand) yang mencakup beberapa dimensi, yaitu kualitas, kompetensi, kuantitas, lokasi dan waktu. Gambar di bawah ini menunjukkan penyelarasan bidang, program, dan kompetensi keahlian di SMK.

No.	Bidang Keahlian SMK 2008-2013	Bidang Keahlian 2016	PK	KK	SK
1.	Teknologi dan Rekayasa	Teknologi dan Rekayasa	13	58	419
2.	Teknologi Informasi dan Komunikasi	Energi dan Pertambangan	3	6	42
3.	Kesehatan	TIK	2	6	44
4.	Agribisnis dan Agroteknologi	Kesehatan dan Pekerjaan Sosial	5	7	49
5.	Perikanan dan Kelautan	Agribisnis dan Agroteknologi	6	20	215
6.	Bisnis dan Manajemen	Kemaritiman	4	10	74
7.	Pariwisata	Bisnis dan Manajemen	3	5	60
8.	Seni Rupa dan Kriya	Pariwisata	4	8	96
9.	Seni Pertunjukan	Seni dan Industri Kreatif	8	22	162
	<b>Jumlah</b>		<b>48</b>	<b>142</b>	<b>1161</b>

Keterangan :

PK: Program Keahlian      KK: Kompetensi Keahlian      SK: Sertifikat Keahlian

Gambar 8. Penyelarasan Bidang, Program, dan Kompetensi Keahlian SMK

Selain reorientasi program keahlian kejuruan di SMK agar lebih memenuhi kebutuhan dunia usaha dan dunia industri, ada beberapa strategi untuk memastikan agar kurikulum bisa lebih selaras sehingga peserta didik bisa mengembangkan kompetensinya, yaitu *dual system*. *Dual system* pada pendidikan vokasi merupakan suatu bentuk penyelenggaraan pendidikan keahlian profesional yang memadukan secara sistematis dan sinkron program pendidikan di sekolah dan program penguasaan keahlian yang diperoleh melalui kegiatan bekerja langsung di dunia kerja, terarah untuk mencapai suatu tingkat keahlian profesional tertentu.

Pada hakikatnya *dual system* merupakan suatu strategi yang mendekatkan peserta didik ke dunia kerja dan ini adalah strategi proaktif yang menuntut perubahan sikap dan pola pikir serta fungsi pelaku pendidikan di tingkat SMK, masyarakat, dan dunia usaha/industri dalam menyikapi perubahan dinamika tersebut.

Apabila pada pendidikan umum, program pendidikan direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi secara sepihak dan lebih bertumpu kepada kepemimpinan kepala sekolah dan guru, maka pada program *dual system* pendidikan direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi bersama secara terpadu antara sekolah dan institusi pasangannya. Oleh karena itu, fungsi operasional di lapangan dilaksanakan bersama antara kepala sekolah, guru, instruktur, dan manager terkait. Untuk itu, perlu diciptakan adanya keterpaduan

peran dan fungsi guru serta instruktur sebagai pelaku pendidikan yang terlibat langsung dalam pelaksanaan Pendidikan Sistem Ganda di lapangan secara kondusif.

## **B. Standar dan Peraturan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 ayat (3) mengamanatkan bahwa Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang. Atas dasar amanah tersebut telah diterbitkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Dasar, fungsi, dan tujuan pendidikan nasional menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Pasal 2), berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab (Pasal 3).

Implementasi Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dijabarkan ke dalam sejumlah peraturan, di antaranya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Peraturan Pemerintah tersebut memberikan arahan tentang perlunya disusun dan dilaksanakan delapan standar nasional pendidikan, yaitu: standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan.

Dalam upaya mewujudkan tujuan pendidikan nasional tersebut telah ditetapkan Standar Kompetensi Lulusan yang merupakan kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Untuk mencapai kompetensi lulusan tersebut perlu ditetapkan Standar Isi yang merupakan kriteria mengenai ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi peserta didik untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu.

Guna memenuhi kebutuhan masa depan dan menyongsong Generasi Emas Indonesia Tahun 2045, telah ditetapkan Standar Kompetensi Lulusan yang berbasis pada Kompetensi Abad XXI, Bonus Demografi Indonesia, dan Potensi Indonesia menjadi Kelompok 7 Negara Ekonomi Terbesar Dunia, dan sekaligus memperkuat kontribusi Indonesia terhadap pembangunan peradaban dunia. Ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi peserta didik yang harus dipenuhi atau dicapai pada suatu satuan pendidikan dalam jenjang dan jenis pendidikan tertentu dirumuskan dalam Standar Isi untuk setiap mata pelajaran.

Standar Isi disesuaikan dengan substansi tujuan pendidikan nasional dalam domain sikap spiritual dan sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Oleh karena itu, Standar Isi dikembangkan untuk menentukan kriteria ruang lingkup dan tingkat kompetensi yang sesuai dengan kompetensi lulusan yang dirumuskan pada Standar Kompetensi Lulusan, yakni sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Karakteristik, kesesuaian, kecukupan, keluasan, dan kedalaman materi ditentukan sesuai dengan karakteristik kompetensi beserta proses pemerolehan kompetensi tersebut. Ketiga kompetensi tersebut memiliki proses pemerolehan yang berbeda. Sikap dibentuk melalui aktivitas-aktivitas: menerima, menjalankan, menghargai, menghayati, dan mengamalkan. Pengetahuan dimiliki melalui aktivitas-aktivitas: mengetahui, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. Keterampilan diperoleh melalui aktivitas-aktivitas: mengamati, menanya, mencoba, menalar, menyaji, dan mencipta. Karakteristik kompetensi beserta perbedaan proses pemerolehannya mempengaruhi Standar Isi (Permendikbud Nomor 21 Tahun 2016).

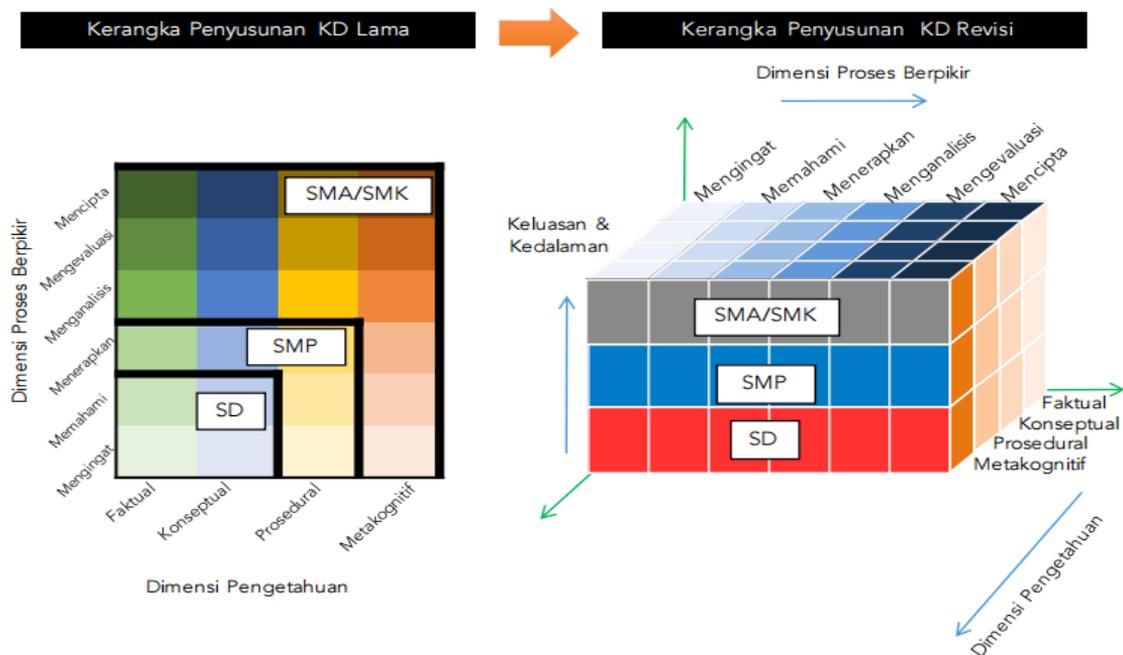
Standar Isi menurut Permendikbud Nomor 21 Tahun 2016 adalah kriteria mengenai ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Ruang lingkup materi dirumuskan berdasarkan kriteria muatan wajib yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, konsep keilmuan, dan karakteristik satuan pendidikan dan program pendidikan. Selanjutnya, tingkat kompetensi dirumuskan berdasarkan kriteria tingkat perkembangan peserta didik, kualifikasi kompetensi Indonesia, dan penguasaan kompetensi yang berjenjang.

Pengembangan kurikulum dilakukan sesuai dengan dinamika perkembangan yang terjadi di masyarakat. Penerapan Kurikulum 2013 telah berjalan empat tahun, yang dalam aplikasinya masih mendapatkan beberapa kendala baik di masyarakat maupun pada tingkat pendidik seperti yang terlihat pada Gambar 9 di bawah ini.



Gambar 9. Pemetaan permasalahan kurikulum

Atas dasar permasalahan yang terjadi selama implementasi Kurikulum 2013 tersebut dilakukan penyempurnaan-penyempurnaan agar secara bertahap pelaksanaan kurikulum dapat terlaksana sesuai dengan rancangan dan tujuan yang telah ditetapkan (Dit. PSMK, 2016). Pola perbaikan dokumen Kurikulum 2013 dapat di gambarkan sebagai berikut.



Gambar 10. Pemetaan tingkat kompetensi

Tingkat Kompetensi dikembangkan berdasarkan kriteria; (1) Tingkat perkembangan peserta didik, (2) Kualifikasi kompetensi nasional Indonesia, (3) Penguasaan kompetensi yang berjenjang. Selain itu Tingkat Kompetensi juga memperhatikan tingkat kerumitan/ kompleksitas kompetensi, fungsi satuan pendidikan, dan keterpaduan antar jenjang yang relevan.

**Tabel 7. Deskripsi Kompetensi Inti SMK**

KOMPETENSI INTI	DESKRIPSI KOMPETENSI
Sikap Spritual	1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya
Sikap Sosial	2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, santun, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), bertanggung jawab, responsif, dan pro-aktif melalui keteladanan, pemberian nasehat, penguatan, pembiasaan, dan pengkondisian secara berkesinambungan serta menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.

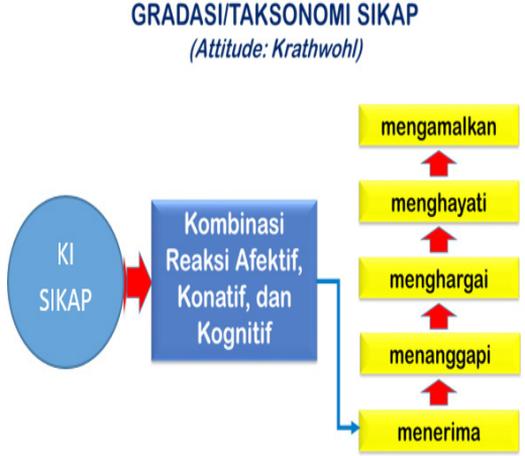
KOMPETENSI INTI	DESKRIPSI KOMPETENSI
Pengetahuan	3. Memahami, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat teknis, spesifik, detil, dan kompleks dalam ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian pada bidang kerja yang spesifik untuk memecahkan masalah.
Keterampilan	4. Menunjukkan keterampilan menalar, mengolah, dan menyaji secara: <ol style="list-style-type: none"> <li>efektif,</li> <li>kreatif,</li> <li>produktif,</li> <li>kritis,</li> <li>mandiri,</li> <li>kolaboratif,</li> <li>komunikatif, dan</li> <li>solutif,</li> </ol> Dalam ranah konkret dan abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah, serta mampu melaksanakan tugas spesifik di bawah pengawasan langsung.

**Tabel 8. Kompetensi Inti SMK Kelas X-XII**

KOMPETENSI INTI KELAS X	KOMPETENSI INTI KELAS XI	KOMPETENSI INTI KELAS XII
<b>Sikap Spiritual:</b> Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.		
<b>Sikap Sosial:</b> Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (gotong royong, kerja sama, toleran, damai), santun, responsif dan proaktif, dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta menempatkan diri sebagai cerminan bangsa pada pergaulan dunia.		
<b>Pengetahuan</b>		
3. Memahami, menerapkan dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dalam wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian dalam bidang kerja yang spesifik untuk memecahkan masalah.	3. Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dalam wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian dalam bidang kerja yang spesifik untuk solusi	3. Memahami, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif dalam ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian dalam bidang kerja yang spesifik untuk memecahkan masalah.
<b>Keterampilan</b>		

KOMPETENSI INTI KELAS X	KOMPETENSI INTI KELAS XI	KOMPETENSI INTI KELAS XII
4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu melaksanakan tugas spesifik di bawah pengawasan langsung.	4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, dan mampu melaksanakan tugas spesifik di bawah pengawasan langsung.	4. Mengolah, menalar, menyaji, dan mencipta dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu melaksanakan tugas spesifik di bawah pengawasan langsung.

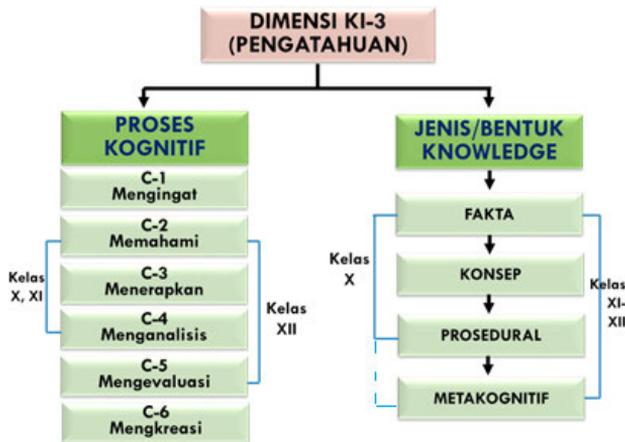
Kompetensi Inti pada ranah sikap (sikap spiritual dan sikap sosial / KI-1&2) merupakan kombinasi reaksi afektif, kognitif, dan konatif (perilaku). Gradasi kompetensi sikap meliputi menerima, merespon/menanggapi, menghargai, menghayati, dan mengamalkan.



Gambar 11. Gradasi dan Taksonomi Ranah Sikap

Kompetensi Inti pada ranah pengetahuan (KI-3) memiliki dua dimensi dengan batasan-batasan yang telah ditentukan pada setiap tingkatnya.

1. Dimensi pertama adalah dimensi perkembangan kognitif (cognitive process dimension) peserta didik:  
 Pada kelas X dan kelas XI dimulai dari memahami (C2), menerapkan (C3) dan kemampuan menganalisis (C4), untuk kelas XII ditambah hingga kemampuan evaluasi (C5).
2. Dimensi kedua adalah dimensi pengetahuan (knowledge dimension):  
 Pada kelas X berupa pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural yang merupakan bentuk pengetahuan minimal, sedangkan untuk kelas XI dan XII dilanjutkan sampai metakognitif.

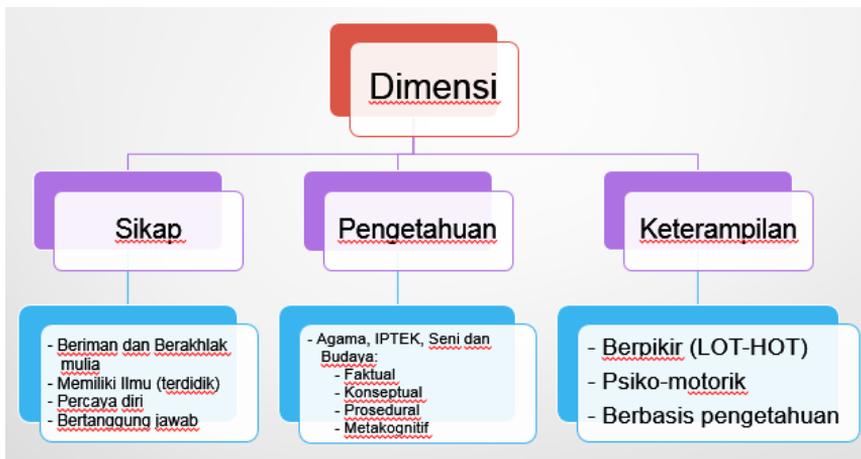


Gambar 12. Dimensi pada Kompetensi Inti Pengetahuan

- a. **Pengetahuan faktual** yakni pengetahuan terminologi atau pengetahuan detail yang spesifik dan elemen. Contoh fakta bisa berupa kejadian atau peristiwa yang dapat dilihat, didengar, dibaca, atau diraba. Seperti mesin mobil hidup, lampu menyala, rem yang pakem/blong. Contoh lain: Arsip dan dokumen.
- b. **Pengetahuan konseptual** merupakan pengetahuan yang lebih kompleks berbentuk klasifikasi, kategori, prinsip dan generalisasi. Contohnya fungsi busi pada Mesin mobil, prinsip kerja starter, prinsip kerja lampu, prinsip kerja rem. Contoh lain: Pengertian Arsip dan dokumen, Fungsi Arsip dan dokumen.
- c. **Pengetahuan prosedural** merupakan pengetahuan bagaimana melakukan sesuatu termasuk pengetahuan keterampilan, algoritma (urutan langkah-langkah logis pada penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis), teknik, dan metoda seperti langkah-langkah membongkar mesin, langkah-langkah mengganti lampu, langkah-langkah mengganti sepatu rem. Contoh lain: Langkah-langkah menyusun arsip sistem alphabet dan geografik.
- d. **Pengetahuan metakognitif** yaitu pengetahuan tentang kognisi (mengetahui dan memahami) yang merupakan tindakan atas dasar suatu pemahaman meliputi kesadaran dan pengendalian berpikir, serta penetapan keputusan tentang sesuatu. Sebagai contoh memperbaiki mesin yang rusak, membuat instalasi kelistrikan lampu, mengapa terjadi rem blong. Contoh lain: Apa yang terjadi jika penyimpanan arsip tidak tepat?

Pembagian taksonomi hasil belajar dilakukan untuk mengukur perubahan perilaku peserta didik selama proses belajar sampai pada pencapaian hasil belajar yang dirumuskan dalam aspek perilaku (*behaviour*) tujuan pembelajaran. Umumnya klasifikasi perilaku hasil belajar yang digunakan berdasarkan **taksonomi Bloom** yang pada Kurikulum 2013 yang telah disempurnakan oleh **Anderson** dan **Krathwohl** dengan pengelompokan menjadi : (1) Sikap (*affective*) merupakan perilaku, emosi dan perasaan dalam bersikap dan merasa, (2) Pengetahuan (*cognitive*) merupakan kapabilitas intelektual dalam bentuk pengetahuan atau berpikir, (3) Keterampilan (*psychomotor*)

merupakan keterampilan manual atau motorik dalam bentuk melakukan.



Gambar 13. Kompetensi Sekolah Menengah Kejuruan

1. Ranah sikap dalam Kurikulum 2013 merupakan urutan pertama dalam perumusan kompetensi lulusan, selanjutnya diikuti dengan rumusan ranah pengetahuan dan keterampilan. Ranah sikap dalam Kurikulum 2013 menggunakan olahan Krathwohl, dimana pembentukan sikap peserta didik ditata secara hirarkhis mulai dari menerima (accepting), merespon/menanggapi (responding), menghargai (valuing), menghayati (organizing/internalizing), dan mengamalkan (characterizing/ actualizing).
2. Ranah pengetahuan pada Kurikulum 2013 menggunakan taksonomi Bloom olahan Anderson, dimana perkembangan kemampuan mental intelektual peserta didik dimulai dari C1 yakni: (1) mengingat (remember), peserta didik mengingat kembali pengetahuan dari memorinya; (2) C2 yakni memahami (understand), merupakan kemampuan mengonstruksi makna dari pesan pembelajaran baik secara lisan, tulisan maupun grafik; (3) C3 yakni menerapkan (apply); merupakan penggunaan prosedur dalam situasi yang diberikan atau situasi baru; (4) C4 yakni menganalisis (analyse); merupakan penguraian materi ke dalam bagian-bagian dan bagaimana bagian-bagian tersebut saling berhubungan satu sama lainnya dalam keseluruhan struktur; (5) C5 yakni mengevaluasi (evaluate); merupakan kemampuan membuat keputusan berdasarkan kriteria dan standar; dan (6) C6 yakni mengkreasi (create); merupakan kemampuan menempatkan elemen-elemen secara bersamaan ke dalam bentuk modifikasi atau mengorganisasikan elemen-elemen ke dalam pola baru (struktur baru).
3. Ranah keterampilan pada Kurikulum 2013 yang mengarah pada pembentukan keterampilan abstrak menggunakan gradasi dari Dyers yang ditata sebagai berikut: (1) mengamati (observing);(2) menanya (questioning);(3) mencoba (experimenting);(4) menalar (associating); (5) menyaji (communicating); dan (6) mencipta (creating).
4. Pembentukan keterampilan kongkret menggunakan gradasi olahan Simpson dengan tingkatan: persepsi, kesiapan, meniru, membiasakan gerakan, mahir,

menjadi gerakan alami, dan menjadi gerakan orisinal.

Kurikulum harus dirancang dengan berorientasi pada penggabungan antara instruction dan construction sehingga pendekatan utama dalam membentuk tahapan pembelajaran yang mengacu pada fase pembelajaran di sekolah ataupun praktik di industri dan berorientasi pada hasil proses pembelajaran yang diinginkan. Selain itu, perlu mempertimbangkan orientasi kompetensi pada berbagai level sejalan dengan pendesainan proses pembelajaran. Gambar di bawah ini menunjukkan hasil penyelarasan kurikulum.

Mata Pelajaran	Program 3 Tahun			Program 4 Tahun			
	Kelas			Kelas			
	X	XI	XII	X	XI	XII	XIII
<b>Kelompok Wajib</b>							
1. Pendidikan Agama	3	3	(2)*	3	3	(2)*	(2)*
2. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	3	3	(2)*	3	3	(2)*	
3. Bahasa Indonesia	4	3	3	4	3	3	
4. Matematika	4	3	3	4	3	3	
5. Sejarah Indonesia	3	-	-	3	-	-	
6. Bahasa Inggris	3	3	4	3	3	4	(3)*
7. Seni Budaya	3	(2)*	(2)*	3	(2)*	(2)*	
8. Kewirausahaan	-	3	(3)*	-	3	(3)*	(3)*
9. Pendidikan Jasmani, Olah Raga, dan Kesehatan	3	3	(2)*	3	3	(2)*	
<b>Jumlah Jam Pelajaran Kelompok Wajib</b>	<b>26</b>	<b>21</b>	<b>10</b>	<b>26</b>	<b>21</b>	<b>10</b>	
<b>Kelompok Peminatan</b>							
Peminatan Akademik dan Kejuruan SMK	22	27	38	22	27	38	48

\*) Dilaksanakan sebagai Ekstrakurikuler yang wajib diikuti

Gambar 14. Penyelarasan Kurikulum SMK

Kurikulum yang dirancang menempatkan teknologi atau subjek kejuruan sebagai disiplin utama ke dalam fokus pembelajaran teori. Oleh karena itu, semua mata pelajaran dirancang untuk mendukung pembelajaran kejuruan utama. Isi dan tujuan pembelajaran yang merupakan bagian dari bidang kejuruan yang sesuai harus dipilih untuk pengembangan/ perluasan semaksimal mungkin. Seluruh tujuan pendidikan vokasi berorientasi pada aktivitas dan kekhususan bidang kejuruan, baik dalam hal isi maupun pelaksanaannya.

Perancangan program praktik tidak terlepas dari implementasi silabus ke dalam pembelajaran, yang membutuhkan metode, strategi, dan evaluasi pelaksanaan yang sesuai. Kemampuan-kemampuan yang sudah dimiliki peserta didik, melalui latihan dan praktik di sekolah perlu diimplementasikan secara nyata sehingga tumbuh kesadaran bahwa apa yang sudah dimilikinya berguna bagi dirinya dan orang lain. Dengan begitu, peserta didik akan lebih percaya diri karena orang lain dapat memahami apa yang dipahaminya dan pengetahuannya diterima oleh dunia kerja/industri. Oleh karena itu, pelaksanaan praktik di SMK secara umum menggunakan sistem blok pembelajaran yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan industri. Secara umum pelaksanaan praktik di SMK untuk SMK 3 tahun dijelaskan pada Gambar 15.



Gambar 15. Pelaksanaan praktik di SMK

Pengorganisasian praktik di SMK adalah sebagai berikut:

1. Tahun Pertama adalah Praktik Keterampilan Kejuruan yang merupakan bagian dari rencana pembelajaran tingkat dasar yang dilaksanakan di Ruang Praktik Sekolah.
2. Tahun Kedua adalah Praktik Kompetensi Kerja untuk 6 bulan pertama dan Praktik Realisasi Produk di *Teaching Factory* dasar yang dilaksanakan di Ruang Praktik Sekolah. Tahapan ini merupakan tahap spesialisasi pertama, tetapi spesialisasi ini masih bersifat luas. Spesialisasi ini berorientasi pada kemampuan khusus yang esensial pada suatu ruang lingkup kelompok kejuruan kecil.
3. Tahun Ketiga adalah Praktik Magang Industri pada 6 bulan pertama dan diikuti dengan Transisi Jenjang Karir, Pelaksanaan UN, dan Sertifikasi. Praktik Magang Industri dilakukan di Industri/Dunia Kerja difokuskan pada spesialisasi keterampilan khusus dari suatu bidang kerja dan yang secara khusus diperlukan oleh tempat kerja.

## C. Hasil Kajian dan Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencapaian Standar Isi untuk seluruh kompetensi keahlian belum memenuhi batas tuntas karena memiliki rerata 72,94. Hanya ada dua aspek yang tergolong baik yakni penetapan beban belajar dalam Kurikulum 2013 dan pemberian layanan pembelajaran untuk remedial. Hampir semua sekolah sudah menetapkan beban belajar yang sesuai dengan Permendikbud yakni jumlah jam pembelajaran dalam seminggu minimal 38 jam dan alokasi waktu satu jam pelajaran sebesar 45 menit. Selain itu, sebagian besar (90%) guru sudah memberikan layanan perbaikan atau remedial kepada siswa yang belum memenuhi kriteria ketuntasan minimal (KKM).

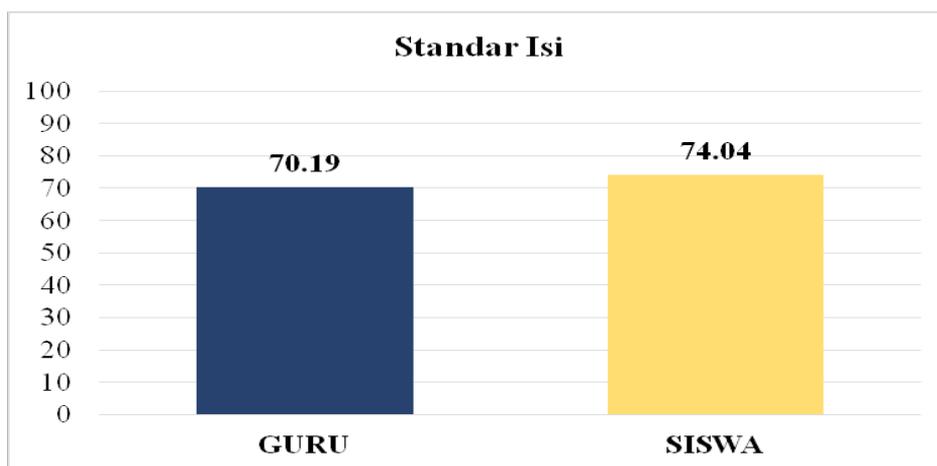
Rerata terendah pada Standar Isi adalah kompetensi keahlian Seni Karawitan SMK Negeri 8 Surakarta yaitu 60,71. Menurut penilaian guru dan siswa rendahnya rerata tersebut karena sebagian guru belum lengkap menetapkan beban belajar dalam

K.13, kurangnya bahan pertimbangan guru dalam menyusun kurikulum muatan lokal, pengembangan kurikulum tidak melibatkan stakeholders terkait seperti kepala sekolah, guru, komite sekolah, dinas pendidikan, dan instansi terkait di sekolah. Sekolah tidak memperhatikan usia peserta didik dalam penyusunan kurikulum muatan lokal. Dalam kegiatan ekstrakurikuler, sebagian besar guru belum dilibatkan dalam pembahasannya. Selain itu, sebagian besar guru belum memberikan tambahan pembelajaran (pengayaan) bagi siswa yang sudah tuntas. Mereka lebih sering memperhatikan pada pembelajaran remedial. Pencapaian standar isi dilihat dari rata-rata skor perolehan 26 Guru dan 65 Siswa SMK. Berikut disajikan hasil analisis standar isi pada Tabel 9 di bawah ini.

**Tabel 9. Deskripsi Hasil Penelitian Standar Isi**

<b>Responden</b>	<b>N</b>	<b>Min</b>	<b>Mak</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Rata-rata</b>	<b>SD</b>
GURU	26	37,50	100	1.825	70,19	21,38
SISWA	65	37,50	100	4.813	74,04	14,87

Tabel 9 menunjukkan bahwa secara keseluruhan standar isi belum mencapai kriteria ketuntasan minimal (KKM) yakni sebesar 75. Rata-rata skor perolehan Guru lebih tinggi dibandingkan skor perolehan Siswa. Namun, rata-rata dari skor perolehan Guru pun belum mencapai kriteria ketuntasan minimal yakni sebesar 70,19. Hal ini dapat diartikan bahwa standar isi baik ditinjau dari Guru maupun Siswa belum mencapai kriteria ketuntasan minimal. Berikut disajikan pencapaian Standar Isi dalam bentuk diagram ditinjau dari rerata tiap responden pada Gambar 16 di bawah ini.



*Gambar 16. Pencapaian Standar Isi*

Beberapa penyebab pencapaian standar isi belum memenuhi KKM diantaranya terlihat dari beberapa indikator yang rendah. Hal ini tertera dalam instrumen penelitian dengan responden Kepala Sekolah, Guru, dan siswa. Hasilnya menurut Kasek belum semua guru mendapatkan pendampingan dan pelatihan implementasi kurikulum 2013. Sementara menurut Kasek dan guru menyatakan bahwa pelatihan kurikulum 2013 belum sesuai dengan kebutuhan guru dalam proses pembelajaran. Guru juga belum banyak yang dapat mengaplikasikan pembelajaran berbasis saintifik, berbasis industri,

problem solving, dan belum mengembangkan penilaian sikap spiritual dan sosial. Hal ini menurut guru dukungan dan fasilitas yang diberikan pihak sekolah dalam implementasi kurikulum 2013 kurang memadai.

Sementara menurut siswa SMK menyatakan bahwa belum semua guru mengaitkan pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari terutama keterkaitannya dengan kebutuhan industri, dan belum semua guru memberikan tugas sesuai dengan rencana pembelajaran dan terkadang tidak ada keterkaitan dengan pertemuan yang akan datang. Siswa juga menyatakan bahwa belum semua guru melakukan pembelajaran berbasis proyek dan problem solving serta guru jarang menggunakan sumber belajar lain seperti alam sekitar, lingkungan sosial, perpustakaan, internet, dan laboratorium.

Berdasarkan wawancara dengan Kasek dan guru, pencapaian standar isi belum mencapai KKM (75%) ini disebabkan juga oleh kebijakan tentang kurikulum 2013 yang belum stabil. Adanya dua kurikulum yang diberlakukan membuat sebagian sekolah mengalami kebingungan bahkan ada guru dan sekolah telah mengikuti pendampingan dan pelatihan implementasi kurikulum 2013 tetapi tetap memilih melaksanakan kurikulum sebelumnya mengingat banyak ketidaksiapan baik dari guru yang bersangkutan maupun fasilitas yang ada di sekolah.

Hasil penelitian juga menunjukkan ada beberapa kemampuan yang tidak diajarkan di sekolah padahal kemampuan tersebut sangat dibutuhkan dan penting di industri. Hal ini seperti terungkap dari kuesioner yang diberikan kepada responden alumni SMK 3 tahun yang telah bekerja di industri. Berikut beberapa kemampuan yang tidak diajarkan di sekolah tetapi dibutuhkan di industri.

**Tabel 10. Kemampuan yang dibutuhkan**

No.	Kemampuan yang diperlukan	Jumlah
1	Manajemen	11
2	Komunikasi	3
3	Pengetahuan pendukung pekerjaan	4
4	Keterampilan pengoperasian pekerjaan	37
5	Public Speaking	7

## Kemampuan yang dibutuhkan di Industri tetapi tidak diajarkan di sekolah



Gambar 17. Kemampuan yang dibutuhkan

Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwasanya beberapa kemampuan yang dibutuhkan para lulusan SMK ketika bekerja di industri, ternyata tidak mereka dapatkan ketika belajar di SMK. Kemampuan tersebut dapat dikelompokkan menjadi lima bidang, diantaranya adalah 11 orang menyatakan kemampuan yang dibutuhkan manajemen, 3 orang menyatakan bahasa, 4 orang menyatakan pengetahuan pendukung (konsep dasar), dan paling banyak 37 orang menyatakan keterampilan khusus untuk mengoperasikan pekerjaan, serta sisanya sebanyak 7 orang menyatakan kemampuan public speaking. Hal ini menunjukkan bahwasanya SMK belum sepenuhnya memberikan pengetahuan maupun keterampilan yang relevan dengan kebutuhan Industri.

### D. Kesimpulan

Secara keseluruhan kesimpulan hasil studi tentang pencapaian Standar Isi SMK yang perlu dijadikan perhatian ialah:

1. Belum semua guru mengikuti pendampingan dan pelatihan implementasi kurikulum 2013
2. Belum semua sekolah dan guru siap dan mampu mengimplementasikan kurikulum 2013
3. Belum semua guru dapat mengaplikasikan pembelajaran saintifik, berbasis di industri, dan problem solving.
4. Dukungan dan fasilitas dari sekolah dalam implementasi kurikulum 2013 belum memadai
5. Sekolah dan guru belum mengoptimalkan fasilitas sekolah seperti perpustakaan, laboratorium, dan internet untuk mendukung implementasi kurikulum 2013.

### E. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan di atas maka dapat direkomendasikan sebagai berikut.

1. Sekolah mendata guru-guru yang belum mendapatkan pendampingan dan pelatihan implementasi kurikulum 2013 dan mengajukannya kepada dinas pendidikan dan direktorat PSMK

2. Apabila poin satu di atas belum dapat direalisasikan dari pemerintah, sekolah dapat berinisiatif menggelar dan menugaskan guru yang belum mendapatkan pelatihan belajar kepada guru yang sudah
3. Optimalisasi fasilitas sekolah guna mendukung implementasi kurikulum 2013.



# STANDAR PROSES

## A. Pendahuluan

Pada era abad 21 dunia pendidikan akan menghadapi tantangan yang lebih berat dibanding dengan abad-abad sebelumnya. Lingkungan bisnis global yang menjadi semakin kompleks, dinamis dan memunculkan berbagai konflik kepentingan. Dalam dunia pendidikan, teknologi telah berkembang sangat pesat memasuki sampai ruang-ruang kelas tanpa melewati kontrol sosial, politik dan moral; mulai munculnya pemikiran apa yang seharusnya masuk dalam kurikulum dan sebaliknya apa yang tidak perlu dimasukkan ke dalam kurikulum; dan munculnya pemikiran mengenai pengembangan kurikulum pendidikan yang disesuaikan dengan perkembangan global, IPTEK dan juga kebutuhan global.

Guna menghadapi era global dengan akselerasi yang sangat cepat tersebut, dunia pendidikan, khususnya SMK akan menghadapi tantangan yang lebih berat, terutama dalam menyiapkan lulusan sebagai tenaga kerja yang tidak hanya memiliki kemampuan untuk bekerja dalam bidangnya, namun juga harus memiliki kemampuan untuk menghadapi perubahan serta dapat memanfaatkan perubahan itu sendiri secara



kreatif.

Pengetahuan dan kemampuan bekerja dalam bidang tertentu (*hard skill*) kini sudah tidak lagi mencukupi bagi seseorang dalam meraih kesuksesan di dunia kerja. Saat ini, diperlukan seseorang pekerja yang memiliki pemikiran integratif, seorang komunikator dan negosiator yang handal, cerdas secara emosional, mampu bekerja dalam *team work* dan beretika, yang kesemuanya itu bersifat *soft skill*. Oleh karena itu, pandangan tradisional yang beranggapan bahwa untuk berhasil dalam bekerja, seseorang harus memiliki pengetahuan dan keterampilan yang tinggi dalam bidang pekerjaannya, dianggap sudah tidak relevan lagi.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka yang menjadi masalah adalah bagaimana mengintegrasikan kedua komponen kompetensi *hard skill* dan *soft skill* tersebut secara terpadu dalam kurikulum pendidikan, sehingga mampu menyiapkan lulusan yang memiliki kemampuan untuk bekerja dan berkembang di masa depan. Selain itu, masalah yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana mengimplementasikan kurikulum yang telah dikembangkan tersebut ke dalam pembelajaran ataupun program lain.

Upaya peningkatan mutu lulusan agar memiliki keterkaitan dan kesepadanan (*link and match*) dengan tuntutan kebutuhan pasar kerja pada dasarnya tak dapat dilepaskan dari aspek manajemen peningkatan mutu yang dimanifestasikan dalam manajemen kelembagaan dan manajemen pembelajaran. Betapapun baiknya kualitas kurikulum ataupun program yang telah disusun, tidak akan berarti apa-apa manakala tidak didukung oleh strategi yang tepat, sumber daya yang memadai, SDM yang kompeten dan memiliki komitmen, pengelolaan yang baik dan iklim serta kultur yang menunjang.

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) memiliki misi utama untuk menghasilkan tenaga kerja yang terampil dan sesuai dengan kebutuhan lapangan kerja. Selain itu, lulusan SMK juga memiliki kesempatan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi (perguruan tinggi), selain juga diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja sendiri sebagai wirausaha mandiri. Namun demikian, data tentang jumlah pengangguran di Indonesia per Februari 2016 menunjukkan bahwa dari sebanyak 7,02 juta orang yang masih menganggur, persentase yang terbanyak adalah lulusan SMK, yakni sebesar 9,84% (Laporan BPS, Rabu 4 Mei 2016). Berdasarkan data tersebut, ketua BPS Suryamin menyatakan bahwa dari setiap 100 angkatan kerja lulusan SMK, ada sekitar 9 hingga 10 orang yang masih menganggur.

Fakta di atas mengisyaratkan adanya permasalahan mendasar dalam penyelenggaraan pendidikan di SMK kita selama ini. Selain permasalahan terbatasnya lapangan pekerjaan akibat pertumbuhan ekonomi Negara yang belum sesuai harapan, tingginya angka pengangguran tersebut mengisyaratkan adanya permasalahan *mis-match* antara *supply and demand*, baik yang berkaitan dengan kualitas maupun relevansi bidang keahlian antara tenaga kerja yang diluluskan SMK dengan kebutuhan dunia usaha/industri.

## **B. Standar dan Peraturan**

Panduan pemenuhan standar proses ini dirumuskan berdasarkan kondisi ideal mengenai proses pembelajaran di SMK, baik yang didasarkan pada Permendikbud

Nomor 22 tahun 2016, tentang Standar Proses, filosofi pendidikan kejuruan sebagaimana dikemukakan dalam teorema Prosser, maupun visi pengembangan SMK ke depan yang dituangkan dalam kebijakan Revitalisasi SMK. Selain itu, untuk merumuskan strategi pemenuhan standar proses juga dideskripsikan kondisi faktual tentang proses penyelenggaraan pembelajaran di SMK yang didasarkan pada hasil evaluasi tata kelola dan mutu pembelajaran, dan hasil-hasil penelitian lain yang relevan.

## 1. Kajian Yuridis

Dalam Permendikbud nomor 22 tahun 2016, dinyatakan bahwa Standar Proses adalah kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan untuk mencapai Standar Kompetensi Lulusan. Standar Proses dikembangkan mengacu pada Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi, yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan.

Karakteristik pembelajaran pada setiap satuan pendidikan terkait erat dengan Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi. Standar Kompetensi Lulusan (SKL) memberikan kerangka konseptual tentang sasaran pembelajaran yang harus dicapai, sedangkan Standar Isi (SI) memberikan kerangka konseptual tentang kegiatan belajar dan pembelajaran yang diturunkan dari tingkat kompetensi dan ruang lingkup materi.

Sesuai dengan SKL, sasaran pembelajaran sesuai kurikulum 2013 mencakup pengembangan ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dielaborasi untuk setiap satuan pendidikan. Ketiga ranah kompetensi tersebut memiliki lintasan perolehan (proses psikologis) yang berbeda. Sikap diperoleh melalui aktivitas “menerima, menjalankan, menghargai, menghayati, dan mengamalkan”. Pengetahuan diperoleh melalui aktivitas “mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, mencipta”. Keterampilan diperoleh melalui aktivitas “mengamati, menanya, mencoba, menalar, menyaji, dan mencipta”.

Karakteristik kompetensi beserta perbedaan lintasan perolehan tersebut akan sangat berpengaruh terhadap karakteristik proses pembelajaran di sekolah. Pada pembelajaran teori (pembelajaran untuk mengembangkan kompetensi aspek pengetahuan) dianjurkan menerapkan pendekatan ilmiah (*scientific approach*), dan pembelajaran berbasis penyingkapan/penelitian (*discovery/ inquiry learning*). Sementara itu, untuk mengembangkan kemampuan kerja peserta didik, dan kemampuan dalam menghasilkan karya, baik individual maupun kelompok, maka sangat dianjurkan menggunakan pendekatan pembelajaran berbasis kerja (*workbased learning*), dan pembelajaran yang menghasilkan karya berbasis pemecahan masalah (*project based learning*).

Selain itu, secara umum proses pembelajaran pada satuan pendidikan juga harus diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang

yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Untuk itu, setiap pendidik harus melakukan perencanaan pembelajaran yang sistematis, dan melaksanakan proses pembelajaran serta penilaian pembelajaran secara konsisten sesuai rancangan pembelajaran yang telah disusun, guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas ketercapaian kompetensi lulusan.

Sesuai dengan Standar Kompetensi Lulusan, dan Standar Isi yang telah ditetapkan, maka secara umum pembelajaran dalam implementasi Kurikulum 2013 harus menerapkan prinsip-prinsip pembelajaran sebagai berikut :

- a. dari peserta didik diberi tahu menuju peserta didik didorong untuk mencari tahu;
- b. dari guru sebagai satu-satunya sumber belajar menjadi belajar berbasis aneka sumber belajar;
- c. dari pendekatan tekstual menuju proses sebagai penguatan penggunaan pendekatan ilmiah;
- d. dari pembelajaran berbasis konten menuju pembelajaran berbasis kompetensi;
- e. dari pembelajaran parsial menuju pembelajaran terpadu;
- f. dari pembelajaran yang menekankan jawaban tunggal menuju pembelajaran dengan jawaban yang kebenarannya multi dimensi;
- g. dari pembelajaran verbalisme menuju keterampilan aplikatif;
- h. peningkatan dan keseimbangan antara keterampilan fisikal (*hardskills*) dan keterampilan mental (*softskills*);
- i. pembelajaran yang mengutamakan pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik sebagai pembelajar sepanjang hayat;
- j. pembelajaran yang menerapkan nilai-nilai dengan memberi keteladanan (*ing ngarso sung tulodo*), membangun kemauan (*ing madyo mangun karso*), dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran (*tut wuri handayani*);
- k. pembelajaran yang berlangsung di rumah di sekolah, dan di masyarakat;
- l. pembelajaran yang menerapkan prinsip bahwa siapa saja adalah guru, siapa saja adalah peserta didik, dan di mana saja adalah kelas;
- m. pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran; dan
- n. pengakuan atas perbedaan individual dan latar belakang budaya peserta didik.

Berdasarkan uraian mengenai prinsip-prinsip pembelajaran di atas, dapat dirangkum bahwa proses pembelajaran yang berkualitas sejauh mungkin harus dapat memenuhi prinsip-prinsip umum pembelajaran tersebut di atas. Secara ringkas, kriteria proses pembelajaran yang berkualitas adalah pembelajaran yang: (1) mengaktifkan siswa, (2) menggunakan berbagai sumber belajar,

(3) menggunakan pendekatan ilmiah atau pendekatan lain yang relevan, (4) pembelajaran berbasis kompetensi; (5) pembelajaran terpadu, (6) pembelajaran *open ended*, yang menekankan jawaban yang kebenarannya multi dimensi; (7) mengembangkan keterampilan aplikatif; (8) menyeimbangkan keterampilan fisik (*hard skills*) dan keterampilan mental (*soft skills*); (9) membudayakan dan memberdayakan peserta didik sebagai pembelajar sepanjang hayat; (10) menerapkan nilai-nilai keteladanan; (11) pembelajaran yang memanfaatkan tripusat pendidikan, (12) pembelajaran yang menerapkan prinsip *learning community* (masyarakat belajar); (13) pembelajaran yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran; dan (14) pembelajaran yang mempertimbangkan karakteristik peserta didik.

## 2. Kajian Filosofis

Miller (1986: 3) menyatakan bahwa filosofi pendidikan kejuruan merupakan kerangka konseptual yang akan memberikan arah yang diperlukan untuk memberikan pelayanan pendidikan dan pengajaran, selain juga dipergunakan sebagai kerangka kerja, di mana tujuan, maksud dan kegunaan pendidikan akan dibangun.

Filosofi tentang pendidikan kejuruan sebagaimana disampaikan oleh Charles Prosser dalam *Vocational Education in Democracy* (Camp and Hillison, 1984: 15 - 16), yang terkait dengan proses pembelajaran adalah sebagai berikut:

- a. Pendidikan kejuruan akan efisien apabila disediakan lingkungan yang sesuai dengan kondisi nyata di mana lulusan akan bekerja. Hal ini dapat diartikan bahwa sekolah harus menyediakan atau menciptakan lingkungan belajar yang sesuai dengan kondisi dunia kerja yang sebenarnya.
- b. Latihan kejuruan akan efektif apabila diberikan tugas atau program sesuai dengan apa yang akan dikerjakan lulusan kelak. Demikian pula, fasilitas atau peralatan beserta proses kerja dan operasionalnya juga dibuat sama dengan kondisi kerja nantinya. Hal ini berarti bahwa isi program atau kurikulum pendidikan kejuruan harus relevan dengan kompetensi yang dibutuhkan dunia kerja. Selain itu, SOP proses pelaksanaan pekerjaan dan fasilitas pelatihan yang disediakan juga harus sesuai dengan yang diterapkan di dunia kerja.
- c. Pendidikan kejuruan akan efektif bilamana latihan dan tugas-tugas yang diberikan berkaitan untuk mengerjakan benda kerja yang sesungguhnya, bukan sekedar tiruan. Hal ini dapat diartikan bahwa latihan dan tugas-tugas yang diberikan berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang sebenarnya, dan bukan simulatif.
- d. Pendidikan kejuruan akan efektif, bilamana dalam latihan kerja atau dalam pengerjaan tugas-tugas sudah dibiasakan seperti pada kondisi yang sebenarnya. Ini dapat dimaknai bahwa latihan kerja atau tugas-tugas yang diberikan harus dikondisikan atau dibiasakan seperti yang berlaku di dunia

kerja.

- e. Latihan kejuruan akan efektif apabila diberikan secara berulang, hingga diperoleh penguasaan yang memadai bagi peserta didik. Hal ini dapat dimaknai bahwa pelatihan keterampilan kejuruan harus dilakukan secara berulang. Makin sering dilatihkan akan makin baik keterampilannya.
- f. Pendidikan kejuruan akan efektif apabila para guru dan instrukturinya berpengalaman dan mampu mentransferkan pengalamannya tersebut kepada peserta didik. Hal ini dapat diartikan bahwa pembelajaran kejuruan harus dilakukan oleh guru yang profesional dan berpengalaman, serta mampu mentransfer pengetahuan, sikap, dan keterampilan secara baik.
- g. Pendidikan kejuruan akan efektif apabila program pendidikan kejuruan dirumuskan berdasarkan kondisi nyata pekerjaan di lapangan. Hal ini dapat diartikan bahwa isi program atau kurikulum pendidikan kejuruan harus selalu disinkronkan dengan kondisi dunia kerja yang terus berkembang.
- h. Pendidikan kejuruan akan efektif apabila memberikan program tertentu yang mendasar sebagai dasar-dasar kejuruannya serta program lain sebagai pengembangan. Hal ini berarti bahwa pendidikan kejuruan terutama harus membekalkan keahlian dasar kejuruan, sehingga lulusan akan lebih mudah beradaptasi dengan kompetensi baru sejalan dengan tuntutan kompetensi yang dibutuhkan dunia kerja.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa proses pembelajaran kejuruan di SMK akan berjalan dengan baik (efektif dan efisien), apabila mampu memenuhi karakteristik dasar tersebut di atas. Selanjutnya, dari beberapa teorema tersebut mencerminkan prinsip-prinsip pembelajaran kejuruan yang ideal, baik yang menyangkut isi/materi pembelajaran dan pelatihan kejuruan, penyiapan lingkungan pembelajaran, serta penyiapan sarana dan prasarana yang menunjang, ketersediaan guru dan instruktur yang kompeten, pemberian tugas-tugas pelatihan, proses pelatihan, maupun kegiatan pembiasaan.

### 3. Kebijakan Revitalisasi SMK

Revitalisasi pendidikan di SMK merupakan gambaran visi (kondisi ideal) mengenai proses penyelenggaraan pendidikan di SMK, yang harus dijadikan acuan semua pihak dan arah pengembangan SMK ke depan (Tim Revitalisasi Pendidikan Vokasi Kemendikbud, 2016).. Revitalisasi pendidikan di SMK terutama menyangkut perubahan filosofi dari *supply-driven* ke arah *demand-driven*. Dalam hal ini, pendidikan kejuruan diarahkan pada penerapan sistem ganda (*dual-system*), yakni belajar teori di SMK dan praktik di industri. Oleh karena itu, desain kurikulum, proses pembelajaran, dan sistem pengujiannya juga harus disesuaikan dengan kompetensi yang dibutuhkan dunia usaha dan industri.

Revitalisasi pendidikan di SMK secara operasional diwujudkan dalam perubahan dan perbaikan pada berbagai aspek pendidikan, yaitu: (1) perubahan

paradigma pendidikan kejuruan, (2) peningkatan mutu pembelajaran, dengan menerapkan pembelajaran abad XXI, Pergeseran Pembelajaran dari Kompetensi ke Kapabilitas, (3) peningkatan kerjasama dengan DU/DI, (4) penanaman jiwa kewirausahaan, (5) adaptasi dan kontekstualisasi lokal, (6) pelibatan dan pemanfaatan DU/DI sebagai: tempat praktik kerja (PKL), tempat magang kerja, dan tempat belajar manajemen dunia kerja, (7) penyelarasan kurikulum SMK, sesuai dengan model *dual system* yang diterapkan, baik dalam penetapan kegiatan praktik kerja maupun pembelajaran melalui *teaching factory*, dan (8) sertifikasi kompetensi bagi lulusan SMK.

Sementara itu, konsep revitalisasi SMK yang terkait secara langsung dengan peningkatan mutu proses pembelajaran, dapat dijelaskan pada uraian berikut.

#### **a. Perubahan Paradigma Pendidikan Kejuruan**

Barnet Berry (2013), dalam monografinya yang berjudul *The Teachers of 2030: Creating a Student-Centered Profession for the 21st Century*, telah menggambarkan perubahan yang dramatik peran pendidik dalam praksis pendidikan abad ini. Cara pandang bahwa misi pendidikan adalah menyiapkan peserta didik untuk memasuki profesi tertentu pada jenis peran sosial yang sudah terstruktur di masyarakat sudah harus mulai ditinggalkan. Tugas pendidikan ke depan justru akan berbalik menjadi untuk memenuhi kebutuhan pengembangan diri peserta didik dalam menciptakan profesinya (Berry, 2013). Perubahan cara pandang tentang pendidikan dan peran pendidik tersebut, sudah barang tentu akan berimplikasi pada perubahan praksis pendidikan kita, terutama yang berkaitan dengan kurikulum dan perlunya inovasi pembelajaran kejuruan.

Demikian pula, perubahan orientasi pendidikan kejuruan dari pembentukan kompetensi ke arah pengembangan kapabilitas akan menjadi tantangan perlunya penyesuaian kurikulum dan inovasi terhadap pembelajaran yang biasa diterapkan selama ini. Orang yang kapabel adalah mereka yang tahu bagaimana belajar, kreatif, memiliki tingkat *self-efficacy* yang tinggi, dapat menerapkan kompetensi baik dalam situasi baru (*novelty*) maupun situasi yang familier, dan mampu bekerja sama dengan orang lain. Dibandingkan dengan kompetensi, yang melibatkan akuisisi pengetahuan dan keterampilan, kapabilitas adalah atribut holistik. Orang yang kapabel lebih mungkin dapat menangani persoalan secara efektif dalam lingkungan dan kondisi yang selalu berubah, karena mereka memiliki kapasitas “serba bisa”.

Perluasan dari model kompetensi ke model pengembangan kapabilitas ini merupakan perubahan mendasar dalam orientasi dan fokus pendidikan kejuruan saat ini, yang akan berimplikasi pada pergeseran dari paradigma “pengajaran” ke paradigma “belajar”, atau dari orientasi “*job*” diperluas ke orientasi “kehidupan”, yang memberi peluang tumbuhnya kemandirian. Demikian pula, pendekatan pembelajaran kejuruan yang berorientasi pada *expert-centered learning* dan *work-based learning*, bergerak atau

memperluas orientasi belajarnya ke *life-based learning* (Staron, 2006). Model pendidikannya juga akan mengalami perluasan dari model pelatihan (*training model*) dan model pengembangan profesional (*professional development model*) ke arah model pengembangan kapabilitas (*capability development model*).

## **b. Peningkatan Mutu Pembelajaran**

Secara operasional, revitalisasi pendidikan kejuruan yang terkait langsung dengan peningkatan kualitas proses pembelajaran kejuruan, dapat dijelaskan sebagai berikut.

### **1) Mengimplementasikan Pembelajaran Abad XXI**

Pembelajaran Abad XXI adalah pembelajaran yang mengarahkan peserta didik untuk menguasai kompetensi, yang meliputi: kecakapan hidup dan berkarier, kecakapan dalam belajar dan berinovasi, serta kecakapan memanfaatkan informasi, media, dan teknologi. Selain itu, juga perlu diterapkan konsep Pendidikan untuk Pembangunan Berkelanjutan/*ESD (Education for Sustainable Development)*, yaitu pendidikan yang berupaya memberikan peserta didik dua jenis kecakapan, yaitu: (1) pengetahuan, kemampuan, dan nilai-nilai untuk menjawab tantangan-tantangan sosial, lingkungan, dan ekonomi pada Abad XXI, serta (2) kecakapan untuk membantu merawat dan memulihkan kualitas lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan hidup manusia serta keadilan sosial.

### **2) Peningkatan Kerja Sama dengan DU/DI**

Pendidikan kejuruan yang baik adalah pendidikan kejuruan yang dapat menghasilkan lulusan yang sesuai dengan kebutuhan DU/DI. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, proses pembelajaran haruslah sesuai dan selaras dengan DU/DI. Kehadiran DU/DI bukan hanya sebagai tempat bagi peserta didik untuk melakukan praktik magang. Namun, pelibatan DU/DI harus merefleksikan implementasi dari keahlian ganda DU/DI dengan sekolah agar tujuan pendidikan bisa tercapai.

Proses pelibatan DU/DI ini terutama diarahkan untuk meningkatkan mutu pembelajaran kejuruan, yang meliputi: (1) pengembangan kurikulum, sehingga kurikulum menjadi lebih relevan dengan kebutuhan; (2) memanfaatkan DU/DI untuk memberikan pelatihan bagi guru, sehingga guru dapat terus memutakhirkan pengetahuan dengan mengikuti perkembangan teknologi yang sesuai dengan program kejuruannya; (3) meminta DU/DI untuk mengirimkan tenaga profesionalnya sebagai guru pendamping atau mentor bagi peserta didik; dan (4) melibatkan DU/DI dalam pembiayaan pendidikan, termasuk dilibatkan dalam pembangunan laboratorium, tempat praktik atau pemberian bantuan peralatan praktik kepada sekolah.

### **3) Penanaman Jiwa Kewirausahaan (*Entrepreneurship*)**

Fakta menunjukkan bahwa tidak semua lulusan SMK bisa diterima

pada DU/DI yang terkait dengan program keahliannya. Oleh karena itu, peserta didik diharapkan juga bisa memiliki kemampuan berwirausaha (*entrepreneurship*), sehingga bukan hanya menjadi tenaga kerja yang terampil, tetapi juga mampu menciptakan usaha baru atau menciptakan profesi baru.

Program pendidikan di SMK bertujuan untuk mempersiapkan lulusan yang tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi untuk lebih siap memasuki dunia kerja (Depdiknas, 2009: 5). Lulusan SMK yang tidak memperoleh pekerjaan dan tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, idealnya harus dapat berwirausaha, karena selama belajar di SMK mereka telah dibekali dengan mata pelajaran kemampuan produktif dan mata pelajaran kewirausahaan. Namun kenyataannya, lulusan SMK yang tidak bekerja dan melanjutkan pendidikan cenderung tidak dapat berwirausaha. Artinya bahwa selama ini pembelajaran kewirausahaan di SMK belum efektif menghantarkan lulusannya untuk mampu berwirausaha secara mandiri.

Untuk itu, tantangan yang dihadapi SMK adalah bagaimana meningkatkan mutu pembelajaran Kewirausahaan di sekolah, sehingga peserta didik tidak hanya memperoleh pengetahuan tentang kewirausahaan, tetapi juga memperoleh pengalaman langsung dan keterampilan untuk berwirausaha. Keterampilan berwirausaha juga bisa dibangun dengan melatih peserta didik untuk menjual hasil-hasil karya peserta didik kepada masyarakat atau DU/DI secara langsung, atau disalurkan melalui unit keterampilan (unit produksi dan jasa) di satuan pendidikan yang mendapat bantuan modal dan menjual hasil produksinya. Pengalaman berwirausaha seperti ini yang harus dipupuk dan dipraktikkan selama peserta didik mengikuti proses pembelajaran di sekolah.

#### **4) Pelibatan Dunia Usaha dan Dunia Industri**

Idealnya, pendidikan kejuruan menekankan pada pendidikan yang mampu menyesuaikan dengan: (1) permintaan pasar (*demand driven*); (2) kebersambungan (*link*) antara pengguna lulusan pendidikan dan penyelenggara pendidikan kejuruan; dan (3) kecocokan (*match*) antara kompetensi calon tenaga kerja (*employee*) dengan kebutuhan pengusaha (*employer*). Oleh karena itu, ukuran keberhasilan penyelenggaraan pendidikan kejuruan dapat dilihat dari tingkat mutu dan relevansi, yaitu jumlah penyerapan lulusan dan kesesuaian bidang pekerjaan dengan bidang keahlian yang dipelajari di SMK.

Kerjasama lembaga pendidikan kejuruan dengan DU/DI, dapat diwujudkan tidak sekedar sebagai tempat praktik, dan sebagai tempat magang untuk menambah wawasan tentang dunia kerja kepada peserta didiknya, tetapi juga dapat difungsikan untuk meningkatkan

mutu pembelajaran di SMK dalam hal berikut.

**a) Dunia Usaha dan Industri sebagai Tempat Praktik Peserta Didik**

Banyak satuan pendidikan kejuruan yang tidak memiliki peralatan dan fasilitas praktik yang memadai untuk melaksanakan praktik keahlian, agar lulusan mencapai standar kompetensi yang disyaratkan. Akibatnya, industri harus mengadakan pelatihan tambahan untuk menyiapkan tenaga kerjanya, pihak industri harus mengalokasikan biaya ekstra di luar biaya produksi.

Disparitas yang terjadi antara kemampuan yang dibutuhkan di dunia kerja dan kompetensi lulusan yang dihasilkan oleh satuan pendidikan kejuruan merupakan permasalahan yang tak pernah selesai. Sebenarnya, pihak sekolah maupun pihak industri memiliki keterbatasan masing-masing dalam membentuk dan mendapatkan tenaga kerja yang siap pakai. Pihak sekolah memiliki keterbatasan dalam pembiayaan dan penyediaan fasilitas pelaksanaan praktik, sedangkan pihak DU/DI memiliki keterbatasan sumber daya pendidikan untuk membentuk tenaga kerja yang dibutuhkan. Oleh karena itu, keterlibatan industri sebagai tempat praktik peserta didik menjadi salah satu solusi untuk mengurangi disparitas yang terjadi sehingga mampu menciptakan kemampuan kerja para lulusan SMK yang adaptif dan sesuai dengan dunia kerja.

Kegiatan praktik kerja di dunia kerja, yang dikenal dengan istilah praktik kerja industri (dalam istilah sekarang Praktik Kerja Lapangan atau PKL), memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mendapatkan kompetensi yang tidak didapatkan di sekolah, memperoleh pengetahuan tentang perkembangan yang terjadi di DU/DI, dan wawasan tentang dunia kerja.

**b) Dunia Usaha dan Industri sebagai Tempat Magang Kerja**

Sistem magang (*apprenticeship*) merupakan sistem pendidikan kejuruan yang paling tua dalam sejarah pendidikan kejuruan. Sistem magang merupakan sistem yang cukup efektif untuk mendidik dan menyiapkan seseorang untuk memperdalam dan menguasai keterampilan yang lebih rumit yang tidak mungkin atau tidak pernah dilakukan melalui pendidikan massal di sekolah.

Dalam sistem magang seseorang yang belum ahli (*novices*) belajar dengan orang yang telah ahli (*expert*) dalam bidang kejuruan tertentu. Sistem magang kerja di industri memberikan pengalaman langsung bagi para peserta didik mengenai kegiatan bekerja langsung pada pekerjaan yang sesungguhnya, dengan tujuan untuk menguasai kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan DU/DI, serta memahami budaya kerja, sikap profesional yang diperlukan, budaya mutu, dan pelayanan konsumen.

Industri sebagai tempat magang kerja tidak hanya memberikan

manfaat bagi para peserta didik, tetapi industri juga merasakan kontribusi para peserta didik selama pelaksanaan magang serta industri bisa membentuk para peserta didik untuk menjadi seorang tenaga terampil yang siap bekerja. Tentunya hal ini akan menguntungkan bagi industri untuk memperoleh tenaga kerja yang sudah terlatih sehingga tidak perlu lagi mengadakan pelatihan dalam menyiapkan tenaga kerja yang mereka butuhkan.

### **c) Dunia Usaha dan Industri sebagai Tempat Belajar Manajemen Dunia Kerja**

Selain sebagai tempat magang untuk memahami proses dan budaya kerja, industri juga dimanfaatkan sebagai tempat pembelajaran tentang manajemen dan organisasi produksi. Dalam hal ini, peserta didik di SMK tidak hanya melakukan pengamatan mengenai cara pelaksanaan pekerjaan, peralatan yang digunakan, akan tetapi secara tidak langsung juga belajar tentang mutu dan efisiensi produk. Selain itu, peserta didik juga belajar tentang manajemen dan organisasi industri untuk belajar tentang dunia usaha dan cara pengelolaan usaha sehingga mereka memiliki wawasan dan pengetahuan tentang dunia usaha. Melalui belajar manajemen dan organisasi ini peserta didik juga bisa menambah kapabilitas pada dunia wirausaha. Pengalaman yang diperoleh peserta didik dari DU/DI tersebut diharapkan akan bisa mengembangkan bakat dan potensinya setelah lulus nanti, sehingga mereka tidak hanya bergantung pada dunia kerja, tetapi juga mengembangkan usaha baru sebagai wirausaha mandiri.

### **d) Penyelarasan Kurikulum**

Penyelarasan kurikulum SMK perlu dilakukan secara periodik dengan melibatkan penggunaan lulusan. Penyelarasan adalah mempertemukan antara sisi pasokan (*supply*) dan sisi permintaan (*demand*) yang mencakup beberapa dimensi, yaitu kualitas, kompetensi, kuantitas, lokasi dan waktu.

Salah satu strategi untuk memastikan agar kurikulum SMK dapat selaras dan memenuhi kebutuhan DU/DI adalah model *dual system*. *Dual system* pada pendidikan kejuruan merupakan suatu bentuk penyelenggaraan pendidikan keahlian profesional yang memadukan secara sistematis dan sinkron program pendidikan di sekolah dan program penguasaan keahlian yang diperoleh melalui kegiatan bekerja langsung di dunia kerja, terarah untuk mencapai suatu tingkat keahlian profesional tertentu.

Bila pada pendidikan umum, program pendidikan direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi secara sepihak dan lebih bertumpu kepada kepemimpinan kepala sekolah dan guru, maka pada program *dual system* pendidikan direncanakan, dilaksanakan, dan

dievaluasi bersama secara terpadu antara sekolah dan institusi pasangannya. Secara operasional, fungsi tersebut dilaksanakan bersama antara kepala sekolah, guru, instruktur, dan pihak DU/DI terkait.

Tujuan utama *dual system* adalah untuk menjamin keberlanjutan keterserapan tenaga kerja pada pasar kerja sesuai dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan DU/DI. Secara umum, struktur *dual system* meliputi: (1) kurikulum harus dirancang dengan berorientasi pada penggabungan antara *instruction* dan *construction* sehingga pendekatan utama dalam pembelajaran mengacu pada fase pembelajaran di sekolah dan praktik/pelatihan di DU/DI; dan (2) kegiatan praktik kerja, dilaksanakan menggunakan sistem blok pembelajaran yang dapat disesuaikan dengan tahapan pekerjaan di DU/DI.

#### **e) Penyelenggaraan Teaching Factory (TeFa)**

Mengingat DU/DI sebagai tempat peserta didik untuk magang dayaampungnya lebih kecil dibandingkan dengan jumlah peserta didik yang memerlukan tempat magang, maka dikembangkanlah *teaching factory*. *Teaching factory*, merupakan pabrik atau tempat berproduksi yang sekaligus sebagai tempat peserta didik pendidikan kejuruan melaksanakan praktik peningkatan keterampilan.

*Teaching Factory* adalah sebuah proyek industri yang bertujuan untuk memberikan pengalaman nyata dalam disain, manufaktur, dan realisasi produk. *Teaching Factory* mengembangkan kurikulum yang memiliki keseimbangan antara pengetahuan teori dan analisis dengan manufaktur, perancangan, kegiatan bisnis, dan keterampilan untuk menghasilkan lulusan yang profesional di bidangnya.

Konsepsi dasar *teaching factory* adalah "*Factory to Classroom*" yang bertujuan untuk melakukan transfer lingkungan produksi di DU/DI secara nyata ke dalam ruang praktik. Kehidupan produksi yang nyata sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kompetensi pembelajaran peserta didik yang berbasis kehidupan nyata di dunia kerja.

*Factory* di sini hanyalah istilah dan bukan berarti pabrik secara *hardware*. Namun, bentuknya berupa pembelajaran yang dilakukan langsung di tempat kerja, tidak di dalam kelas, dan praktik yang dilakukan berorientasi pada produksi seperti di dunia kerja yang sebenarnya. Penyelenggaraan model ini memadukan sepenuhnya antara belajar dan bekerja, tidak lagi memisahkan antara pembelajaran teori dan praktik.

Pembelajaran melalui *teaching factory*, pada dasarnya merupakan metode pembelajaran yang mengintegrasikan dua

lingkungan utama dalam setiap kegiatan belajar peserta didik, yakni lingkungan sekolah dan lingkungan dunia kerja. Dalam hal ini, peserta didik tidak hanya melakukan kegiatan belajar di sekolah, tetapi juga melakukan praktik (kompetensi dasar) dan kerja (mengaplikasikan kompetensinya) di dunia kerja dalam jangka waktu yang relatif panjang.

Dengan pembelajaran seperti ini, peserta didik tidak hanya memperoleh pengetahuan teoretis, tetapi juga mampu menerapkan praktik keterampilan berbasis produksi sebagaimana yang selalu diterapkan dalam kegiatan di dunia kerja yang sesungguhnya. Prosedur ini akan membuat peserta didik mampu memperoleh keterampilan, proses dan sikap yang sesuai dengan standar yang berlaku di dunia kerja, sehingga hasil pendidikan di SMK akan sesuai dengan kebutuhan DU/DI.

Konsep pembelajaran berbasis industri berarti bahwa setiap produk praktik yang dihasilkan adalah sesuatu yang berguna dan bernilai ekonomi atau memiliki nilai jual yang dapat diterima oleh pasar.

Sinergi dan interaksi antara sekolah dan DU/DI yang berkesinambungan akan mendorong terjadinya perbaikan secara terus-menerus dalam hal teknologi, kurikulum dan budaya industri sehingga akan berdampak terhadap lulusan yang kompeten dan memiliki kemampuan yang sesuai dengan yang disyaratkan oleh DU/DI, yaitu sadar akan kualitas dan efisiensi sebagaimana yang selalu diterapkan dalam kegiatan di dunia kerja.

## C. Hasil Kajian dan Pembahasan

### 1. Evaluasi Proses Pembelajaran

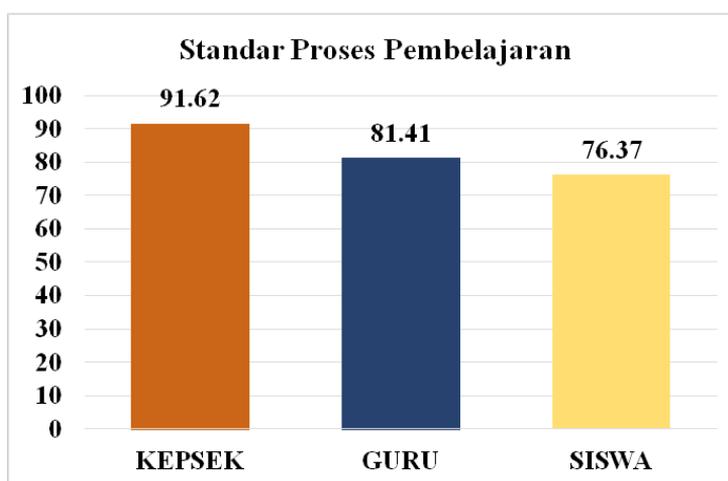
Evaluasi tata kelola SMK yang berkaitan dengan pemenuhan standar proses, diukur berdasarkan respon kepala sekolah, guru, dan siswa SMK serta pihak DU/DI pasangan terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan di dalam angket. Responden dari SMK terdiri atas 13 orang Kepala Sekolah, 26 orang Guru, dan 65 siswa, sedangkan responden dari DU/DI adalah para instruktur atau pembimbing PKL di DU/DI. Pencapaian standar proses pembelajaran dilihat dari rata-rata skor perolehan dari semua responden tersebut, yang disajikan pada Tabel 10 berikut.

**Tabel 10. Deskripsi Hasil Standar Proses Pembelajaran**

Responden	N	Min	Max	Jumlah	Rata-rata	SD
KEPSEK	13	76,79	98,21	1.191,07	91,62	6,62

GURU	26	50	100	2.116,67	81,41	12,76
SISWA	65	57,14	92,86	4.964,27	76,37	7,90

Tabel 10 di atas menunjukkan bahwa secara keseluruhan proses pembelajaran di SMK 3 Tahun telah memenuhi kriteria minimal sebagai proses pembelajaran yang berkualitas, yakni dengan capaian skor sebesar  $\geq 75$ . Rata-rata skor capaian tertinggi adalah yang diperoleh dari penilaian responden Kepala sekolah dan skor capaian terendah diperoleh dari penilaian Siswa. Namun demikian, rata-rata dari skor penilaian siswa mengenai proses pembelajaran sudah mencapai kriteria minimal, yakni sebesar 76,37 atau  $> 75$ . Hal ini dapat diartikan bahwa proses pembelajaran di SMK, baik yang didasarkan pada pendapat Kepala sekolah, Guru maupun Siswa telah memenuhi kriteria minimal. Berikut disajikan pencapaian Standar Proses dalam Pembelajaran dalam bentuk diagram berdasarkan rerata skor setiap responden pada Gambar 11 di bawah ini.



Gambar 18. Pencapaian Standar Proses Pembelajaran

Sementara itu, jika dicermati untuk tiap butir nampak bahwa menurut penilaian guru, keadaan yang masih lemah adalah bahwa pihak sekolah kurang memberikan fasilitasi kepada guru dalam penyusunan RPP sesuai kurikulum yang berlaku, yaitu Kurikulum 2013. Sedangkan hal-hal yang masih lemah dari proses pembelajaran menurut penilaian siswa berkaitan dengan penggunaan sumber belajar di dalam kegiatan pembelajaran. Selain penggunaan sumber belajar yang berupa buku pegangan siswa, sebagian besar guru masih terbatas hanya menggunakan sumber belajar yang berupa buku referensi lain, sedangkan penggunaan perpustakaan, laboratorium, atau internet sebagai sumber belajar masih sangat terbatas. Demikian pula, guru juga belum menggunakan lingkungan alam maupun lingkungan sosial sebagai sumber belajar.

Sementara itu, hasil penelitian Amat Jaedun dkk. (2014) mengenai kesiapan guru SMK Program Keahlian Teknik Bangunan di DIY dalam mengimplementasikan Kurikulum 2013, adalah sebagai berikut.

### a. Kesiapan Guru dalam merencanakan pembelajaran

Kesiapan Guru SMK Program Keahlian Teknik Bangunan di Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menyusun rencana pembelajaran untuk mengimplementasikan Kurikulum 2013 dalam kategori kurang siap. Hal ini didasarkan pada ketersediaan perangkat pembelajaran yang belum tersedia, dan substansi isi serta komponen RPP yang menggambarkan bahwa kemampuan guru dalam menyusun RPP secara lengkap dan benar masih perlu ditingkatkan, terutama dalam merencanakan kegiatan pembelajaran dan penilaian.

Data hasil isian angket terbuka menunjukkan bahwa rendahnya kesiapan guru dalam merencanakan pembelajaran, ditunjukkan oleh: (1) sebagian besar (57,6 %) guru belum pernah mengikuti pelatihan implementasi kurikulum 2013, (2) sebanyak 78,8% guru menyatakan bahwa ketersediaan buku siswa untuk mata pelajaran kejuruan (kelompok C1, C2, dan C3) belum tersedia; (3) sebanyak 93,9% guru menyatakan bahwa ketersediaan buku guru untuk mata pelajaran kejuruan (kelompok C1, C2, dan C3) belum tersedia; (4) sebanyak 66,7% guru menyatakan bahwa contoh instrumen penilaian pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum 2013 belum tersedia; dan (5) meskipun para guru telah menyusun/mengembangkan RPP sesuai format yang telah ditetapkan dalam kurikulum 2013, namun sebagian besar (78,8 %) merasa masih mengalami kesulitan.

### b. Kesiapan guru dalam melaksanakan pembelajaran

Kesiapan Guru SMK Program Keahlian Teknik Bangunan di Daerah Istimewa Yogyakarta dalam melaksanakan pembelajaran dalam rangka mengimplementasikan Kurikulum 2013 dalam kondisi kurang siap. Hal ini ditunjukkan oleh data bahwa: (1) sebagian besar (81,8 %) guru belum memahami mengenai prinsip-prinsip dan penerapan model pembelajaran dengan pendekatan *scientific* atau pendekatan lain yang sesuai dengan Kurikulum 2013; (2) meskipun semua guru telah merumuskan kegiatan pembelajaran dalam kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup, namun realisasi kegiatan-kegiatan tersebut masih belum sesuai dengan yang direncanakan, (3) hampir semua guru belum menerapkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di dalam kegiatan pembelajarannya, karena penggunaan TIK dalam kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh guru baru sebatas menggunakan *power point* ketika menyampaikan materi pembelajaran.

Demikian pula, hasil analisis dokumen RPP yang telah disusun oleh guru menunjukkan bahwa semua guru telah merumuskan kegiatan pembelajaran dalam kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup, namun hanya sebagian kecil (6 %) guru yang telah melakukan apersepsi pada kegiatan pendahuluan (mengaitkan materi pembelajaran yang akan disampaikan dengan pengalaman peserta didik atau materi yang telah dikuasai peserta didik). Demikian pula, dalam kegiatan inti juga banyak guru yang tidak

menerapkan pendekatan saintifik tersebut secara tepat. Hal ini ditunjukkan oleh data sebagai berikut: (a) sebanyak 45 % guru tidak memfasilitasi peserta didik untuk melakukan pengamatan (kegiatan *Mengamati*) secara tepat, (b) hanya 35% guru yang memfasilitasi kegiatan Menanya secara tepat, sedangkan sebanyak 65% mengisi kegiatan Menanya dengan cara guru tersebut yang mengajukan pertanyaan kepada siswanya, (c) hanya 20% guru yang memfasilitasi kegiatan *mengumpulkan Informasi* oleh peserta didik secara tepat, (d) hanya 35% guru yang memfasilitasi kegiatan *Mengasosiasi* (mengolah informasi) secara tepat, dan (e) hanya 30% guru yang memberikan kesempatan kepada siswanya untuk *Mengomunikasikan* hasil kesimpulannya baik secara tertulis ataupun lisan.

## 2. Evaluasi Praktik Kerja Lapangan

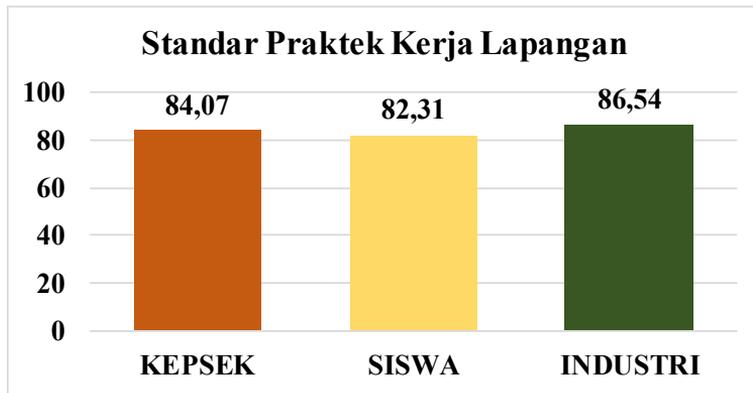
Pencapaian standar proses dalam pelaksanaan kegiatan praktik kerja lapangan dilihat dari rata-rata skor berdasarkan penilaian 13 Kepala sekolah, 65 Siswa, dan 13 industri pasangan SMK, disajikan pada Tabel 11 di bawah ini.

**Tabel 11. Deskripsi Hasil Standar Proses Praktek Kerja Lapangan**

Responden	N	Minimum	Maksimum	Jumlah	Rata-rata	SD
KEPSEK	13	64,29	92,86	1.092,85	84,07	8,20
SISWA	65	25	100	5.350,02	82,31	12,19
INDUSTRI	13	75	100	1.125,00	86,54	9,49

Tabel 11 menunjukkan bahwa secara keseluruhan pencapaian standar proses berkaitan dengan pelaksanaan praktik kerja lapangan (PKL) telah memenuhi kriteria minimal, yakni dengan capaian skor sebesar  $\geq 75$ . Rata-rata skor tertinggi diperoleh dari penilaian pihak Industri, sedangkan skor capaian yang terendah diperoleh berdasarkan penilaian Siswa. Namun demikian, rata-rata skor capaian penilaian Siswa sudah mencapai kriteria minimal, yakni sebesar 82,31. Hal ini dapat diartikan bahwa capaian standar proses yang berkaitan dengan pelaksanaan praktik kerja lapangan baik yang didasarkan pada penilaian kepala sekolah, siswa maupun industri sudah mencapai kriteria kualitas minimal.

Capaian Standar Proses yang berkaitan dengan Praktik Kerja Lapangan (PKL) dalam bentuk diagram berdasarkan pada rerata tiap responden disajikan pada Gambar 19 di bawah ini.



Gambar 19. Pencapaian Standar Proses Praktek Kerja Lapangan

Sementara itu, jika dicermati meskipun proses pelaksanaan PKL (dulu Prakerin) sudah berjalan baik, namun masih ada aspek yang masih lemah. Menurut penilaian Kepala Sekolah, aspek yang masih kurang baik dari proses pelaksanaan PKL adalah dalam aspek frekuensi monitoring dan pembimbingan siswa yang sedang menjalankan PKL. Dalam hal ini, frekuensi pembimbing PKL dalam melakukan monitoring dan pembimbingan terhadap siswa yang sedang melaksanakan PKL hanya dilakukan setiap bulan. Sedangkan menurut penilaian siswa, aspek pelaksanaan PKL yang masih lemah terletak pada durasi (lama) waktu pelaksanaan PKL yang hanya berkisar antara 2 - 3 bulan.

Sementara itu, hasil penelitian Dwi Sapitri Iriani dan Soeharto (2013) tentang evaluasi pelaksanaan praktik kerja industri siswa kompetensi keahlian jasa boga SMK Negeri 3 Purworejo, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: (1) Secara keseluruhan pelaksanaan Prakerin dalam komponen konteks yang ditinjau dari: tujuan program Prakerin, kerjasama DU/DI dengan sekolah, dan kesesuaian pelaksanaan Prakerin dengan kurikulum, telah dilaksanakan sesuai dengan panduan tujuan program Prakerin di SMK Negeri 3 Purworejo; (2) Secara keseluruhan pelaksanaan Prakerin dalam komponen input telah dilaksanakan sesuai dengan panduan program Prakerin; dan (3) Secara keseluruhan pelaksanaan Prakerin dalam komponen proses telah dilaksanakan sesuai dengan panduan pelaksanaan program Prakerin; (4) Secara keseluruhan pelaksanaan Prakerin dalam komponen produk telah dilaksanakan dan sesuai dengan tujuan program Prakerin; (5) Sekolah, dalam hal ini pokja Prakerin, telah melaksanakan tahapan kegiatan Prakerin dengan baik, yang dimulai dari tahap persiapan, pembekalan peserta Prakerin, proses pelaksanaan, monitoring dan evaluasi hingga penarikan kembali siswa oleh pihak sekolah; (6) Kurikulum implementatif, sebagai kurikulum sinkronisasi yang disusun oleh pihak DU/DI dan pihak sekolah benar-benar telah diterapkan pada kegiatan Prakerin siswa sehingga pelaksanaan Prakerin berjalan lancar, efisien dan efektif; dan (7) pihak sekolah selalu menjalin komunikasi yang baik dengan pihak DU/DI, sehingga sangat membantu pelaksanaan kegiatan Prakerin siswa di DU/DI.

Demikian pula, hasil penelitian Firmansyah Aditya (2013), tentang

pelaksanaan praktek kerja industri di SMKN 4 Surabaya dapat disimpulkan bahwa: tahapan proses pelaksanaan praktik kerja industri (Prakerin) yang dilakukan oleh sekolah dan guru masih belum sesuai dengan prosedur yang ada. Hal ini didasarkan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa: (1) tahapan pelaksanaan Prakerin (PKL) belum sesuai yang direncanakan, karena menyesuaikan dengan kurikulum dan kondisi di lapangan, (2) proses pelaksanaan praktek kerja industri (PKL) yang dilakukan siswa sudah cukup baik, dan dilaksanakan oleh siswa sesuai prosedur yang ada, (3) meskipun di beberapa tempat prakerin siswa diberikan tugas yang kurang sesuai dengan keahliannya, namun sekolah dan siswa masih menyikapi positif terhadap hal seperti itu karena prakerin ini juga ditujukan untuk memperoleh pengalaman lapangan pekerjaan sebelum peserta didik lulus dari SMK.

Berdasarkan ketiga hasil penelitian evaluasi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kualitas pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (dulu disebut Prakerin) di SMK selama ini berlangsung dengan kualitas yang cukup variatif. Hal ini sangat tergantung pada kesiapan SMK dalam menyelenggarakan PKL, baik pada tahap koordinasi dengan DU/DI pasangan, pembekalan peserta PKL, pembimbingan, maupun monitoring dan evaluasinya.

### 3. Pembelajaran Melalui Teaching Factory

Penerapan *teaching factory* di SMK merupakan wujud dari salah satu upaya Direktorat Pembinaan SMK untuk lebih mempererat kerjasama atau sinergi antara SMK dengan DU/DI. Menurut Kuswantoro (2014), *teaching factory* merupakan implementasi konsep pembelajaran dalam kondisi dunia kerja yang sesungguhnya, yaitu untuk menjembatani kesenjangan antara kompetensi yang diberikan sekolah dengan kompetensi yang dibutuhkan oleh DU/DI.

Pembelajaran melalui *teaching factory* bertujuan untuk menumbuhkembangkan karakter dan etos kerja (disiplin, tanggung jawab, jujur, kerjasama, kepemimpinan, dan lain-lain) yang dibutuhkan DU/DI serta meningkatkan kualitas hasil pembelajaran dari sekedar membekali kompetensi (*competency based training*) menuju ke pembelajaran yang membekali kemampuan memproduksi barang/jasa (*production based training*).

Hasil penelitian Vindy Nilayanti Iriani (2012), tentang Evaluasi Pelaksanaan *Teaching Factory* di Sekolah Menengah Kejuruan Kota Yogyakarta menyimpulkan bahwa:

- a. Kesesuaian *teaching factory* di Sekolah Menengah Kejuruan Kota Yogyakarta ditinjau dari aspek *context* menurut penilaian guru termasuk dalam kategori sangat sesuai, dengan nilai pencapaian kualitas sebesar 85,5% sedangkan menurut responden siswa termasuk dalam kategori sesuai dengan nilai pencapaian kualitas sebesar 68,57%. Adapun aspek yang masih perlu ditingkatkan adalah mengenai kesesuaian pelaksanaan *teaching factory* dengan tuntutan dan kondisi dunia kerja, dan kesesuaian pelaksanaan *teaching factory* dengan fasilitas yang disediakan oleh Sekolah Menengah Kejuruan.

- b. Kesesuaian *teaching factory* di Sekolah Menengah Kejuruan kota Yogyakarta ditinjau dari aspek *input* menurut responden guru termasuk dalam kategori sangat sesuai dengan nilai pencapaian kualitas sebesar 77,87% sedangkan berdasarkan responden siswa termasuk dalam kategori sesuai dengan nilai pencapaian kualitas sebesar 68,13%. Adapun aspek yang masih perlu dibenahi adalah kesesuaian pelaksanaan *teaching factory* dengan alokasi waktu, dan kesesuaian sarana ruang produksi dengan peralatan yang tersedia.
- c. Kesesuaian *teaching factory* di Sekolah Menengah Kejuruan kota Yogyakarta ditinjau dari aspek *process* menurut responden guru termasuk dalam kategori sangat sesuai dengan nilai pencapaian kualitas sebesar 79,71% sedangkan berdasarkan responden siswa termasuk kategori sesuai dengan nilai pencapaian kualitas sebesar 65,71%. Dalam hal ini, aspek yang masih perlu dibenahi adalah berkaitan dengan kesesuaian pengaturan waktu *teaching factory* (durasi waktu), pengaturan waktu guru, dan kesesuaian kegiatan *Quality Control* (QC) dengan Standar Operasional Prosedur (SOP).
- d. Kesesuaian *teaching factory* di Sekolah Menengah Kejuruan kota Yogyakarta ditinjau dari aspek *product* menurut penilaian guru termasuk dalam kategori sangat sesuai dengan nilai pencapaian kualitas sebesar 80,88% sedangkan berdasarkan penilaian siswa termasuk dalam kategori sesuai dengan nilai pencapaian kualitas sebesar 66,01%. Aspek yang masih perlu dibenahi adalah berkaitan dengan performansi produk hasil *teaching factory* dalam uji *Quality Control* (QC).
- e. Secara keseluruhan, kesesuaian pelaksanaan *teaching factory* di Sekolah Menengah Kejuruan kota Yogyakarta ditinjau dari aspek *context*, *input*, *process* dan *product* dengan responden guru termasuk dalam kategori sangat sesuai dengan nilai pencapaian kualitas sebesar 80,33%, sedangkan berdasarkan responden siswa dalam kategori sesuai dengan nilai pencapaian kualitas sebesar 66,6%.

Demikian pula, hasil evaluasi pelaksanaan *teaching factory* oleh SMK di Kota Surakarta yang dilakukan oleh Nuryake Fajarwati (2012), menyimpulkan bahwa dari segi kegiatan pembelajaran pelaksanaan *teaching factory* berjalan dengan baik, sedangkan untuk proses produksi berjalan dengan kurang baik. Adapun hambatan-hambatan yang ditemui dan hal-hal yang perlu diperbaiki dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran melalui *teaching factory* adalah dalam hal sosialisasi pelaksanaan *teaching factory* dan evaluasi serta perbaikan hasil pembelajaran *teaching factory*.

Sementara itu, hal-hal yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan dalam kegiatan pembelajaran melalui *teaching factory* adalah bahwa proses pembelajaran keterampilan harus disesuaikan dengan standar kerja yang berlaku di dunia kerja, setting pembelajaran lebih disesuaikan dengan situasi kerja, pembelajaran lebih diorientasikan pada kegiatan *problem solving*, pembelajaran lebih diarahkan pada *student active learning*, pembelajaran lebih ditekankan pada pencapaian

kompetensi, perlunya pengembangan *soft skill* dalam kegiatan pembelajaran, menumbuhkan kemauan untuk belajar terus-menerus, pengembangan pola pembelajaran berbasis bisnis, pengorganisasian siswa yang terlibat dalam *teaching factory*, dan pemberian bimbingan kepada siswa dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran *teaching factory*. Sedangkan pada proses produksi, hal yang harus ditingkatkan adalah kegiatan perencanaan, produksi, dan purna jual, serta *partnership*.

Berdasarkan kedua hasil evaluasi tentang penyelenggaraan pembelajaran melalui *teaching factory* di SMK dapat disimpulkan bahwa kualitas pelaksanaan pembelajaran melalui *teaching factory* di SMK selama ini berlangsung dengan kualitas yang cukup variatif. Selain itu, fakta menunjukkan bahwa di sebagian besar SMK *teaching factory* belum dapat terselenggara, sehingga model pembelajaran yang diselenggarakan melalui *teaching factory*, sebagai implementasi *dual system juga* belum dapat terselenggara.

## D. Kesimpulan

Berdasarkan kajian kondisi ideal (kriteria) dan kondisi faktual mengenai proses pembelajaran di SMK, baik proses pembelajaran yang diselenggarakan oleh sekolah, pembelajaran yang dilaksanakan melalui Praktik Kerja Lapangan (PKL) di DU/DI, maupun pembelajaran yang diselenggarakan melalui *teaching factory* di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Kualitas proses pembelajaran yang diselenggarakan di SMK masih cukup variatif, namun secara umum masih belum memenuhi kriteria (standar) proses pembelajaran yang ideal. Secara rinci, aspek yang perlu diperbaiki terkait dengan proses pembelajaran adalah: (1) guru cenderung masih mendominasi pembelajaran, atau pembelajaran yang dilaksanakan kurang mengaktifkan siswa, (2) guru belum menggunakan berbagai sumber belajar, (3) guru belum menerapkan pendekatan ilmiah atau pendekatan lain yang relevan dengan karakteristik kompetensi, (4) guru masih cenderung menekankan kemampuan verbal, dan belum banyak mengembangkan kemampuan aplikatif; (5) guru masih belum menerapkan model pembelajaran yang mengembangkan keterampilan mental (*soft skills*); (6) pembelajaran yang dilakukan belum membudayakan dan memberdayakan peserta didik sebagai pembelajar sepanjang hayat; (7) guru belum mengoptimalkan pembelajaran yang memanfaatkan tripusat pendidikan, (8) guru belum menerapkan model pembelajaran yang membentuk *learning community* (masyarakat belajar); dan (9) guru kurang optimal dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran.
2. Secara umum, kualitas proses pembelajaran yang diselenggarakan melalui Praktik Kerja Lapangan (PKL) di DU/DI pasangan masih cukup variatif, tergantung kesiapan sekolah dalam menyelenggarakan program PKL tersebut. Kegiatan praktik kerja di dunia kerja, yang dikenal dengan istilah praktik kerja industri (dalam istilah sekarang Praktik Kerja Lapangan atau PKL), bertujuan

untuk memberikan kesempatan kepada peserta didik guna memperoleh kompetensi yang tidak didapatkan di sekolah, memperoleh pengetahuan tentang perkembangan yang terjadi di DU/DI, dan wawasan tentang dunia kerja, serta membentuk etos kerja.

Secara rinci, aspek yang perlu diperbaiki terkait dengan proses pembelajaran melalui PKL adalah: (1) belum semua sekolah telah menyusun kurikulum implementatif, yang merupakan sinkronisasi serta pengaturan kegiatan pembelajaran di sekolah dan kegiatan PKL di DU/DI, (2) pihak sekolah belum melakukan sinkronisasi kompetensi (kompetensi apa yang perlu diberikan oleh SMK dan kompetensi apa yang harus diberikan oleh DU/DI), (3) sebagian SMK masih kebingungan mengatur blok waktu pembelajaran di sekolah dan PKL di DU/DI; (4) kerjasama antara SMK dan DU/DI sebagai tempat PKL belum dilakukan dengan prinsip saling menguntungkan, sebagian pihak DU/DI masih memandang bahwa pelaksanaan PKL oleh siswa justru bersifat mengganggu; (5) sebagian DU/DI memberikan tugas yang kurang sesuai dengan keahlian siswa di SMK; (6) pembekalan siswa PKL yang diberikan oleh pihak sekolah belum memadai, sehingga DU/DI banyak direpotkan karena harus memberikan pembekalan tambahan; (7) sebagian SMK, dan peserta PKL, kurang bersungguh-sungguh dalam melaksanakan program PKL, dan terkesan hanya asal jalan.

3. Kualitas proses pembelajaran yang diselenggarakan melalui *teaching factory* masih sangat variatif, namun secara umum belum dapat berjalan sesuai harapan. Hal ini dikarenakan baru sebagian kecil SMK yang telah menyelenggarakan *teaching factory*.

Kendala pelaksanaan pembelajaran melalui *teaching factory* pada umumnya terkait dengan kendala dalam penyelenggaraan *teaching factory* itu sendiri. Sebagian besar SMK belum menyelenggarakan *teaching factory*, yang disebabkan oleh: (a) karakteristik bidang keahlian yang diselenggarakan di SMK kurang *marketable*; (b) kurangnya sumber daya (terutama SDM), yang mampu mengelola *teaching factory* secara baik; (c) beban tugas guru yang cukup berat, sehingga tidak memungkinkan diberikan beban tugas tambahan untuk mengelola *teaching factory*; (d) rumitnya pengelolaan keuangan *teaching factory*, terutama untuk sekolah negeri; (e) kurangnya kemandirian sekolah; dan (f) faktor-faktor lain yang umumnya melekat pada sekolah-sekolah negeri. Hasil-hasil penelitian yang telah dikaji di atas, menyimpulkan bahwa pelaksanaan pembelajaran melalui *teaching factory* pada umumnya telah berjalan dengan baik. Sehingga tujuan pembelajaran melalui *teaching factory* dapat tercapai, yaitu untuk menumbuh-kembangkan karakter dan etos kerja (disiplin, tanggung jawab, jujur, kerjasama, kepemimpinan, dan lain-lain) yang dibutuhkan DU/DI serta meningkatkan kualitas hasil pembelajaran dari sekedar membekali kompetensi (*competency based training*) menuju ke pembelajaran yang membekali kemampuan memproduksi barang/jasa (*production based training*).

## E. Rekomendasi

Sesuai dengan ruang lingkupnya, maka rekomendasi untuk pemenuhan standar proses penyelenggaraan pendidikan di SMK, yaitu:

1. Untuk meningkatkan mutu pembelajaran di Sekolah, dapat dilakukan dengan cara meningkatkan kemampuan guru dalam menyusun rancangan pembelajaran (RPP), melaksanakan pembelajaran, dan melakukan penilaian. Kegiatan yang dapat dilakukan antara lain:
  - a. pelatihan guru dalam merancang dan melaksanakan pembelajaran melalui *in house training* (IHT),
  - b. mengintensifkan supervisi pembelajaran, dengan melibatkan guru senior atau guru serumpun dari MGMP;
  - c. memfasilitasi guru untuk mengembangkan kompetensi profesionalismenya, melalui pelatihan di dunia kerja dan sertifikasi keahlian.
2. Peningkatan mutu pembelajaran melalui PKL:
  - a. sekolah perlu menyusun kurikulum implementatif, yang merupakan sinkronisasi serta pengaturan kegiatan pembelajaran di sekolah dan kegiatan PKL di DU/DI,
  - b. pihak sekolah perlu melakukan sinkronisasi kompetensi dengan DU/DI (kompetensi apa yang perlu diberikan oleh SMK dan kompetensi apa yang harus diberikan oleh DU/DI),
  - c. sekolah perlu melakukan pembekalan siswa PKL dengan lebih baik, dan merumuskan panduan PKL yang lebih komprehensif.
  - d. Sekolah perlu meningkatkan frekuensi dan kualitas pembimbingan siswa PKL
3. Peningkatan mutu pembelajaran melalui *teaching factory*, yang dilakukan dengan cara: (a) merintis pendirian *teaching factory*, bagi sekolah yang belum memiliki *teaching factory*, dan (b) mengintensifkan pembelajaran melalui kegiatan *teaching factory*, bagi SMK yang telah memiliki *teaching factory*.
4. Meningkatkan pelibatan DU/DI, baik dalam pengembangan kurikulum, memberikan pelatihan kepada guru dan tenaga kependidikan, mengirim tenaga profesionalnya sebagai guru pendamping atau mentor bagi peserta didik, dan pelibatan DU/DI dalam pembiayaan pendidikan serta pengembangan fasilitas pembelajaran;
5. Meningkatkan kualitas pembelajaran kewirausahaan, untuk membekali lulusan dengan kemampuan berwirausaha (*entrepreneurship*), yang mampu menciptakan usaha baru atau menciptakan profesi baru;
6. menjalin kerjasama, dan memanfaatkan DU/DI sebagai tempat praktik peserta didik, tempat magang kerja, dan tempat belajar manajemen DU/DI;
7. Secara bertahap mengarahkan pendidikan dengan menerapkan konsep Pendidikan Sistem Ganda (*dual system*), penyelarasan kurikulum SMK sesuai dengan *dual system* yang diterapkan, baik dalam penetapan kegiatan praktik kerja maupun pembelajaran melalui *teaching factory*.

# STANDAR PENILAIAN

## A. Pendahuluan

Dalam rangka menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), Pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Kualifikasi pada KKNI terdiri dari 9 level. Setiap level mengisyaratkan pengakuan kompetensi seseorang yang dapat ditempuh melalui jalur pendidikan formal, pendidikan nonformal, pendidikan informal, dan pengalaman kerja (workplace). KKNI selanjutnya menjadi rujukan dalam penyusunan standar nasional pendidikan (SNP). Salah satu diantaranya adalah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Permendikbud RI) Nomor 23 Tahun 2016 tentang standar penilaian. Standar penilaian pendidikan merupakan kriteria mengenai lingkup, tujuan, manfaat, prinsip, mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar

- 
- Excellent
  - Good
  - Satisfactory
  - Poor

peserta didik yang digunakan sebagai dasar dalam penilaian hasil belajar peserta didik pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Namun demikian, Permendikbud tersebut belum mencantumkan standar penilaian bagi Pendidikan Menengah Kejuruan (PMK) yang merupakan pendidikan yang spesifik menyiapkan lulusannya untuk siap kerja.

Pasal 1 Permendikbud Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian dijelaskan beberapa definisi sebagai berikut. Standar Penilaian Pendidikan adalah kriteria mengenai lingkup, tujuan, manfaat, prinsip, mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik yang digunakan sebagai dasar dalam penilaian hasil belajar peserta didik pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah.

Selanjutnya yang dimaksud dengan penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. Sementara itu yang dimaksud dengan ulangan adalah proses yang dilakukan untuk mengukur pencapaian Kompetensi Peserta Didik secara berkelanjutan dalam proses pembelajaran untuk memantau kemajuan dan perbaikan hasil belajar Peserta Didik. Ujian sekolah/madrasah adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik sebagai pengakuan prestasi belajar dan/atau penyelesaian dari suatu satuan pendidikan. Selain itu, yang dimaksud dengan Kriteria Ketuntasan Minimal yang selanjutnya disebut KKM adalah kriteria ketuntasan belajar yang ditentukan oleh satuan pendidikan yang mengacu pada standar kompetensi kelulusan, dengan mempertimbangkan karakteristik peserta didik, karakteristik mata pelajaran, dan kondisi satuan pendidikan.

## **B. Standar dan Peraturan**

Standar Penilaian Pendidikan adalah kriteria mengenai lingkup, tujuan, manfaat, prinsip, mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik yang digunakan sebagai dasar dalam penilaian hasil belajar peserta didik pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Tujuan standar penilaian dirumuskan agar dapat digunakan sebagai acuan bagi pendidik, satuan pendidikan, pemerintah, LSP, dan DUDI dalam melakukan penilaian terhadap proses dan hasil belajar peserta didik PMK. Sementara itu manfaat standar penilaian di SMK adalah sebagai berikut.

1. Pendidik, sebagai acuan untuk memantau dan mengevaluasi proses, kemajuan belajar, dan perbaikan hasil belajar peserta didik PMK secara berkesinambungan berdasarkan standar yang berlaku,
2. Satuan pendidikan, sebagai acuan untuk menilai pencapaian kompetensi peserta didik pada semua mata pelajaran,
3. Pemerintah, sebagai acuan untuk menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu,
4. Satuan pendidikan yang terakreditasi dan LSP, sebagai acuan untuk memberikan pengakuan kompetensi dan pemberian sertifikat kompetensi kepada peserta didik PMK,
5. DUDI, sebagai acuan untuk menilai pencapaian kompetensi dan memberikan sertifikat setelah peserta didik PMK melaksanakan Praktik Kerja Lapangan

(PKL).

Menurut Permendikbud Nomor 23 Tahun 2016 dan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2017 tentang Standar Penilaian, Penilaian hasil belajar peserta didik pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah meliputi aspek (a) sikap, (b) pengetahuan, dan (c) keterampilan. Penilaian sikap merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pendidik untuk memperoleh informasi deskriptif mengenai perilaku peserta didik. Penilaian pengetahuan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengukur penguasaan pengetahuan peserta didik. Penilaian keterampilan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengukur kemampuan peserta didik menerapkan pengetahuan dalam melakukan tugas tertentu.

Penilaian aspek sikap dilakukan melalui tahapan: (a) mengamati perilaku peserta didik selama pembelajaran, (b) mencatat perilaku peserta didik dengan menggunakan lembar observasi/pengamatan, (c) menindaklanjuti hasil pengamatan, dan (d) mendeskripsikan perilaku peserta didik. Penilaian aspek pengetahuan dilakukan melalui tahapan: (a) menyusun perencanaan penilaian, (b) mengembangkan instrumen penilaian, melaksanakan penilaian, (d) memanfaatkan hasil penilaian, dan melaporkan hasil penilaian dalam bentuk angka dengan skala 0-100 dan deskripsi. Penilaian aspek keterampilan dilakukan melalui tahapan: (a) menyusun perencanaan penilaian, (b) mengembangkan instrumen penilaian, (c) melaksanakan penilaian, (d) memanfaatkan hasil penilaian, dan melaporkan hasil penilaian dalam bentuk angka dengan skala 0-100 dan deskripsi.

Permendikbud Nomor 3 Tahun 2017 tentang Standar Penilaian, penilaian hasil belajar peserta didik pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah terdiri atas: (a) penilaian hasil belajar oleh pendidik, (b) penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan; dan, (c) penilaian hasil belajar oleh Pemerintah.

## **1. Penilaian Oleh Pendidik**

Penilaian hasil belajar oleh pendidik dilakukan secara berkesinambungan untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil dalam bentuk ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, dan ulangan kenaikan kelas. Penilaian ini digunakan untuk: (a) menilai pencapaian kompetensi peserta didik; (b) bahan penyusunan laporan kemajuan hasil belajar; dan (c) memperbaiki proses pembelajaran.

Penilaian yang dilakukan oleh pendidik harus berbasis kompetensi, yakni terencana, terpadu, menyeluruh, dan berkesinambungan. Dengan penilaian ini diharapkan pendidik mampu mengetahui kompetensi yang telah dicapai siswa, meningkatkan motivasi belajar siswa, mampu menghantarkan siswa mencapai kompetensi yang telah ditentukan, mampu memberikan semangat pada guru untuk mengajar dan mendidik lebih baik, serta mampu meningkatkan akuntabilitas sekolah.

Menurut sifatnya, penilaian dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu: (1) penilaian kelas, dan (2) penilaian berkala. Hal ini senada dengan ayat 1 pasal 3 Kep Mendiknas Nomor 012/U/2002 tanggal 28 Januari 2002 yang menjelaskan bahwa jenis penilaian di sekolah terdiri atas Penilaian Kelas dan Ujian.

Penilaian kelas adalah penilaian yang dilaksanakan secara terpadu dengan kegiatan pendidikan dan pelatihan. Saat ini, penilaian kelas banyak digunakan orang karena mampu meningkatkan standar mengajar, belajar yang lebih bergairah, dan akuntabilitas publik yang lebih terpercaya (Hargreaves dan Earl, 2002). Lebih jauh Hargreaves dan Earl menjelaskan bahwa penilaian kelas dilakukan dengan cara mengumpulkan hasil kerja siswa (portofolio), hasil karya (produk), penugasan (proyek), kinerja (*performance*), kuis, pertanyaan lisan di kelas, dan tes tertulis (*paper and pencil test*). Hal ini juga terlihat dalam ayat 3 pasal 3 Kep Mendiknas Nomor 012/U/2002 tanggal 28 Januari 2002. Penilaian alternatif seperti ini sering mampu memotivasi siswa untuk lebih bertanggung jawab terhadap belajar mereka, membuat penilaian yang integrated dan merupakan bagian dari pengalaman belajar, dan memadukan penilaian itu dalam kegiatan nyata sehingga mampu menstimulasi kemampuan siswa untuk berkreasi dan menerapkan pengetahuannya dari pada sekedar menghafal.

## **2. Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan**

Permendikbud Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian menjelaskan bahwa penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan bertujuan untuk menilai pencapaian standar kompetensi lulusan untuk semua mata pelajaran. Penilaian hasil belajar untuk semua mata pelajaran pada kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian, kelompok mata pelajaran estetika, dan kelompok mata pelajaran jasmani, olah raga, dan kesehatan merupakan penilaian akhir untuk menentukan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan. Dalam hal ini, penilaian akhir harus mempertimbangkan hasil penilaian peserta didik oleh pendidik.

Penilaian hasil belajar untuk semua mata pelajaran pada kelompok ilmu pengetahuan dan teknologi dilakukan melalui ujian sekolah/madrasah untuk menentukan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan. Untuk dapat mengikuti ujian sekolah/madrasah, peserta didik harus mendapatkan nilai yang sama atau lebih besar dari nilai batas ambang kompetensi yang dirumuskan oleh BSNP, pada kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian, kelompok mata pelajaran estetika, serta kelompok mata pelajaran jasmani, olah raga, dan kesehatan. Instrumen penilaian yang digunakan oleh satuan pendidikan dalam bentuk ujian sekolah/madrasah memenuhi persyaratan substansi, konstruksi, dan bahasa, serta memiliki bukti validitas empirik.

## **3. Penilaian Hasil Belajar oleh Pemerintah**

Selain terkait dengan proses, Pemerintah juga membuat kebijakan yang terkait dengan ujian yang sifatnya nasional. Dalam ayat (2) pasal 58 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan bahwa evaluasi peserta didik, satuan pendidikan, dan program pendidikan dilakukan oleh lembaga mandiri secara berkala, menyeluruh, transparan, dan sistematis untuk menilai pencapaian standar nasional pendidikan.

Terkait dengan Ujian nasional ini, ada hal penting yang harus diperhatikan, yakni hasil ujian nasional bukan satu-satunya penentu kelulusan. Dalam pasal 18

Permendikbud Nomor 3 Tahun 2017 dijelaskan bahwa peserta didik dinyatakan lulus dari satuan pendidikan pada pendidikan dasar dan menengah setelah: (a) menyelesaikan seluruh program pembelajaran, (b) memperoleh nilai sikap/perilaku minimal baik, dan (c) lulus ujian satuan pendidikan/program pendidikan. Kelulusan peserta didik ditentukan oleh satuan pendidikan.

Penilaian hasil belajar, baik yang dilakukan oleh pendidik, satuan pendidikan, maupun Pemerintah, dijamin bermutu manakala memenuhi prinsip-prinsip penilaian seperti yang tertuang dalam Permendikbud Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar penilaian berikut.

- a. Sahih, berarti penilaian didasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang diukur.
- b. Objektif, berarti penilaian didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas, tidak dipengaruhi subjektivitas penilai.
- c. Adil, berarti penilaian tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik karena berkebutuhan khusus serta perbedaan latar belakang agama, suku, budaya, adat istiadat, status sosial ekonomi, dan gender.
- d. Terpadu, berarti penilaian oleh pendidik merupakan salah satu komponen yang tak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran.
- e. Terbuka, berarti prosedur penilaian, kriteria penilaian, dan dasar pengambilan keputusan dapat diketahui oleh pihak yang berkepentingan.
- f. Menyeluruh dan berkesinambungan, berarti penilaian oleh pendidik mencakup semua aspek kompetensi dengan menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai, untuk memantau perkembangan kemampuan peserta didik.
- g. Sistematis, berarti penilaian dilakukan secara berencana dan bertahap dengan mengikuti langkah-langkah baku.
- h. Beracuan kriteria, berarti penilaian didasarkan pada ukuran pencapaian kompetensi yang ditetapkan.
- i. Akuntabel, berarti penilaian dapat dipertanggungjawabkan, baik dari segi teknik, prosedur, maupun hasilnya.

Menurut prinsip-prinsip di atas, penilaian yang dilakukan oleh pendidik harus menggunakan acuan kriteria yang berarti penilaian yang dilakukan berbasis kompetensi. Apabila dibandingkan dengan penilaian lainnya, penilaian berbasis kompetensi ini memiliki beberapa keunggulan, di antaranya:

- a. pengumpulan informasi kemajuan belajar baik formal maupun non formal diadakan secara terpadu, dalam suasana yang menyenangkan, serta senantiasa memungkinkan adanya kesempatan yang terbaik bagi siswa untuk menunjukkan apa yang diketahui, dipahami dan mampu dikerjakan siswa.
- b. pencapaian hasil belajar siswa tidak dibandingkan dengan prestasi kelompok (*norm reference assessment*), tetapi dibandingkan dengan kriteria pencapaian kompetensi, standar pencapaian, dan level pencapaian

nasional, dalam rangka membantu anak mencapai apa yang ingin dicapai bukan untuk menghakiminya.

- c. pengumpulan informasi menggunakan berbagai cara, agar kemajuan belajar siswa dapat terdeteksi secara lengkap.
- d. siswa perlu dituntut agar dapat mengeksplorasi dan memotivasi diri untuk mengerahkan semua potensi dalam menanggapi, mengatasi semua masalah yang dihadapi dengan caranya sendiri, bukan sekedar melatih siswa memilih jawaban yang tersedia.
- e. untuk menentukan ada tidaknya kemajuan belajar dan perlu tidaknya bantuan secara berencana, bertahap, dan berkesinambungan berdasarkan fakta dan bukti yang cukup akurat.

Penilaian berkala atau periodik adalah penilaian yang dilakukan secara berkala, tidak terus menerus, hanya pada waktu-waktu tertentu, misal ujian blok, (bisa berupa ujian tengah semester atau ujian akhir semester), dan uji kompetensi. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penilaian berkala ini adalah:

- a. bahan yang diujikan dalam penilaian berkala harus representatif atau mewakili materi yang telah diajarkan
- b. penilaian berkala merupakan akumulasi selektif dari penilaian kelas
- c. kualitas soal yang digunakan dalam penilaian berkala harus baik; paling tidak sudah ditelaah.
- d. hasil penilaian berkala harus berlaku dan diakui pada tingkat regional, atau nasional.
- e. peserta ujian dalam penilaian berkala harus memenuhi persyaratan tertentu, sesuai dengan karakteristik ujian berkala yang ditempuhnya.

Permendiknas Nomor 3 Tahun 2017 tentang Standar Penilaian menjelaskan bahwa ulangan adalah proses yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi siswa secara berkelanjutan dalam proses pembelajaran, untuk memantau kemajuan, melakukan perbaikan pembelajaran, dan menentukan keberhasilan belajar siswa. Dari definisi ini dapat ditarik beberapa pengertian, antara lain: (1) ulangan adalah ujian atau tes yang waktunya ditentukan, misal ulangan harian, ulangan tengah semester, dan ulangan akhir semester, (2) materi yang diujikan dalam ulangan harus materi yang sudah pernah diberikan, atau pernah didiskusikan, atau pernah ditugaskan, (3) hasil ulangan dapat dimanfaatkan untuk memantau kemajuan, melakukan perbaikan pembelajaran, dan menentukan keberhasilan belajar siswa. Secara rinci, penjelasan manfaat ulangan adalah sebagai berikut.

#### **a. Pemantauan kemajuan hasil belajar**

Dengan melakukan ulangan berarti guru telah melakukan pemantauan kemajuan hasil belajar siswanya, apakah materi yang sudah dibahas, atau didiskusikan sudah dikuasai siswa atau belum. Dalam kegiatan ini yang menjadi perhatian guru adalah peningkatan kemampuan siswa, jangan sampai proses pembelajaran yang menghabiskan waktu dan biaya tidak sedikit itu tidak menghasilkan apa-apa, tidak menghasilkan peningkatan

kemampuan siswa. Atau dengan kata lain, pelaksanaan program pembelajaran tidak efisien.

Di sini yang perlu ditegaskan adalah ulangan itu harus dilakukan secara terus menerus, bahkan sepanjang pembelajaran itu berlangsung. Hal ini selaras dengan prinsip-prinsip penilaian, utamanya prinsip terpadu yang tercantum dalam Permendiknas Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Standar Penilaian. Di Permendiknas Nomor 20 Tahun 2007 itu dituliskan bahwa prinsip terpadu, berarti penilaian oleh pendidik merupakan salah satu komponen yang tidak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran. Ini berarti bahwa kegiatan siswa dalam pembelajaran harus dinilai, baik melalui ulangan (tes tertulis, tes lisan) ataupun melalui pengamatan secara langsung pada kegiatan siswa selama proses pembelajaran berlangsung. Dengan cara demikian maka kemajuan hasil belajar siswa dapat dipantau dengan baik.

#### **b. Perbaikan Pembelajaran**

Ulangan dapat butir-butir memberikan informasi tentang kompetensi yang sudah dikuasai ataupun yang belum dikuasai oleh siswa. Dalam hal ini, ulangan merupakan tindakan refleksi pada pembelajaran yang oleh Marzano, et.al (2011) disebut dengan *reflecting on teaching*. Dalam *reflecting on teaching* ini, guru juga memperhatikan semua hal di sekitarnya, komponen apa yang tidak bermanfaat untuk peningkatan kemampuan siswa. Lebih jauh Marzano menjelaskan bahwa berdasarkan refleksi pada pembelajaran inilah dilakukan perencanaan dan persiapan (*planning and preparing*). Berdasarkan perencanaan dan persiapan inilah akhirnya guru melaksanakan pembelajaran, yang oleh Marzano disebut dengan *classroom strategies and behaviors*. Pelaksanaan pembelajaran inilah komponen yang sangat menentukan pencapaian belajar siswa. Bahkan oleh Mazano dijelaskan bahwa semakin banyak guru melakukan sesuatu maka semakin tinggi prestasi belajar siswa.

Hal yang harus diingat adalah, selain strategi pembelajaran maka substansi atau materi yang disampaikan juga sangat penting dikuasai oleh guru. Hal ini selaras dengan pendapat Reeves (2010) yang mengatakan bahwa strategi pembelajaran termasuk cara penilaian dan penguasaan substansi adalah dua komponen penting dalam proses pembelajaran. Lebih jauh Reeves (2010) menjelaskan bahwa untuk lebih memperbaiki pembelajaran melalui penilaian dapat dilakukan melalui: (1) guru mengidentifikasi komponen-komponen penting dalam silabus, (2) guru mengembangkan sistem penilaian kinerja (termasuk soal uraian) yang dilengkapi dengan rubrik, (3) guru melakukan ulangan dengan soal uraian, (4) guru melakukan koreksi hasil ulangan dengan menggunakan rubrik yang telah disiapkan, dan (5) guru mencermati hasil ulangan yang telah dikoreksi, butir-butir komposisi mana yang belum dikuasai siswa.

Selanjutnya, kompetensi yang belum dikuasai siswa inilah yang digunakan sebagai bahan dalam melakukan remedi. Dengan demikian siswa dapat terpenuhi kekurangannya untuk menguasai kompetensi yang

telah ditentukan. Memang, perbaikan atau pemenuhan kompetensi dari seseorang itu akan lebih efektif manakala dilakukan dan atas prakarsa orang itu sendiri. Oleh karena itu, tugas guru adalah menimbulkan kemauan siswa untuk melakukan kegiatan-kegiatan positif untuk memenuhi kekurangannya. Ini berarti bahwa guru sebaiknya selalu melibatkan siswa dalam melakukan penilaian.

Menurut Stiggins dan Chappuis (2012) ada lima kunci sukses dalam melakukan penilaian yang melibatkan siswa, yaitu:

- 1) setelah diberi tahu jawaban yang benar terhadap tugas yang diberikan, siswa diminta untuk mengoreksi dan membetulkan pekerjaannya sendiri
- 2) di awal pertemuan, guru selalu mengingatkan tentang pentingnya kualitas suatu karya
- 3) guru memberikan contoh dalam memberikan skor hasil karya siswa dengan akurat, oleh karenanya guru menggunakan rubrik dalam melakukan penskoran terhadap karya siswa (misal hasil ulangan yang soalnya uraian)
- 4) siswa juga dilatih agar mampu memberikan skor hasil ulangannya sendiri dengan akurat, oleh karenanya mereka juga harus dilatih menggunakan rubrik penskoran sewaktu memberikan skor terhadap karya-karyanya sendiri termasuk hasil ulangannya
- 5) guru harus betul-betul memperhatikan pencapaian belajar siswa dan mengkomunikasikannya kepada mereka.

Terkait dengan butir b kunci sukses di atas, guru tidak sekedar mengingatkan dengan kata-kata, tetapi dengan contoh nyata. Sebaiknya, soal yang diberikan kepada siswa (lebih-lebih untuk mahasiswa) sebagian besar harus memenuhi the higher level of thinking (*HOT*). Menurut Moore, B dan Stanley T (2010), dari peringkat kognitif Bloom itu, urutan nomor 1 – 3 dikategorikan *the lower level of thinking* dan 4 -6 *the higher level of thinking (HOT)*. Hal ini senada dengan pendapat Thomas, A. dan Thorne, G. (2007) yang mengatakan *HOT is thinking on a higher level than memorizing facts or telling something back to someone exactly the way the it was told to you. When a person memorizes and gives back the information without having to think about it, we call it rote memory. That's because it's much like a robot; it does what it's programmed to do, but it doesn't think for itself.*

Dengan menerapkan kelima kunci sukses di atas (a, b, c, d, dan e dari Stiggins dan Chappuis), besar kemungkinannya penilaian tidak hanya sekedar untuk mengetahui kemajuan dan pencapaian belajar siswa, tetapi juga mampu mendorong siswa untuk jujur, bertanggung jawab, bercita rasa tinggi, sangat faham terhadap kompetensi yang sedang dipelajari, trampil menilai karyanya sendiri, menghargai karya orang lain, serta mengetahui kemajuan dan hasil belajar mereka. Namun, harus difahami bahwa lima kunci sukses ini tidak merupakan kunci sapu jagad yang dapat digunakan untuk

semua kondisi siswa. Hal ini dapat difahami karena menurut Reeves (2009), seseorang dapat berhasil melakukan perubahan bila selain memiliki motivasi internal tinggi, orang itu juga mendapat dukungan dari teman dan keluarga.

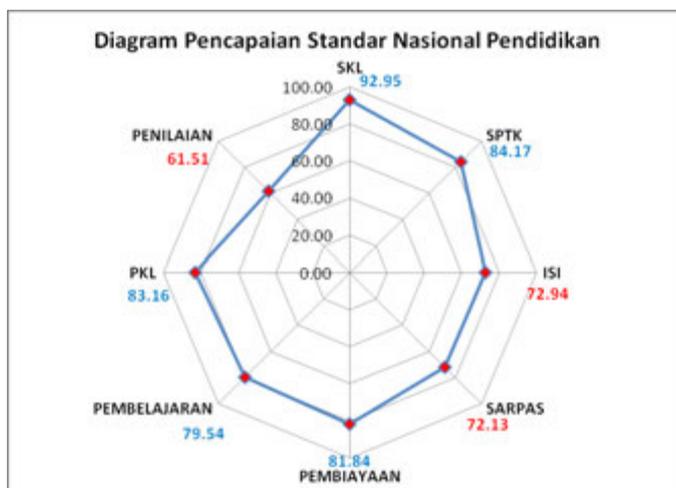
Dengan menyimak uraian di atas, dapat dikatakan bahwa hasil ulangan bisa digunakan sebagai bahan perbaikan pembelajaran. Paling tidak, ada dua hal yang dapat diperbaiki, yakni: (1) substansi atau materi pembelajaran, dan (2) strategi pembelajaran. Dengan ulangan, dapat diketahui materi atau kompetensi yang belum dikuasai siswa. Dari sini guru memperoleh gambaran, materi mana yang harus ditambahkan atau mendapat perhatian lebih dan materi mana yang sudah cukup memadai. Selain itu, dengan ulangan juga dapat diketahui butir-butir soal pada tingkat kognitif apa yang sebagian besar siswa tidak mampu menjawab dengan benar. Guru juga mendapat gambaran bahwa strategi pembelajaran harus disesuaikan dengan tingkat kognitif soal yang diberikan ke siswa. Misal, bila soalnya sebagian besar pada tingkatan HOTS maka pembelajarannya juga harus mampu mendorong siswa untuk membiasakan berpenalaran tinggi. Hal ini sesuai dengan pendapat DiRanna, et al. (2008) yang mengatakan bahwa ada mata rantai yang tidak dapat dipisahkan antara tujuan pembelajaran, proses pembelajaran, dan penilaian hasil pembelajaran. Bila tujuan pembelajaran juga untuk menghasilkan lulusan yang kreatif, maka pembelajarannya harus kreatif, dan penilaiannya juga menggunakan soal-soal yang memiliki HOTS.

### **c. Penentuan keberhasilan belajar peserta didik**

Hasil ulangan juga dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penentuan kelulusan, apakah seseorang peserta didik dapat dikatakan lulus atau tidak lulus. Peserta didik yang telah tuntas pada kompetensi tertentu maka peserta didik itu dinyatakan lulus. Sebaliknya, peserta didik yang belum tuntas pada kompetensi tertentu maka peserta didik tersebut dinyatakan tidak/belum lulus. Batas ketuntasan kompetensi minimal (KKM) ini bervariasi antara mata pelajaran satu dengan lainnya, tetapi Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) membrikan rambu-rambu, yakni 75%. Harga inilah yang selanjutnya digunakan sebagai kriteria ketuntasan dalam studi SMK.

## **C. Hasil Kajian Dan Pembahasan**

Selanjutnya data pencapaian Standar Nasional Pendidikan dari sekolah-sekolah yang memiliki kompetensi keahlian yang dipilih menjadi sampel penelitian dapat dilihat pada Gambar 20.



Gambar 20. Diagram Pencapaian Standar Nasional Pendidikan

Gambar 20 menunjukkan bahwa skor tertinggi dicapai oleh standar kompetensi lulusan dengan skor 92,95, sedangkan skor terendah dicapai oleh standar penilaian dengan skor 61,51. Rendahnya pencapaian standar penilaian ini tidak hanya terjadi pada sekolah tertentu, tetapi terjadi di hampir semua SMK yang menjadi sampel penelitian ini. Oleh karena pemilihan sekolah itu didasarkan pada kompetensi keahlian, maka dapat dikatakan bahwa rendahnya pencapaian standar penilaian itu terjadi di hampir semua kompetensi keahlian yang menjadi sampel penelitian. Secara rinci, pencapaian standar penilaian pada tiap-tiap kompetensi keahlian dapat dilihat pada Tabel 12.

**Tabel 12. Pencapaian Standar Penilaian di 13 Kompetensi Keahlian**

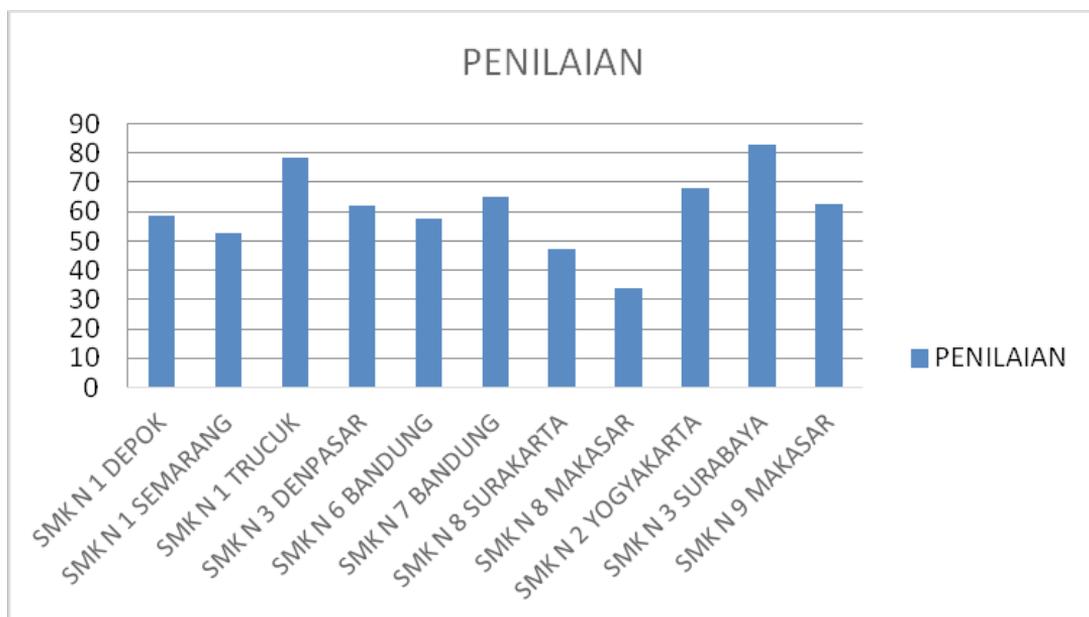
NO	KOMPETENSI KEAHLIAN	PENCAPAIAN	KETERANGAN
1	Akuntansi	58,73	Belum tuntas
2	Teknik Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik	52,78	Belum tuntas
3	Agibisnis Tanaman Pangan dan Holtikultura (ATPH)	78,57	Tuntas*)
4	Akomodasi Perhotelan	61,91	Belum tuntas
5	Teknik Pemesinan	54,37	Belum tuntas
6	Kimia Analis	69,05	Belum tuntas
7	Seni Karawitan	47,22	Belum tuntas
8	Teknik Gambar Bangunan	61,11	Belum tuntas
9	Usaha Perjalanan Wisata	34,13	Belum tuntas
10	Teknik Komputer dan Jaringan	67,86	Belum tuntas
11	Teknik Audio Video	82,94	Tuntas*)
12	Nautika Kapal Penangkapan Ikan	62,70	Belum tuntas
13	Kimia Industri	61,51	Belum tuntas

\*) batas ketuntasan  $\geq 75$

Tabel 12 menunjukkan bahwa hanya kompetensi keahlian Agibisnis Tanaman Pangan dan Holtikultura (ATPH) yang diselenggarakan oleh SMKN 1 Trucuk Klaten dan kompetensi keahlian Teknik Audio Video yang diselenggarakan oleh SMKN 3 Surabaya yang sudah tuntas pencapaian standar penilaiannya.

Ke-tiga belas kompetensi keahlian ini diselenggarakan di 11 SMK sehingga bila dilihat dari sisi SMK maka hasilnya seperti yang terlihat pada Gambar 21. Menurut kepala

SMK yang menjadi tempat penelitian ini, hanya SMKN 1 Trucuk dan SMKN 3 Surabaya yang pencapaian standar penilaiannya sudah tuntas (>75%). Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian Badrun Kartowagiran, dkk (2012) terhadap pelaksanaan Standar Penilaian dan Standar Proses Pembelajaran di beberapa Program keahlian Teknik Mesin SMK di Provinsi D.I.Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan teknik non-proporsional random sampling dan diperoleh 15 SMK untuk seluruh Provinsi D.I.Yogyakarta, dan diambil tiga SMK setiap Kabupaten/kota. Sampel ini terdiri atas 5 SMK swasta dan 10 SMK Negeri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hanya 5 SMK yang implementasi Standar Proses dan Standar Penilaiannya termasuk katagori baik, dan semuanya SMKN. Ini berarti bahwa masih diperlukan kerja keras untuk membenahi pembelajaran dan penilaian di Program keahlian Teknik Mesin, khususnya di SMK swasta.



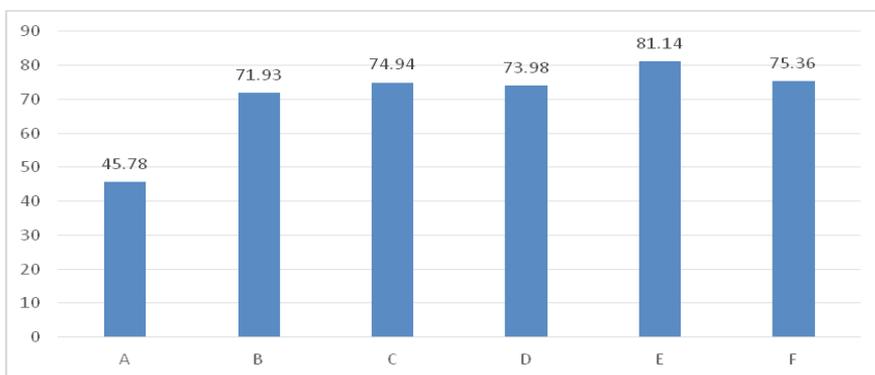
Gambar 21. Pencapaian Standar Penilaian pada SMKN sampel

Hasil ini memprihatinkan karena penilaian merupakan kegiatan kunci dalam upaya perbaikan pembelajaran dan pembelajaran merupakan kegiatan kunci dalam upaya perbaikan kualitas pendidikan. Dengan penilaian melalui ulangan dapat diketahui butir-butir kompetensi yang sudah dikuasai ataupun yang belum dikuasai oleh siswa. Dalam hal ini, ulangan merupakan tindakan refleksi pada pembelajaran yang oleh Marzano, et.al (2011) disebut dengan *reflecting on teaching*. Dalam *reflecting on teaching* ini, guru juga memperhatikan semua hal di sekitarnya, komponen apa yang tidak bermanfaat untuk peningkatan kemampuan siswa. Lebih jauh Marzano menjelaskan bahwa berdasarkan refleksi pada pembelajaran inilah dilakukan perencanaan dan persiapan (*planning and preparing*). Berdasarkan perencanaan dan persiapan inilah akhirnya guru melaksanakan pembelajaran, yang oleh Marzano disebut dengan *classroom strategies and behaviors*. Pelaksanaan pembelajaran inilah komponen yang sangat menentukan pencapaian belajar siswa. Bahkan oleh Mazano dijelaskan bahwa semakin banyak guru melakukan sesuatu maka semakin tinggi prestasi belajar siswa.

Hal yang harus diingat adalah, selain strategi pembelajaran maka substansi atau materi yang disampaikan juga sangat penting dikuasai oleh guru. Hal ini selaras dengan pendapat Reeves (2010) yang mengatakan bahwa strategi pembelajaran termasuk cara penilaian dan penguasaan substansi adalah dua komponen penting dalam proses pembelajaran. Lebih jauh Reeves (2010) menjelaskan bahwa untuk lebih memperbaiki pembelajaran melalui penilaian dapat dilakukan melalui: (1) guru mengidentifikasi komponen-komponen penting dalam silabus, (2) guru mengembangkan sistem penilaian kinerja (termasuk soal uraian) yang dilengkapi dengan rubrik, (3) guru melakukan ulangan dengan soal uraian, (4) guru melakukan koreksi hasil ulangan dengan menggunakan rubrik yang telah disiapkan, dan (5) guru mencermati hasil ulangan yang telah dikoreksi, butir-butir kompetensi mana yang belum dikuasai siswa.

Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian Badrun Kartowagiran, dkk (2012) terhadap pelaksanaan Standar Penilaian dan Standar Proses Pembelajaran di beberapa Program keahlian Teknik Mesin SMK di Provinsi D.I.Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan teknik non-proporsional random sampling dan diperoleh 15 SMK untuk seluruh Provinsi D.I.Yogyakarta, dan diambil tiga SMK setiap Kabupaten/kota. Sampel ini terdiri atas 5 SMK swasta dan 10 SMK Negeri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hanya 5 SMK yang implementasi Standar Proses dan Standar Penilaiannya termasuk katagori baik, dan semuanya SMKN. Ini berarti bahwa masih diperlukan kerja keras untuk membenahi pembelajaran dan penilaian di Program keahlian Teknik Mesin, khususnya di SMK swasta.

Survei yang dilakukan Badrun Kartowagiran, dkk (2014) terhadap pelaksanaan standar penilaian di 166 SMK yang ada di Indonesia juga menunjukkan hasil yang menarik. Survei ini membatasi aspek penilaian menurut guru pada enam indikator, yaitu: (1) pemahaman konsep dan pelaksanaan penilaian autentik, (2) pelaksanaan penilaian portofolio, (3) pemahaman konsep dan pelaksanaan ulangan harian, (4) pemahaman konsep dan pelaksanaan ulangan tengah semester, (5) pemahaman konsep dan pelaksanaan ulangan akhir semester, dan (6) pemahaman konsep ujian tingkat kompetensi. Hasil survei dituangkan dalam Gambar 22.



Gambar 22. Pemahaman konsep dan pelaksanaan penilaian oleh guru

Keterangan:

A = Pemahaman konsep dan pelaksanaan penilaian autentik

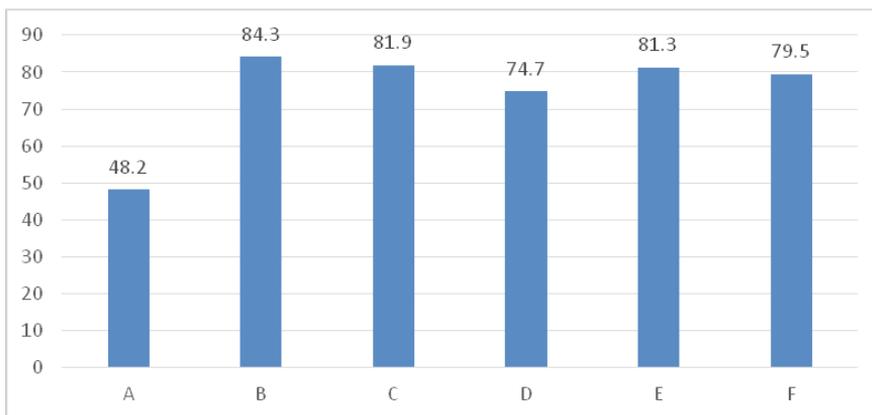
B = Pelaksanaan penilaian portofolio

- C = Pemahaman konsep dan pelaksanaan ulangan harian
- D = Pemahaman konsep dan pelaksanaan ulangan tengah semester.
- E = Pemahaman konsep dan pelaksanaan ulangan akhir semester.
- F = Pemahaman konsep dan ujian tingkat kompetensi

Gambar 22 menunjukkan bahwa 45,78% guru menyatakan dapat menjelaskan konsep penilaian autentik dan melaksanakannya dalam penilaian hasil belajar, 71,93% guru menyatakan melaksanakan penilaian portofolio, 74,94% guru menyatakan dapat menjelaskan konsep ulangan harian dan melaksanakannya, 73,98% guru menyatakan dapat menjelaskan konsep ulangan tengah semester dan melaksanakannya, 81,14% guru menyatakan dapat menjelaskan konsep ulangan akhir semester dan melaksanakannya, dan 75,36% guru menyatakan dapat menjelaskan konsep ujian tingkat kompetensi.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya diketahui bahwa sebagian kecil guru yang memahami konsep dan pelaksanaan penilaian autentik, dan sebagian besar guru telah melakukan penilaian portofolio, memahami konsep dan pelaksanaan ulangan harian, pemahaman konsep dan pelaksanaan ulangan tengah semester, memahami konsep ujian tingkat kompetensi, serta umumnya guru memahami konsep dan pelaksanaan ulangan akhir semester. Apabila dilihat rata-rata sebagian besar (70,52%) guru telah bisa menjelaskan konsep dan melaksanakan penilaian. Namun pemahaman guru masih kurang dalam hal konsep dan pelaksanaan penilaian autentik.

Sementara itu, aspek penilaian dengan responden kepala sekolah pada indikator: 1) pemahaman konsep dan pelaksanaan penilaian autentik, (2) pelaksanaan penilaian portofolio, (3) pemahaman konsep dan pelaksanaan ulangan harian, (4) pemahaman konsep dan pelaksanaan ulangan tengah semester, (5) pemahaman konsep dan pelaksanaan ulangan akhir semester, dan (6) pemahaman konsep ujian tingkat kompetensi diperoleh hasil seperti yang ditunjukkan pada Gambar 23.



Gambar 23 . Pemahaman dan pelaksanaan penilaian guru menurut kepala sekolah

Keterangan:

- A = Pemahaman konsep dan pelaksanaan penilaian autentik
- B = Pelaksanaan penilaian portofolio
- C = Pemahaman konsep dan pelaksanaan ulangan harian
- D = Pemahaman konsep dan pelaksanaan ulangan tengah semester.
- E = Pemahaman konsep dan pelaksanaan ulangan akhir semester.
- F = Pemahaman konsep dan ujian tingkat kompetensi

Gambar 23 menunjukkan bahwa ada 48,2% kepala sekolah yang menyatakan guru sudah dapat menjelaskan konsep penilaian autentik dan melaksanakannya dalam penilaian hasil belajar siswa, 84,3% kepala sekolah menyatakan bahwa guru sudah melaksanakan penilaian portofolio, 81,9% kepala sekolah menyatakan bahwa guru sudah dapat menjelaskan konsep ulangan harian dan melaksanakannya, 74,7% kepala sekolah menyatakan bahwa guru sudah dapat menjelaskan konsep ulangan tengah semester dan melaksanakannya, 81,3% kepala sekolah menyatakan bahwa guru sudah dapat menjelaskan konsep ulangan akhir semester dan melaksanakannya, dan 79,5% kepala sekolah menyatakan bahwa guru telah dapat menjelaskan konsep ujian tingkat kompetensi.

Berdasarkan informasi dari kepala sekolah dan guru ternyata kemampuan guru yang termasuk kurang adalah pemahaman terhadap konsep dan pelaksanaan penilaian autentik. Saat ini dan selanjutnya kurikulum yang berlaku dan akan berlaku di SMK adalah kurikulum tahun 2013 dan penilaian yang digunakan adalah penilaian autentik maka perlu pencermatan yang lebih mendalam butir penilaian mana saja yang masih kurang.

Ringkasan rerata skor butir penilaian dengan responden siswa dapat dilihat pada Tabel 13.

**Tabel 13. Rerata skor butir penilaian dengan responden siswa**

NO. Urut	Nomor Butir	Pernyataan	Skor Rerata
1	27	Cakupan penilaian di kelas	3,0
2	28	Cakupan penilaian di bengkel	2,6
3	29	Cakupan penilaian di industri	3,0
4	30	Teknik penilaian yang digunakan sewaktu pembelajaran di kelas	3,1
5	31	Teknik penilaian yang digunakan sewaktu pembelajaran di bengkel	2,1
6	32	Teknik penilaian yang digunakan sewaktu pembelajaran di tempat praktek industri	2,1
7	33	Penilai kinerja siswa di industri	1,4
8	34	Tindak lanjut terhadap pekerjaan siswa	2,0
9	35	Bentuk penilaian	1,3

Keterangan Tabel 13:

1 = sangat tidak baik

2 = tidak baik

3 = baik

4 = sangat baik

Tabel 13 menunjukkan bahwa hanya cakupan penilaian di kelas, di tempat industri, dan teknik penilaian yang digunakan di kelas yang mencapai kategori baik, walaupun tidak sampai sangat baik. Sementara itu, cakupan penilaian di bengkel masih rendah. Hal itu dikarenakan penilaian yang dilakukan oleh guru belum seluruhnya mencakup kompetensi sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Sebagian besar guru baru menilai pada aspek pengetahuan dan keterampilan. Belum semua guru

menilai kompetensi sikap sosial dan sikap spiritual dengan benar dan berkelanjutan. Hal ini dikarenakan banyak guru yang salah faham, mereka mengira bahwa setiap pertemuan guru harus menilai semua butir sikap (yang menurut Kemendikbud ada 18 butir) untuk semua siswa. Guru juga mengalami kesulitan dalam merancang instrumen penilaian dan pedoman penskorannya.

Teknik penilaian yang digunakan sewaktu pembelajaran di bengkel dan di industri termasuk kategori belum baik karena hanya menggunakan teknik observasi, belum menggunakan penilaian teman sejawat dan portofolio. Tindak lanjut penilaian hasil belajar juga belum baik, baru sekedar mengembalikan pekerjaan siswa sambil diberi masukan. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah bentuk hasil penilaiannya baru sekedar angka, tidak dilengkapi dengan deskripsi, tabel, ataupun grafik.

Teknik penilaian yang digunakan guru untuk menilai kompetensi pengetahuan belum sepenuhnya bervariasi. Sebagian besar guru sebatas menggunakan tes tertulis, penugasan, dan ulangan harian. Ini berarti bahwa guru belum menerapkan penilaian autentik dengan baik, sedangkan penilaian jenis ini sangat penting dan sangat tepat bila dikehendaki penilaian itu menyeluruh. Hargreaves dan Lorna Earl (2002) memaparkan hasil penelitiannya bahwa: (1) guru lebih senang menggunakan penilaian otentik karena soal yang digunakan tidak harus diuji-coba terlebih dahulu, (2) dengan penilaian otentik dapat dibangun pemahaman kolaboratif antara guru, siswa, dan orang tua karena penilaian otentik menilai setiap kegiatan siswa dan kadang-kadang melibatkan orang tua, dan (3) penilaian otentik juga dapat memberikan umpan balik bagi guru itu sendiri.

Pendidik dapat melakukan penilaian ini di setiap saat, baik melalui pengamatan langsung maupun melalui Ulangan Harian. Dengan pengamatan langsung, pendidik dapat mengetahui perkembangan dan pencapaian sikap anak didiknya. Sementara itu dengan melakukan ulangan berarti guru telah melakukan pemantauan kemajuan hasil belajar siswanya, apakah materi yang sudah dibahas, atau didiskusikan sudah dikuasai siswa atau belum. Dalam kegiatan ini yang menjadi perhatian guru adalah peningkatan kemampuan siswa, jangan sampai proses pembelajaran yang menghabiskan waktu dan biaya tidak sedikit itu tidak menghasilkan apa-apa, tidak menghasilkan peningkatan kemampuan siswa. Ringkasnya, penilaian harus merupakan sarana untuk perbaikan mengajar guru dikenal dengan *assessment for learning* (AfL) dan sebagai sarana untuk perbaikan belajar siswa dikenal dengan *assessment as learning* (AaL) Arends dan Kilcher (2010).

Tugas yang diberikan kepada siswa belum semuanya diteliti dan dikembalikan kepada siswa, biasanya hanya diteliti saja oleh guru tanpa dikembalikan. Belum semua guru menggunakan penilaian proyek, unjuk kerja, dan portofolio untuk menilai kompetensi keterampilan siswanya. Sebagian besar guru hanya menggunakan satu teknik penilaian saja, biasanya unjuk kerja atau proyek. Penilaian portofolio masih jarang dilakukan oleh guru dikarenakan pengadministrasiannya yang membutuhkan banyak energi, waktu, dan ketekunan guru.

Penilaian kompetensi sikap sosial dan sikap spiritual baru sebatas menggunakan teknik observasi saja. Ada beberapa guru yang menggunakan jurnal atau catatan harian namun belum semuanya tertulis di buku nilai khusus. Seyogyanya guru juga

mengkombinasikan teknik penilaiannya dengan menggunakan teknik penilaian diri dan penilaian antar teman. Penilaian sikap sosial dan sikap spiritual ini merupakan penilaian yang sulit menurut guru. Mereka kesulitan dalam mengembangkan instrumen penilaian dan pedoman penskorannya.

Pemanfaatan hasil penilaian yang dilakukan oleh guru belum sepenuhnya optimal. Hasil penilaian hanya digunakan sebagai dasar untuk menentukan nilai atau ketuntasan siswa, dan belum semua guru menganalisis hasil penilaian untuk mengetahui kesulitan belajar siswa, sehingga belum bisa digunakan untuk perbaikan pembelajaran. Hasil penilaian juga belum diberitahukan kepada orang tua/wali siswa secara berkesinambungan, karena baru diberitahukan melalui raport saja.

## D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis antara Standar Penilaian dan hasil kajian maka kesimpulan dari kajian ini adalah sebagai berikut.

1. Kualitas pelaksanaan penilaian autentik di SMK masih memerlukan perbaikan.
  - a. Kualitas RPP masih perlu peningkatan karena sebagian besar RPP itu tidak menampilkan rancangan penilaian sikap, penilaian yang menyatu dengan pembelajaran, dan penilaian yang berkelanjutan.
  - b. Kualitas pelaksanaan penilaian autentik selama pembelajaran masih perlu ditingkatkan karena adanya hal-hal berikut.
    - 1) Lebih dari separuh guru tidak melakukan penilaian sikap dengan alasan: (1) tidak ada waktu bila setiap pertemuan diadakan penilaian sikap, (2) penilaian sikap sudah dilakukan oleh guru agama, dan (3) jumlah siswa terlalu banyak, baik pada setiap kelasnya (ukuran kelas) maupun jumlah siswa yang harus diajar oleh setiap guru, dan (4) mereka belum memahami cara menyiapkan instrumen dan melaksanakan penilaian sikap.
    - 2) Semua guru melakukan penilaian pengetahuan dan hampir semua guru menggunakan tes tulis, tes lisan, tugas, dan hanya sedikit guru yang menggunakan teknik portofolio dan project.
    - 3) Hampir semua guru melakukan penilaian keterampilan, dan sebagian besar guru menggunakan praktek tes; dan hanya sebagian kecil guru yang menggunakan portofolio dan proyek.
  - c. Kedisiplinan guru melaksanakan prinsip-prinsip penilaian autentik masih perlu diperbaiki karena masih ditemukan hal-hal berikut.
    - 1) Lebih dari separuh guru tidak melakukan penilaian secara terpadu dengan pembelajaran.
    - 2) Baru 68% siswa yang mengatakan bahwa guru mengembalikan soal yang telah dikoreksi.
  - d. Kinerja siswa di praktek industri masih dinilai oleh guru pembimbing tanpa didampingi pihak industri, teman sejawat ataupun guru koordinator PI.
  - e. Pada aspek hasil penilaian, hasil pekerjaan siswa tidak dimanfaatkan oleh guru untuk perbaikan pembelajaran dan juga tidak diberitahukan kepada orang tua/wali siswa.

- f. Hasil penilaian yang diterima oleh siswa juga masih dalam bentuk angka dan deskripsi, akan lebih baik jika disertai dengan grafik dan tabel sehingga lebih memudahkan siswa dalam memahaminya.
2. Cara penilaian yang digunakan di SMK saat ini masih tergolong konvensional, misal cara membuat arsip nilai pada tingkat sekolah masih menggunakan manual, belum memanfaatkan kemajuan di bidang IT.

## **E. Rekomendasi**

1. Sekolah perlu menyelenggarakan pelatihan dan atau in-house training dalam menyiapkan Rancangan penilaian (RP), RPP, dan perangkat soal. Dalam kegiatan ini, setiap peserta harus praktek membuat: RP, RPP, dan perangkat soal.
2. Sekolah perlu menyelenggarakan pelatihan cara melakukan penilaian otentik dan/atau penilaian berbasis kompetensi
3. Sekolah perlu menyediakan Buku Panduan Pelaksanaan Penilaian autentik
4. Sekolah perlu memilih instruktur yang menguasai materi, yakni menguasai secara teori dan mampu memberikan contoh-contoh untuk pelatihan tersebut



# STANDAR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

## A. Pendahuluan

Pasal 3 BAB II Undang Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan nasional menjelaskan bahwa *pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.* Untuk mencapai tujuan



pendidikan nasional perlu ditetapkan standar nasional. Pendidikan. Standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Republik Indonesia. Standar nasional pendidikan terdiri atas standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, dan penilaian pendidikan yang harus ditingkatkan secara berencana dan berkala. Secara rinci standar nasional pendidikan terdapat pada Peraturan Pemerintah No 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Salah satu standar nasional yang memegang peran penting dalam menghasilkan sumber daya manusia yang andal adalah guru. Standar guru SMK terdiri atas standar

kualifikasi akademik dan kompetensi guru. Standar guru SMK saat ini dijelaskan sebagai berikut.

## **B. Standar dan Peraturan**

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen juga menyebutkan bahwa guru harus memiliki kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, kompetensi kepribadian dan kompetensi sosial, yang diperoleh melalui pendidikan profesi. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) menyebutkan lulusan pendidikan profesi setara dengan jenjang 7 atau 8. Dengan demikian penyetaraan praktisi DUDI yang akan menjadi guru SMK harus mencapai minimal jenjang 7.

Selanjutnya pada pasal 9 dijelaskan bahwa guru harus memiliki kualifikasi akademik yang diperoleh melalui pendidikan tinggi program sarjana atau program diploma empat. Khusus SMK yang menghasilkan lulusan siap kerja, maka pengalaman di dunia usaha dan dunia industri (DUDI) sangat penting bagi guru. Oleh karena itu guru SMK perlu mengikuti magang atau bahkan bekerja di industri sebelum memulai mengajar. Idealnya secara periodik guru SMK juga perlu magang di industri untuk memutakhirkan kompetensinya.

Standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru SMK/MAK bertujuan untuk menjaga dan meningkatkan kualitas guru SMK/MAK. Standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru SMK/MAK. Kualifikasi akademik guru SMK/MAK adalah ijazah jenjang pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh guru SMK/MAK. Kompetensi guru SMK adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru SMK/MAK. Manfaat kualifikasi akademik dan kompetensi guru SMK/MAK adalah sebagai acuan

- a. Bagi Perguruan Tinggi, standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru SMK/MAK digunakan sebagai acuan dalam menghasilkan calon guru SMK/MAK yang berkualitas dan untuk melaksanakan Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) bagi praktisi Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) yang berminat menjadi guru SMK/MAK dan guru alih fungsi.
- b. Bagi Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (P4TK), standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru SMK/MAK digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan guru SMK/MAK.
- c. Bagi Dinas Pendidikan Provinsi, standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru SMK/MAK digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan rekrutmen, penempatan, dan pembinaan guru SMK/MAK.
- d. Bagi Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru SMK/MAK digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan sertifikasi dan penilaian kinerja guru SMK/MAK.
- e. Bagi Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan, standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru SMK/MAK digunakan sebagai acuan dalam membina SMK/MAK, karena guru merupakan bagian integral dari sekolah.
- f. Bagi Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M), standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru SMK/MAK digunakan sebagai acuan dalam menyusun instrumen akreditasi SMK/MAK.

Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) yang merupakan bagian dari proses globalisasi telah dimulai 31 Desember 2015. Sejak saat itu guru dari negara lain dapat melamar menjadi guru SMK di Indonesia dan sebaliknya guru SMK dari Indonesia dapat menjadi guru SMK di Negara Asean (Free Labour). Oleh karena itu standar kualifikasi dan kompetensi guru SMK di Indonesia harus mengantisipasi standar regional agar kompetensi mereka sesuai dengan kualifikasi guru di negara Asean.

Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (ipteks) yang sangat cepat telah mempengaruhi segala kehidupan, termasuk perilaku kerja. PMK sebagai penghasil tenaga kerja terampil tingkat menengah harus menyesuaikan diri dengan perkembangan ipteks yang demikian cepat itu. Jika PMK tidak mengikuti perkembangan ipteks akan ketinggalan zaman dan lulusannya sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Studi yang dilakukan Newhouse dan Suryadarma (2009) menunjukkan bahwa PMK yang tidak mampu mengikuti perkembangan ipteks mengakibatkan lulusannya sulit memperoleh pekerjaan yang sesuai.

Sumber daya manusia (SDM) pada abad 21 harus memiliki kreativitas dan inovasi (Tirto, 2011). Selanjutnya dijelaskan bahwa kreatifitas mencakup berpikir kreatif, bekerja dengan yang lain secara kreatif, dan melaksanakan inovasi secara kreatif. Kreatif memiliki makna membuat sesuatu yang baru sebagai prasyarat dalam melakukan inovasi. Perubahan ilmu pengetahuan dan teknologi yang demikian cepat menuntut agar SDM selalu melakukan inovasi agar cara yang digunakan dan hasil yang diperoleh berbeda dengan sebelumnya. Jadi kreativitas dan kemampuan berinovasi menjadi perhatian dalam mengembangkan kemampuan SDM agar mampu bersaing di level ASEAN.

Kompetensi Guru SMK kelompok mata pelajaran normatif diasumsikan sama dengan guru SMA, sedangkan kompetensi adaptif terkait dengan bidang keahlian, sehingga guru SMK matapelajaran adaptif memerlukan kompetensi spesifik yang berbeda dengan guru SMA. Guru matapelajaran adaptif di SMK harus memiliki kompetensi bagaimana menerapkan substansi matapelajaran yang diajarkan dalam bidang keahlian yang sedang dipelajari siswanya. Dengan demikian calon guru matapelajaran adaptif di SMK yang lulusan perguruan tinggi perlu pelatihan untuk menyesuaikan diri dengan program keahlian di SMK.

Akiba (2017) menjelaskan kerangka konseptual reformasi guru dalam konteks global. Dalam konteks global, penyelesaian masalah kualitas guru dan aktor pembuat kebijakan memegang peran penting. Dua faktor penting yang menentukan kualitas guru, yaitu lingkungan pengajaran dan lingkungan kebijakan. Lingkungan pengajaran terdiri atas tiga komponen yang saling berhubungan, yaitu Profesi Pengajaran, Konteks Instruksional, dan Konteks kerja. Lingkungan Kebijakan terdiri atas tiga komponen yang juga saling berinteraksi, yaitu Fokus Reformasi, Desain Kebijakan, dan Implementasi Kebijakan. Akiba membahas secara rinci tentang reformaasi guru di sejumlah negara.

Era global yang telah dimulai dengan berlakunya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) sejak Desember 2015 juga harus menjadi perhatian dalam penyusunan SKL PMK. Sejak itu, secara yuridis tenaga kerja dapat masuk-keluar lintas negara Asean dengan bebas. Lulusan PMK harus dipersiapkan mampu bersanding dan bersaing dengan lulusan setara

dari negara lain, minimal Asean. Mampu bersanding artinya mampu bekerjasama dalam posisi setara, sedangkan mampu bersaing artinya memiliki kompetensi yang sama atau bahkan melebihi rekannya dari negara lain. Dengan demikian standar pendidik dan tenaga kependidikan tidak dapat hanya menggunakan standar nasional tetapi harus menggunakan standar regional dan bahkan standar internasional.

Dunia telah memasuki era perekonomian berbasis pengetahuan (*knowledge based society and economy*) yang terbuka (digital) dan bertumpu pada persaingan bebas. Era perekonomian berbasis pengetahuan ditandai dengan persaingan dalam menguasai pengetahuan dan perlombaan ketat penemuan pengetahuan baru. Era digital ditandai dengan perubahan pesat teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dan penguasaan media TIK yang merata di tengah makin cepat dan meluasnya cakupan penyebaran dan pertukaran informasi. Era keterbukaan dan persaingan bebas ditandai dengan mudahnya sekat-sekat antarnegara termasuk dengan pembentukan berbagai kesepakatan pembukaan pasar regional dalam berbagai ukuran cakupan kawasan dari sekelompok negara bertetangga, satu benua, dan lintas benua seperti MEA, AFTA, dan APEC.

Pada era tersebut, jenis pekerjaan seseorang berubah dengan cepat sesuai dengan kebutuhan pasar kerja dan penyediaan tenaga kerja yang semakin mengglobal serta pengetahuan dan teknologi yang semakin canggih. Pekerjaan yang semula dilakukan secara manual dengan mengandalkan tenaga manusia telah digantikan oleh mesin dan teknologi informasi. Beberapa jenis pekerjaan yang ada saat ini, perlahan akan hilang pada 10 tahun ke depan. Diperkirakan 35% keterampilan dasar pada dunia kerja akan berubah pada tahun 2020, dan hampir 2 miliar pekerja berisiko kehilangan pekerjaan. Karena itu, pendidikan dan pelatihan seharusnya dilakukan dengan memberi banyak pilihan keterampilan yang sesuai dengan minat peserta didik dan perkembangan kebutuhan pasar kerja sehingga memungkinkan pembelajaran sepanjang hayat (*lifelong learning*).

Penyelenggaraan pendidikan kejuruan yang berkualitas harus sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta dinamika kebutuhan tenaga kerja. Guru sebagai pelaksana kegiatan pembelajaran di sekolah memiliki tanggung jawab untuk mampu beradaptasi dengan berbagai perkembangan yang cepat dan tuntutan standar yang makin tinggi.

Kualifikasi dan kompetensi guru SMK terkait erat dengan jenjang tugas yang dilaksanakan oleh mereka. Oleh karena itu, penyusunan kompetensi guru SMK berangkat dari Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), sebagaimana tampak pada Gambar 2. Menurut Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 guru memiliki kompetensi pedagogi, kompetensi profesional, kompetensi sosial dan kompetensi kepribadian yang diperoleh melalui pendidikan profesi, sehingga guru SMK harus minimal memiliki kualifikasi level 7. Jenjang 7 pada setiap aspek kompetensi itu yang selanjutnya dijabarkan ke dalam aktivitas yang dilaksanakan oleh guru dan selanjutnya setiap aktivitas dijabarkan ke dalam uraian tugas dan langkah kerjanya. Langkah kerja itulah yang pada akhirnya menjadi dasar untuk menentukan kompetensi apa yang harus dimiliki guru SMK.

Guru sebagai jabatan profesional perlu memenuhi Standar Kualifikasi Kerja

Nasional (KKNI) sebagaimana tercantum dalam Perpres RI Nomor 8 Tahun 2012. Dengan kualifikasi S1, seorang guru paling tidak mempunyai kompetensi generik substansial sesuai jenjang kualifikasi pada Level 6 yaitu (1) mampu mengaplikasikan bidang keahliannya dan memanfaatkan IPTEKS pada bidangnya dalam penyelesaian masalah serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi, (2) menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan tersebut secara mendalam, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah procedural, (3) mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan data, dan mampu memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi secara mandiri dan kelompok; dan (4) bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja organisasi. Dari segi substansi kompetensi, frasa kunci deskripsi kualifikasi Level 6 ini adalah “menguasai konsep teoretis dan mampu mengaplikasikan bidang keahliannya”. Substansi kompetensi ini sangat penting dimiliki karena guru SMK dituntut mampu mendemonstrasikan ketrampilan/ kompetensinya khususnya pada pembelajaran praktek.

Sebagai guru profesional, selain harus menguasai kompetensi pada kualifikasi KKNI Level 6, juga harus memiliki kompetensi pada kualifikasi Level 7 yang dideskripsikan sebagai berikut: (1) mampu merencanakan dan mengelola sumberdaya di bawah tanggung jawabnya, dan mengevaluasi secara komprehensif kerjanya dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni untuk mengembangkan langkah-langkah strategis organisasi, (2) mampu memecahkan permasalahan ilmu pengetahuan teknologi dan/atau seni dalam bidang keahliannya melalui pendekatan monodisipliner, dan (3) mampu melakukan riset dan mengambil keputusan strategis dengan akuntabilitas dan tanggung jawab penuh atas semua aspek di bawah tanggung jawab bidang keahliannya.

Kata-kata kunci deskripsi kualifikasi Level 7 ini adalah: merencanakan, mengelola, memecahkan masalah, dan melakukan penelitian serta mengambil keputusan. Kata-kata kunci ini sesuai dengan karakteristik kinerja guru SMK dalam melaksanakan tugas profesionalnya, yakni melakukan perencanaan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi pembelajaran serta melakukan pengelolaan kelas. Selain itu, guru SMK juga dituntut untuk melakukan peningkatan kualitas pembelajaran secara terus menerus sehingga diperlukan kemampuan untuk melakukan penelitian tindakan kelas (*classroom action research*).

Dalam Ketentuan Umum Perpres No 8 Tahun 2012 jenjang kualifikasi pada KKNI ini didefinisikan sebagai proses penyandingan dan pengintegrasian capaian pembelajaran yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan kerja, dan pengalaman kerja. Khusus untuk guru SMK, pengalaman kerja yang dimaksud mengandung makna bahwa penguasaan kompetensi profesional perlu diperkuat dengan pengalaman kerja di dunia usaha/dunia industri (DU/DI). Pengalaman kerja di DU/DI ini baik sebagai bekal sebelum memulai tugas mengajar maupun sebagai bagian dari pengembangan keprofesian berkelanjutan agar kompetensi profesional yang bersangkutan selalu *up to date*.

Dalam perspektif KKNI, kualifikasi adalah capaian pembelajaran yang menyatakan kedudukannya pada KKNI yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan kerja, dan

pengalaman kerja. Sesuai dengan Ketentuan Umum Pepres Nomor 8 Tahun 2012, pengalaman kerja adalah pengalaman melakukan pekerjaan dalam bidang tertentu dan jangka waktu tertentu secara intensif yang menghasilkan kompetensi. Khusus untuk guru SMK, pengalaman kerja yang dimaksud mengandung makna bahwa penguasaan kompetensi profesional perlu diperkuat dengan pengalaman kerja di Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI). Pengalaman kerja di DUDI ini baik sebagai bekal sebelum memulai tugas mengajar maupun sebagai bagian dari pengembangan keprofesian berkelanjutan agar kompetensi profesional yang bersangkutan selalu *up to date*.

Kompetensi dalam profesi guru, pada awalnya dipersiapkan atau diperoleh melalui lembaga pendidikan formal keguruan, sebelum seseorang memangku jabatan (tugas dan tanggung jawab) sebagai syarat kualifikasi akademik sebagai guru. Selanjutnya untuk menuju ke arah pelaksanaan tugas dan tanggungjawab secara profesional, tidaklah cukup dengan berbekal dengan kemampuan yang diperoleh melalui jalur pendidikan formal tersebut.

Pada dasarnya pendidikan guru itu bukan hanya berlangsung melalui pendidikan wajib selama beberapa tahun saja, melainkan berlangsung seumur hidup (*life long education*). Setelah bekerja dalam bidang pendidikan, seorang guru harus terus meningkatkan profesionalismenya melalui berbagai cara seperti: belajar sendiri, mengikuti penataran, mengadakan penelitian, mengarang buku, aktif dalam organisasi profesi, turut memikul tanggung jawab dalam masyarakat, menonton film, mendengarkan radio, televisi, dan lain-lain. Semua kegiatan itu sangat berharga untuk mengembangkan pengalaman, pengetahuan, keterampilan guru sehingga kemampuan profesionalnya semakin berkembang (Hamalik, 2003). Dengan demikian, untuk dapat bekerja secara profesional, setiap guru harus melakukan pengembangan kompetensinya secara berkesinambungan.

Secara umum, kurangnya guru dan tenaga pendidik yang berkualitas, distribusi guru yang tidak merata di berbagai wilayah Indonesia, serta belum terpenuhinya kebutuhan guru produktif merupakan beberapa tantangan utama terkait guru di lembaga pendidikan vokasi saat ini (2017). Jika ditelusuri lebih lanjut, permasalahan mutu guru di pendidikan vokasi juga terkait dengan beberapa hal. Pertama, masih terdapat guru yang belum memenuhi kualifikasi akademik seperti yang diamanatkan oleh Undang-undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2008 tentang Guru. Menurut kedua peraturan tersebut, kualifikasi akademik bagi guru adalah S1 atau D-IV. Akan tetapi, pada tahun 2015 sekitar 12% guru masih memiliki kualifikasi akademik dibawah S-1/ D-IV. Proporsi ini lebih besar daripada guru SMA yang juga berkualifikasi akademik dibawah S-1/D-IV (7%). Kedua, masih banyak keraguan terhadap kompetensi guru di satuan lembaga pendidikan karena hasil uji kompetensi menunjukkan masih banyak guru yang belum mencapai standar kompetensi yang ditetapkan. Selain itu, guru tidak selalu memiliki kompetensi keahlian yang sesuai dengan mata pelajaran yang diampunya. Ketiga, masih banyak guru yang tidak menguasai penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).

Hal di atas diperkuat oleh pernyataan Danim (2010) bahwa untuk memenuhi kriteria pendidik profesional, seorang guru harus menjalani profesionalisasi atau proses menuju derajat profesional yang sesungguhnya secara terus menerus untuk meningkatkan

kompetensinya. Menurut Saud (2009) seorang guru dituntut untuk meningkatkan kompetensi secara berkesinambungan disebabkan substansi kajian dan konteks pembelajaran selalu berkembang dan berubah menurut dimensi ruang dan waktu. Profesionalisasi guru merupakan suatu keharusan berkaitan dengan kondisi objektif saat ini yang ditemukan dalam melaksanakan pendidikan, yaitu: (1) perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, (2) persaingan global bagi lulusan pendidikan, (3) otonomi daerah, dan (4) implementasi kurikulum tingkat.

Untuk mampu menjalankan kewajiban, tugas dan tanggung jawab sebagai guru profesional dengan substansi kajian dan konteks pembelajaran teknologi yang selalu berkembang maka seseorang yang akan menjadi guru perlu memenuhi suatu standar kompetensi tertentu. Jabatan profesional guru paling tidak mempersyaratkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Pendidikan persiapan yang relatif panjang untuk memenuhi kualifikasi dan kinerja yang sesuai dengan standar kompetensi yang dituntut.
- b. Penerapan prinsip-prinsip keilmuan dan teknologi dalam memberikan layanan sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman.
- c. Praktek kependidikan yang intensif dan komprehensif.
- d. Kemampuan membuat keputusan, baik secara mandiri maupun secara bersama.
- e. Proses dan hasil kerja dapat dipertanggungjawabkan kepada *stakeholders*.
- f. Kepatuhan kepada kode etik profesi sebagai acuan norma yang berisi rambu-rambu tentang kepatutan bertindak dalam bidang yang menjadi tanggung jawabnya.
- g. Jaminan imbalan yang layak atas jasa layanan yang diberikannya.
- h. Dedikasi yang tinggi dalam memberikan layanan.
- i. Jaminan memperoleh kesempatan berkembang sesuai dengan tuntutan profesi.
- j. Jaminan memperoleh perlindungan hukum, perlindungan profesi, dan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja.
- k. Kebebasan membentuk dan atau menjadi anggota asosiasi profesi.
- l. Kemampuan bekerjasama dengan profesi lain.
- m. Pengakuan dari masyarakat atas keprofesionalannya.

Pembelajaran di lembaga pendidikan kejuruan yang mengutamakan penguasaan kompetensi membutuhkan para pendidik yang memahami perkembangan usaha dan industri di luar sekolah. Oleh sebab itu, pengalaman para guru pendidikan vokasi untuk terjun langsung dalam kegiatan di industri menjadi sangat penting. Apalagi magang di DUDI merupakan salah satu cara yang sangat penting untuk pemutakhiran kompetensi. Magang guru di perusahaan juga dapat menguatkan kerjasama pendidikan kejuruan yang bersangkutan dengan DUDI untuk kegiatan Prakerin peserta didik. Kerjasama pendidikan vokasi dan DUDI dalam bentuk magang guru telah terintegrasikan dalam instrumen akreditasi pendidikan vokasi (dalam Standar Pengelolaan). Akan tetapi, data tentang pengalaman industri guru pendidikan vokasi belum tersedia secara sistematis. Data ini dibutuhkan untuk memetakan kebutuhan pembinaan guru agar lebih lebih mampu mentransfer informasi serta keterampilan sesuai dengan perkembangan teknologi terbaru di perusahaan- perusahaan.

Secara umum, pendidikan kejuruan harus mengambil inisiatif untuk membuka

peluang magang guru di perusahaan. Minat dari DUDI masih belum optimal untuk mengembangkan kegiatan magang guru pendidikan vokasi menjadi kegiatan yang bermanfaat untuk perusahaan. Sekalipun ada kesadaran untuk menjadikan magang guru di perusahaan sebagai kegiatan yang terstruktur, manajemen sekolah tidak selalu mampu melaksanakannya. Kendala utama dalam pelaksanaan program magang tersebut adalah masih terbatasnya peluang magang di DUDI. Akibatnya, pelaksanaan program menjadi tidak berkala serta tergantung pada informasi dari DUDI atau inisiatif guru.

Pemerintah menetapkan kualifikasi tenaga kerja Indonesia melalui Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) sebagai kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor. Kompetensi ini termasuk untuk pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan kejuruan. Ketentuan ini pada prinsipnya merupakan kesiapan pemerintah mengembangkan guru SMK dalam menghadapi MEA.

Kualitas pendidikan kejuruan tidak lepas dari kualitas para pendidikannya. Pendidik merupakan unsur utama dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Pendidik yang memfasilitasi dan memotivasi peserta didik belajar, Banyak negara termasuk Indonesia yang memiliki keterbatasan jumlah guru yang berkualitas dalam melaksanakan tugas pembelajaran peserta didik. Kualitas guru pendidikan kejuruan ditentukan oleh pengalaman belajar selama di Lembaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan (LPTK). Perubahan tuntutan pada kompetensi lulusan SMK mengarah pada kompetensi para pendidik atau dosen, karena merekalah yang melaksanakan pembelajaran selama di LPTK. Oleh karena itu untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas diperlukan guru SMK yang profesional.

Guru yang profesional dihasilkan oleh lembaga penghasil guru, yaitu LPTK. Untuk itu LPTK harus melakukan inovasi dalam tugasnya mendidik guru yang profesional. LPTK merupakan Perguruan Tinggi yang diberi kewenangan oleh Pemerintah untuk menyelenggarakan Pendidikan Tinggi yang khusus mengembangkan ilmu pendidikan dan menghasilkan tenaga pendidik tingkat Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah termasuk menengah kejuruan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memiliki konsekuensi dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan vokasi karena pengelolaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus, Pendidikan Menengah (SMA dan SMK) dilakukan oleh Pemerintah Provinsi. Pengelolaan pendidikan anak usia dini, Pendidikan Dasar (SD dan SMP) dan Pendidikan Masyarakat (kursus dan pelatihan) dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.

Provinsi perlu mempersiapkan diri untuk menerima tanggung jawab pengelolaan SMK dari Kabupaten/Kota, mulai dari aspek perencanaan, pendanaan, pembinaan, dan evaluasinya. Perpindahan kewenangan Lembaga Kursus dan Pelatihan ke Pemda Kabupaten/Kota juga membutuhkan waktu penyesuaian. Pemda Kabupaten/Kota

harus mulai mendata lembaga kursus dan pelatihan yang ada di wilayahnya dan juga menyiapkan perencanaan, penganggaran, pembinaan, serta evaluasi pendidikan nonformal bagi lembaga kursus dan pelatihan.

Untuk itu, perlu disusun sistem dan aturan terkait dengan pengelolaan pendidikan vokasi pada jalur pendidikan formal maupun pada jalur pendidikan nonformal. Pemerintah Provinsi juga harus siap dalam menghadapi perpindahan pengelolaan ini sehingga tidak berpengaruh pada kualitas belajar-mengajar. Adaptasi perpindahan pengelolaan lembaga pendidikan ini hendaknya juga diikutidengan komitmen peningkatan mutu oleh Pemda terhadap pengelolaan satuan pendidikan di wilayahnya.

Regulasi juga bisa menjadi tantangan dalam penyelenggaraan pendidikan vokasi. Misalnya dalam penyelenggaraan pendidikan, tidak ada standar magang yang jelas dalam penyelenggaraan pendidikan di Lembaga Kursus dan Pelatihan dan juga SMALB. Terlihat bahwa tidak ada standarisasi dalam pendidikan vokasi. Padahal, peserta didik di SMALB dan Lembaga Kursus dan Pelatihan juga membutuhkan magang untuk bisa merasakan praktik kerja secara langsung di Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI). Hal ini juga sangat berguna untuk pengembangan karakter peserta didik untuk siap masuk DUDI.

Untuk menjamin mutu pelaksanaan magang, diperlukan aturan tentang hal ini untuk menguatkan sistem dan mekanisme yang tepat dalam mengelola pembelajaran dengan praktik nyata di DUDI. Regulasi hendaknya bersifat teknis melalui peraturan menteri agar 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan dapat dicapai dalam pendidikan vokasi. Penetapan kompetensi dan sertifikasi nasional dilakukan oleh menteri atau pejabat lain yang mendapatkan mandat dan diatur oleh peraturan perundang-undangan. Begitu pula penetapan kompetensi tersebut mengacu kepada KKNI. Sayangnya, belum ada harmonisasi sertifikasi profesi dan kompetensi untuk Lembaga Pendidikan Vokasi, yaitu SMK dan Lembaga Kursus. Menurut UU Sisdiknas Pasal 21 ayat (3), gelar profesi hanya ditujukan untuk pendidikan tinggi. Namun, pada Pasal 61 dinyatakan bahwa "Sertifikat kompetensi diberikan oleh penyelenggara pendidikan dan lembaga pelatihan kepada peserta didik dan warga masyarakat sebagai pengakuan terhadap kompetensi untuk melakukan pekerjaan tertentu". Dengan demikian, diperlukan sinkronisasi peraturan tentang sertifikasi di SMK, SMALB, dan LKP.

Dalam penguatan dan pengarusutamaan pendidikan vokasi pada sekolah serta kursus dan pelatihan, perlu dibuat sistem dan mekanisme kegiatan magang yang efektif dan efisien. Setidaknya terdapat dua upaya yang dapat dilakukan untuk itu. Upaya pertama adalah dengan meningkatkan frekuensi pengiriman peserta didik untuk magang di industri secara bergelombang sepanjang tahun (misalnya dua kali setahun kalau magangnya dilaksanakan selama enam bulan) tidak hanya satu kali dalam setahun. Dengan cara ini baik sekolah maupun industri mendapat keuntungan. Keuntungan industri adalah dapat disusunnya rencana pemanfaatan SDM dengan baik, yaitu pemanfaatan karyawan pabrik dan peserta magang dalam proses produksi. Diasumsikan bahwa peserta magang tidak hanya menjadi penonton, tetapi juga menjadi bagian dalam proses produksi yang dimentori oleh karyawan tetapnya. Keuntungan sekolah dan lembaga kursus dan pelatihan adalah lebih besarnya peluang

melaksanakan magang. Tentu saja peserta didik peserta magang adalah peserta didik yang sudah memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang disyaratkan untuk melaksanakan magang di industri. Upaya ke dua adalah membangun *teaching factory* di sekolah. *Teaching factory* ini benar-benar merupakan sebuah pabrik atau tempat membuat produk (*factory*) yang dikelola oleh sekolah. Namun demikian, selain fungsi itu juga sekaligus menjadi tempat peserta didik mempraktikkan teori kejuruan yang dipelajari di kelas.

### C. Hasil Kajian dan Pembahasan

Dalam kaitan dengan efisiensi eksternal, peran dan fungsi pendidikan vokasi harus memiliki dampak dan pengaruh terhadap peningkatan kualitas hidup dan produktivitas kehidupan masyarakat di berbagai bidang kehidupan. Lembaga pendidikan, baik formal, nonformal, dan informal, dituntut mampu menyiapkan sumber daya manusia yang kompeten, berkarakter, dan profesional untuk memberikan daya dorong dan daya dukung terhadap kegiatan pembangunan di berbagai sektor usaha dan industri. Data statistik guru SMK dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Dari 7,56 juta total pengangguran terbuka, 20,76% berpendidikan SMK (BPS, 2015);
2. Hanya 22,3% guru SMK yang mengajar sesuai bidang keterampilan (Guru Produktif); pendidikan vokasi belum link-and-match dengan DUDI (dunia usaha/industri).

Di samping itu, fakta menunjukkan bahwa pendidikan vokasi belum *link-and-match* dengan DUDI (dunia usaha/industri). Fakta tersebut diduga karena dalam beberapa dekade terakhir SMK dikelola dan ditangani oleh pemerintah daerah kabupaten/kota. Revitalisasi pendidikan vokasi dapat memanfaatkan momentum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menegaskan bahwa pengelolaan SMK dikoordinasikan oleh pemerintah daerah provinsi. Pengalihan kewenangan ini diperkirakan dapat menajamkan ketepatan pemenuhan *supply-demand* tenaga kerja lintas kabupaten/kota.

Secara pragmatis, pendidikan vokasi harus mampu menyiapkan lulusan yang siap bekerja secara profesional dan/atau mampu berwirausaha untuk menggerakkan pembangunan bangsa menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Lulusan berbagai lembaga pendidikan akan menjadi angkatan kerja yang siap memasuki pasar tenaga kerja untuk mendukung proses pembangunan dan sekaligus memenuhi kebutuhan hidup dan kehidupannya.

Program Peningkatan Kompetensi Guru Pembelajar merupakan proses penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kemampuan dan kompetensi guru dalam melaksanakan tugas profesinya. Peningkatan kemampuan tersebut mencakup kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk perbaikan dan pertumbuhan kemampuan (*abilities*), sikap (*attitude*), dan keterampilan (*skill*). Kegiatan ini diharapkan akan menghasilkan suatu perubahan perilaku guru yang secara nyata perubahan perilaku tersebut berdampak pada peningkatan kinerja guru dalam proses belajar mengajar di kelas.

Program Peningkatan Kompetensi Guru Pembelajar merupakan salah satu cara

untuk memenuhi standar kompetensi guru sesuai dengan tuntutan profesi dan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Program Peningkatan Kompetensi Guru Pembelajar menjadi bagian penting yang harus selalu dilakukan secara terus menerus atau berkelanjutan untuk menjaga profesionalitas guru. Oleh karena itu, Program Peningkatan Kompetensi Guru Pembelajar harus dirancang untuk memberikan pengalaman baru dalam membantu meningkatkan kompetensi sesuai bidang tugasnya agar guru memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan meningkatkan sikap perilaku yang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan dengan baik sesuai dengan tanggung jawabnya.

Untuk memperoleh kompetensi sebagai Guru produktif, guru harus magang di Industri minimal 2 bulan dalam 2 Tahun, dan memiliki kompetensi keahlian sesuai dengan bidang keahlian yang diampunya. Kombinasi pembelajaran teori di ruang kelas dan perpustakaan (*theoretical learning*) dan pembelajaran praktik di lab (*practical learning*) dirancang sedemikian rupa dalam rangka menghasilkan lulusan dengan tingkat mutu tertentu yang siap memasuki dunia kerja. Keberhasilan pendidikan vokasi tidak hanya diukur dari segi mutunya saja, melainkan juga dari segi relevansinya. Hubungan mutu dan relevansi ibarat dua sisi dari satu keping mata uang. Mutu lulusan pendidikan vokasi dianggap relevan oleh para pengguna lulusan, yang dalam hal ini adalah sektor dunia usaha dan dunia industri (DUDI) apabila apa yang mereka dapatkan sama dengan atau lebih besar dari yang mereka harapkan. Kenyataan yang terjadi adalah sebaliknya. DUDI menilai bahwa lulusan pendidikan vokasi belum siap kerja, mereka *over qualified but under experience*. Berdasarkan pengalamannya, banyak *pre-rekrut* menghadapi dilema karena banyak pelamar yang memiliki potensi tinggi harus direlakan untuk tidak diseleksi lebih lanjut karena tidak memiliki pengalaman kerja yang relevan sebagaimana seringkali diminta oleh pengguna lulusan.

Kepala sekolah merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. Oleh karena itu, seorang kepala sekolah harus memiliki kualitas kinerja yang andal dan memiliki keunggulan. Untuk menjaring calon kepala sekolah yang berkualitas, PPPG lingkup kejuruan (sekarang PPPPTK lingkup kejuruan) pada anggaran 1994/1995 telah melaksanakan program penyiapan Kepala SMK melalui program *Talent Scouting*. Program *Talent Scouting* merupakan seperangkat kegiatan yang bertujuan untuk melakukan penelusuran bakat/seleksi calon kepala SMK yang diselenggarakan melalui tahapan sebagai berikut.

Keberhasilan pendidikan di sekolah sangat ditentukan oleh keberhasilan kepala sekolah dalam mengelola tenaga kependidikan yang tersedia di sekolah. Kepala sekolah merupakan salah satu komponen pendidikan yang berpengaruh dalam meningkatkan kinerja guru. Kepala sekolah bertanggung jawab atas penyelenggaraan kegiatan pendidikan, administrasi sekolah, pembinaan tenaga kependidikan lainnya, dan pendayagunaan serta pemeliharaan sarana dan prasarana. Hal tersebut menjadi lebih penting sejalan dengan semakin kompleksnya tuntutan tugas kepala sekolah, yang menghendaki dukungan kinerja yang semakin efektif dan efisien.

Kepala sekolah selaku supervisor pendidikan memiliki fungsi mengarahkan, membimbing, dan mengawasi seluruh kegiatan pendidikan dan kegiatan pembelajaran

yang dilaksanakan guru yang ditunjang oleh pegawai di sekolah. Kepala sekolah hendaknya melakukan observasi yang terus-menerus tentang kondisi-kondisi dan sikap-sikap di kelas, di ruangan guru, di ruang tata usaha, dan pada pertemuan-pertemuan staf pengajar. Tujuan hal tersebut adalah untuk memberikan bantuan pemecahan atas kesulitan-kesulitan yang dialami guru dan pegawai serta melakukan perbaikan-perbaikan baik langsung maupun tidak langsung mengenai kekurangan-kekurangannya, sehingga secara bertahap kualitas dan produktivitas kegiatan belajar mengajar yang dilakukan staf kepala sekolah, guru di kelas, kinerja wali kelas, dan pegawai tata usaha akan menjadi semakin baik secara berkelanjutan.

Tenaga kependidikan adalah tenaga/pegawai yang bekerja pada satuan pendidikan selain tenaga pendidik. Pasal 1 Ayat (5) Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 menyatakan bahwa tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Pasal 39 Ayat (1) UU Nomor 20 tahun 2003 menyatakan bahwa tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi pendidikan pada satuan pendidikan. Tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. Pasal 40 Ayat (2) UU Nomor 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa pendidik dan tenaga kependidikan berkewajiban (1) menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis; (2) mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan; dan (3) memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya. Karena pentingnya tenaga kependidikan, perlu mendapatkan perhatian untuk peningkatan kompetensi sehingga yang bersangkutan secara optimal dapat mendukung proses pembelajaran.

Pemenuhan guru produktif SMK dilakukan melalui kegiatan (1) penataan/pemerataan guru yang ada melalui alih tugas dan program keahlian ganda, (2) pengangkatan guru baru, serta (3) guru *outsourcing*. Pengangkatan guru baru dan *outsourcing* dilakukan apabila tidak ada kondisi kelebihan guru di satuan pendidikan yang dapat dialih tugaskan atau diikuti program keahlian ganda.

Alih tugas atau mutasi adalah pemindahan guru dari satuan pendidikan yang satu ke satuan pendidikan lainnya dengan tetap mengampu matapelajaran yang sama. Alih tugas/mutasi dapat dilakukan antar satuan pendidikan sejenis, antar jenis pendidikan, antar jenjang pendidikan, antar Kabupaten/Kota maupun antar Provinsi.

Alih tugas/mutasi guru antar satuan pendidikan sejenis adalah pemindahan guru dari satuan pendidikan ke satuan pendidikan sejenis dan sejenjang, misalkan dari SMA ke SMA, SMK ke SMK. Alih tugas/mutasi guru antar jenis pendidikan merupakan pemindahan guru dari satuan pendidikan SMA ke SMK atau sebaliknya. Alih tugas/mutasi antar jenjang pendidikan misalkan dari SMA ke SMP, dari SMK ke SMP. Alih tugas/mutasi antar Kabupaten/Kota dan antar Provinsi dilakukan apabila sekolah tempat guru dipindahkan berada di Kabupaten/Kota atau Provinsi lain. Pemerintah Provinsi sesuai dengan kewenangan menetapkan kriteria guru yang dipindah/alih tugaskan. Dalam menentukan kriteria tersebut, pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya perlu memprioritaskan/mempertimbangkan hal-hal berikut.

Pengelolaan SMK harus memenuhi: (1) kesesuaian mata pelajaran yang diampu dengan latar belakang pendidikan dan/atau sertifikat pendidikannya, (2) pemenuhan beban minimal tatap muka, (3) pemerataan mutu pendidikan, (4) akses/keterjangkauan (jarak, moda transportasi, waktu tempuh, dan (5) biaya .

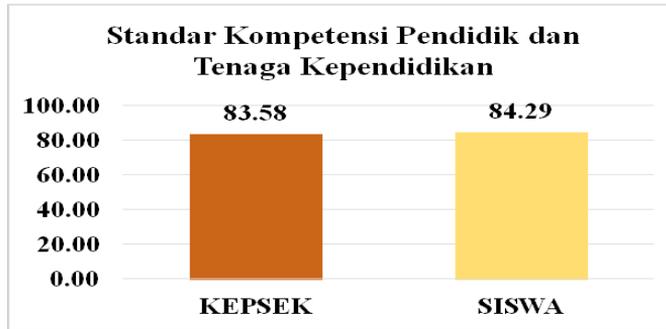
Pemerintah Provinsi/Daerah yang tidak menetapkan kriteria guru yang dipindah dapat mempertimbangkan hal-hal berikut (1) mempunyai sertifikat pendidik, tapi belum dapat memenuhi beban tatap muka minimal 24 jam per minggu, (2) atas permintaan sendiri, (3) memenuhi aspek pemerataan mutu pendidikan, (4) aksesibilitas tinggi ke satuan pendidikan baru; (5) dibutuhkan oleh satuan pendidikan di Kabupaten/Kota lain, (6) dapat diterima di satminkal yang baru, (7) tidak sedang mengemban tugas tambahan.

Pencapaian standar kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan menunjukkan bahwa dilihat dari rata-rata skor perolehan 13 kepala sekolah dan 65 siswa SMK standar kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan sudah melebihi batas minimum, yaitu 75 dari skala 0 sampai 100. Jadi baik menurut siswa maupun kepala sekolah, standar minimum kompetensi guru telah tercapai. Bila diperhatikan besarnya simpangan baku, untuk interval kepercayaan 68 %, skor batas bawah responden kepala sekolah adalah  $83,58 - 3(1) 7,52 = 76,06$  sampai dengan 91,1, sedang untuk responden siswa, rentang skornya adalah 73,78 dan 79,06. Jadi menurut siswa ada tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memiliki kompetensi minimal. Adapun deskripsi hasil standar kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan dirangkum pada Tabel 14.

**Tabel 14. Deskripsi Hasil Standar Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan**

<b>Responden</b>	<b>N</b>	<b>Minimum</b>	<b>Maksimum</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Rata-rata</b>	<b>SD</b>
KEPSEK	13	71,15	100	1.086,52	83,58	7,52
SISWA	65	57,14	100	5.478,62	84,29	10,51

Gambar 24 menunjukkan secara keseluruhan standar kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan telah melampaui kriteria ketuntasan minimal (KKM) sebesar 75. Rata-rata skor perolehan siswa lebih tinggi dibandingkan skor perolehan kepala sekolah. Namun, rata-rata dari skor perolehan Kepala sekolah sudah mencapai kriteria ketuntasan minimal yakni sebesar 83,58. Hal ini dapat diartikan bahwa standar kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan baik ditinjau dari kepala sekolah maupun siswa telah mencapai kriteria ketuntasan minimal. Berikut disajikan pencapaian Standar Kompetensi Lulusan dalam bentuk diagram ditinjau dari rerata tiap responden pada Gambar 24 di bawah ini.



Gambar 24. Pencapaian Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan berdasarkan analisis item instrumen

### 1. Menurut Kepala Sekolah & Responden Kepala Sekolah

Hampir semua sekolah memiliki kekurangan dalam memenuhi standar pendidik dan tenaga kependidikan, dan hanya SMK N 2 Yogyakarta dengan kompetensi keahlian Teknik Komputer dan Jaringan dan SMK N 2 Trucuk dengan kompetensi keahlian Agribisnis Tanaman Pangan dan Holtikultura yang memenuhi semua kriteria seperti pada instrumen. Bila dilihat lebih rinci pada item instrumen, terungkap bahwa yang sebagian SMK memiliki respon yang masuk kategori rendah, yaitu pada pilihan 2 dari empat pilihan. Kompetensi yang tergolong rendah pada 4 (empat) SMK adalah menyusun *hand-out* dan *jobsheet* (lembar kerja). Hal ini kemungkinan guru sudah menerima *hand-out & jobsheet* dari pusat, sehingga mereka tidak perlu menyusun lagi. *Handout* digunakan untuk mengajar teori di kelas, sedang *jobsheet* digunakan untuk mengajar di bengkel. Bila peralatan semua kompetensi keahlian di semua SMK sama, maka *jobsheet* bisa dalam bentuk dan isi yang sama. Namun semua SMK untuk kompetensi keahlian yang sama memiliki peralatan yang sama, sehingga *jobsheet* yang digunakan tentu tidak sama. Untuk itu guru atau pendidik harus menyusun *jobsheet* sesuai dengan peralatan yang dimilikinya, walau tujuan praktek sama.

Item yang tergolong rendah pada tiga SMK adalah penerapan pembelajaran sistem blok. Penerapan pembelajaran sistem blok adalah untuk mengatasi pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan (PKL). Jumlah siswa yang banyak sulit untuk memperoleh tempat Praktek Kerja Lapangan secara bersamaan. Untuk itu digunakan pembelajaran sistem blok, pada waktu yang bersamaan sebagian siswa mengikuti PKL dan sebagian siswa mengikuti pembelajaran. Pada semester berikutnya atau sesi berikutnya dibalik, siswa yang selesai mengikuti PKL mengikuti pembelajaran di sekolah, sedang yang tadinya mengikuti pembelajaran di sekolah mengikuti PKL. Lamanya PKL sekitar 3 (tiga) bulan, sehingga mata pelajaran dikemas untuk diajarkan selama tiga bulan pembelajaran, yaitu sistem blok.

Tiga bulan ini dinamakan blok, sehingga pembelajarannya dinamakan sistem blok. Jadi pada semester yang sama ada siswa yang praktek kerja

lapangan dan ada yang mengikuti kuliah. Pola ini bisa berjalan bila semua siswa memiliki motivasi untuk PKL dengan segala persyaratannya. Pembelajaran pada SMK perlu dievaluasi sistem yang tepat karena berbeda dengan SMA. Peralatan praktek untuk SMK sebagian mahal dan jumlahnya juga tidak banyak, sehingga penggunaannya tidak bisa paralel, tetapi secara seri. Kondisi ini yang mendorong pembelajaran dengan sistem blok.

**Tabel 15. Hasil Analisis Item Instrumen Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan**

No	Nama Sekolah	Kompetensi Keahlian	Item yang Rendah
1	SMK N 6 Bandung	Teknik Gambar Bangunan Teknik Pemesinan	Melakukan kajian ilmiah dan penelitian
2	SMK N 2 Yogyakarta	Teknik Komputer dan Jaringan	Tidak ada
3	SMK N 3 Denpasar	Akomodasi dan Perhotelan	Menyusun Ho/Jobsheet Melakukan kajian ilmiah dan penelitian Mengembangkan materi pembelajaran
4	SMK N 1 Depok	Akuntansi & Keuangan Lembaga	Kegiatan kajian ilmiah dan penelitian
5	SMK N 8 Makassar	Usaha Perjalanan dan Wisata	Menyusun Ho/Jobsheet Melakukan kajian ilmiah dan penelitian Mengembangkan materi pembelajaran
6	SMK N 1 Semarang	Teknik Instalasi dan Pemanfaatan Tenaga Listrik	Menerapkan pembelajaran sistem blok
7	SMK N 8 Surakarta	Seni Kerawitan	Menyusun Ho/Jobsheet Melakukan kajian ilmiah dan penelitian Mengembangkan materi pembelajaran
8	SMK N 1 Trucuk	Agribisnis Tanaman Pangan dan Holtikultura	Ok
9	SMK N 9 Makassar	Teknologi Penangkapan Ikan	Menyusun Ho/Jobsheet Mengembangkan karya inovatif
10	SMK N 3 Surabaya	Teknik Audio dan Video	Melakukan pembelajaran sistem blok Mengembangkan karya inovatif
11	SMK N 7 Bandung	Kimia Analis/Kimia Industri	Menyusun Ho/Jobsheet Menerapkan pendekatan sistem proyek Melakukan kegiatan kajian ilmiah dan penelitian

Selanjutnya item yang rendah pada sebagian SMK adalah melakukan kajian ilmiah melalui karya ilmiah bidang kejuruan. Hal ini dimaksudkan agar guru melakukan kajian-kajian perkembangan pada bidang keahliannya dan melakukan penelitian ilmiah pada bidangnya. Perkembangan pada bidang teknologi demikian pesat bila guru tidak mengikuti perkembangan maka akan tertinggal atau tidak dipakai atau jarang dipakai. Selain pendidik itu juga harus dilatih melakukan penelitian di kelasnya. Semua guru harus dimotivasi untuk melakukan penelitian tindakan kelas, di tempat ia bertugas. Pada tahap awal, perguruan tinggi yang bertugas sebagai Lembaga Pendidikan Tenaga Pendidik memberi pelatihan dan membantu guru melaksanakan penelitian tindakan kelas sebagai program pengabdian pada masyarakat. Lambat laun guru diberdayakan untuk melakukan penelitian tindakan kelas secara mandiri.

Selanjutnya hasil penelitian ditulis menjadi artikel untuk dimuat di jurnal yang bisa digunakan untuk kenaikan jabatan. Masalah berikutnya adalah penyusunan *handout jobsheet* masih jarang dilakukan guru. Hal ini kemungkinan kemampuan sebagian pendidik dalam menyusun *handout* dan *jobsheet* masih rendah. *Hand out* sangat diperlukan dalam melaksanakan pembelajaran di kelas, sedang *jobsheet* sangat diperlukan dalam melaksanakan pembelajaran di bengkel. Untuk itu perlu penyegaran kembali bagi guru melalui pelatihan penyusunan *hand-out* dan penyusunan *jobsheet*.

Kompetensi berikutnya yang tampak kurang untuk adalah melakukan pengembangan karya inovatif dan produktif untuk mencapai tujuan. Karya inovatif dan produktif sangat diperlukan untuk semua kompetensi keahlian di sekolah kejuruan. Untuk melaksanakannya diperlukan pendidik yang memiliki kompetensi inovatif dan produktif. Kompetensi ini dapat diperoleh melalui pengalaman belajar di perguruan tinggi atau di lembaga pendidikan dan pelatihan. Untuk itu perlu ditelusuri lebih dalam untuk mengetahui penentu kemampuan melakukan.

Kompetensi berikutnya yang belum tuntas pada semua SMK sampel adalah menerapkan pendekatan *project work* dalam proses pembelajaran. *Project work* pada dasarnya pekerjaan-pekerjaan atau tugas-tugas untuk memecahkan masalah yang ada di lapangan. Pendekatan ini pada umumnya diterapkan pada pembelajaran praktek di bengkel. Tahap awal untuk pembelajaran yang menghasilkan karya inovatif dan produktif. melaksanakan pembelajaran.

Melalui pendekatan *project work* adalah menentukan masalah. Masalah diperoleh melalui pengamatan di lapangan atau survei lapangan. *Project work* umumnya dilakukan oleh tim yang terdiri sekitar 3 orang. Pada pelaksanaan pembelajaran dengan pendekatan ini dapat dilakukan penilaian tidak saja pada aspek kognitif dan psikomotor saja, tetapi unsur *soft skill*, seperti kinerja, kerjasama, keuletan, dan semangat kerja bisa dinilai.

Kompetensi menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) pada semua SMK sample telah mencapai standar, maksudnya semua pendidik mampu menyusun. Hal ini kemungkinan disebabkan para pendidik telah berpengalaman dan melakukan secara rutin, serta ada dorongan dari sekolah.

## **2. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Menurut Guru**

Menurut semua guru beban mengajar tiap minggu adalah minimal 38 jam dengan minggu efektif sebanyak 34 minggu dalam setahun. Kemudian pertimbangan hampir semua sekolah dalam menyusun kurikulum muatan lokal adalah kebutuhan daerah dan usia peserta didik dan hampir semua sekolah melibatkan guru dalam mengembangkan kurikulum muatan lokal. Informasi ini menunjukkan guru-guru SMK terlibat dalam penyusunan kurikulum muatan local dan ini berarti guru-guru memiliki kompetensi dalam menyusun kurikulum, dan tentunya beserta rencana pembelajarannya.

Selanjutnya sebagian besar guru dilibatkan dalam pembahasan program bimbingan dan konseling di sekolah. Kegiatan yang diikuti para guru terbanyak

pada kegiatan evaluasi program bimbingan konseling, diikuti kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan tindak lanjut. Jadi guru guru SMK terlibat dalam menyusun dan mengevaluasi program bimbingan dan konseling. Program ini meliputi bimbingan karir, bimbingan belajar, dan bimbingan yang berkaitan dengan masalah pribadi.

Guru berasal dari SMK Negeri 1 Semarang, SMK Negeri 2 Yogyakarta, dan SMK Negeri 8 Surakarta yang terbanyak terlibat dalam pengembangan kurikulum muatan lokal dan penyusunan program bimbingan dan konseling. Implikasinya adalah guru-guru pada ketiga sekolah tersebut memiliki pengalaman dalam bidang tersebut, sehingga kompetensi guru dalam bidang tersebut meningkat.

### 3. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Menurut Peserta Didik

**Tabel 16. Hasil analisis item tiap kompetensi keahlian sekolah**

No	Nama Sekolah	Kompetensi Keahlian	Item yang rendah
1	SMK N 6 Bandung	Teknik Gambar Bangunan Teknik Pemesinan	Menggunakan pembelajaran sistem blok Menghasilkan barang dan atau jasa sesuai dengan standar dunia kerja Memotivasi siswa dealam proses pembelajaran
2	SMK N 2 Yogyakarta	Teknik Komputer dan Jaringan	Memotivasi siswa dealam proses pembelajaran
3	SMK N 3 Denpasar	Akomodasi Perhotelan	Menggunakan pembelajaran sistem blok Membekali siswa kemampuan memproduksi barang atau jasa Menghasilkan barang atau jasa.
4	SMK N 1 Depok	Akuntansi & Keuangan Lembaga	Menghasilkan barang atau jasa sesuai standar dunia kerja
5	SMK N 8 Makassar	Usaha Perjalanan dan Wisata	Membekali siswa kemampuan memproduksi barang atau jasa
6	SMK N 1 Semarang	Teknik Instalasi dan Pemanfaatan Tenaga Listrik	Membekali siswa kemampuan memproduksi barang atau jasa
7	SMK N 8 Surakarta	Seni Karawitan	Menggunakan media pembelajaran sesuai dengan materi pembelajaran Menumbuhkan kembangkan karakter, budaya dan etos kerja Membekali siswa dalam penguasaan kompetensi Menggunakan strategi pembelajaran dengan sistem blok Menghasilkan barang atau jasa
8	SMK N 1 Trucuk	Agribisnis Tanaman Pangan dan Holtikultura	Semua tercapai

No	Nama Sekolah	Kompetensi Keahlian	Item yang rendah
9	SMK N 9 Makassar	Teknologi Penangkapan Ikan	Menggunakan strategi pembelajaran dengan sistem blok
10	SMK N 3 Surabaya	Teknik Audi dan Video	Semua standar terpenuhi
11	SMK N 7 Bandung	Kimia Analis/Kimia Industri	Menghasilkan barang atau jasa sesuai standar dunia kerja Menggunakan strategi pembelajaran dengan sistem blok Memotivasi siswa dealam proses pembelajaran

Berdasarkan hasil analisis item seperti ditampilkan pada Tabel 16, secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut.

SMK N 6 Bandung dengan sampel kompetensi keahlian Teknik Gambar Bangunan dan Teknik Pemesinan diperoleh informasi bahwa: Sekolah belum menggunakan pendekatan pembelajaran dengan sistem blok, belum menghasilkan barang atau jasa seperti yang diharapkan, dan belum memotivasi siswa dalam proses untuk berkarya secara optimal. Selanjutnya SMK N 2 Yogyakarta dengan kompetensi Teknik Komputer dan Jaringan memiliki kekurangan dalam memotivasi siswa dalam pembelajaran secara optimal.

SMK N 3 Denpasar dengan program keahlian Akomodasi Perhotelan belum menggunakan sistem pembelajaran dengan sistem blok, dan belum membekali siswa kemampuan memproduksi barang atau jasa. Kemudian SMK N 1 Depok dengan kompetensi keahlian Akuntansi & Keuangan Lembaga memiliki kelemahan pada kompetensi menghasilkan barang atau jasa sesuai standar dunia kerja. SMK N 8 Makassar dengan kompetensi keahlian Usaha Perjalanan dan Wisata menurut siswa belum membekali siswa kemampuan memproduksi barang atau jasa. Kemudian SMK N 1 Semarang dengan kompetensi keahlian Teknik Instalasi dan Pemanfaatan Tenaga Listrik belum membekali siswa kemampuan memproduksi barang atau jasa.

SMK N 8 Surakarta dengan program keahlian Seni Karawitan memiliki keterbatasan seperti berikut ini:

- a. Menggunakan media pembelajaran sesuai dengan materi pembelajaran
- b. Menumbuhkan kembangkan karakter, budaya dan etos kerja
- c. Membekali siswa dalam penguasaan kompetensi
- d. Menggunakan strategi pembelajaran dengan sistem blok
- e. Menghasilkan barang atau jasa

SMK N 1 Trucuk dengan program keahlian Agribisnis Tanaman Pangan dan Holtikultura semua pendidik dan tenaga kependidikan telah memiliki kompetensi yang dipersyaratkan. SMK N 9 Makassar dengan kompetensi keahlian Teknologi Penangkapan Ikan, belum semua guru menggunakan strategi pembelajaran dengan sistem blok. SMK N 3 Surabaya dengan kompetensi keahlian Teknik Audi dan Video, semua standar terpenuhi. Demikian pula

SMK N 7 Bandung dengan kompetensi keahlian Kimia Analis/Kimia Industri, semua pendidik telah memiliki kompetensi yang dipersyaratkan.

## D. Kesimpulan

Secara keseluruhan simpulan studi ini yang penting adalah sebagai berikut.

1. Belum semua guru produktif memiliki pengalaman kerja di dunia usaha dan dunia industri.
2. Kerja sama industri belum terjalin dengan baik.
3. Pembelajaran sistem blok belum dilaksanakan oleh semua sekolah.
4. Kemampuan meneliti guru masih tergolong rendah.
5. Kemampuan menulis karya ilmiah guru masih rendah.
6. Penyusunan handout dan jobsheet belum dilaksanakan dengan baik oleh sebagian guru
7. Sebagian guru kurang memotivasi siswa untuk belajar.
8. Sebagian guru kurang memberi kesempatan siswa untuk menghasilkan karya kreatif.
9. Sebagian guru tidak mendorong siswa untuk menghasilkan karya inovatif - kreatif.
10. Belum semua guru menerapkan pembelajaran dengan pendekatan kerja proyek.
11. Belum semua guru mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknik.

## E. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan studi ini maka direkomendasikan sebagai berikut.

1. Tiap SMK mendata semua guru yang belum memiliki pengalaman kerja industri minimal 2 bulan.
2. Tiap SMK menyusun program magang di dunia usaha dan industri bagi guru-guru produktif yang belum memiliki kerja di dunia usaha dan industri.
3. Guru-guru produktif yang akan mengikuti program magang harus memiliki keterampilan dasar untuk kerja di industri..
4. SMK menguji ketrampilan dasar yang dimiliki oleh guru-guru produktif bagi yang akan mengikuti program magang.
5. Pelaksanaan program magang harus saling menguntungkan: guru memperoleh ketrampilan produktif, sedang industri memperoleh tenaga kerja yang murah. Hal ainti terjadi bila pada bulan pertama guru magang untuk memperoleh ketrampilan produktif, namun pada bulan ke dua guru bekerja sebagai karyawan industri.
6. SMK melakukan supervisi bagi guru-guru yang mengikuti program magang.
7. SMK menyusun program untuk peningkatan kinerja guru dalam bidang berikut ini.
  - a. Penelitian tindakan kelas

# STANDAR SARANA DAN PRASARANA

## A. Pendahuluan

Peningkatan mutu pendidikan harus menyentuh semua komponen yang terkait di dalamnya. Dengan kata lain, peningkatan mutu pendidikan harus dilakukan secara sistemik dan sistematis. Secara sistemik, artinya bahwa peningkatan kualitas tersebut harus menyentuh semua komponen sistem, yang meliputi: (1) peningkatan kualitas manajemen sekolah; (2) peningkatan kualitas proses dan hasil belajar; (3) peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan; (4) peningkatan kualitas fisik dan penampilan sekolah; dan (5) peningkatan kualitas partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan. Sedangkan secara sistematis, berarti bahwa pengadaan, pengembangan, penggunaan dan pemeliharaan serta perawatan pada masing-masing komponen tersebut perlu dilakukan berdasarkan perencanaan yang matang sehingga tepat sasaran.

Peningkatan mutu pendidikan tidak dapat dilepaskan dari pendayagunaan sarana dan prasarana pendidikan yang tersedia di sekolah secara optimal. Ketersediaan sarana



dan prasarana pendidikan yang berupa ruang belajar, ruang penunjang dan sarana pendidikan yang memadai diharapkan akan dapat meningkatkan mutu pendidikan. Untuk itu, maka penyediaan, pemanfaatan, pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana pendidikan perlu dilakukan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari kegiatan manajemen sekolah.

Selain itu, sebagai tindak lanjut dari program pengadaan sarana dan prasarana pendidikan, perlu dilakukan pendayagunaan sarana dan prasarana yang tersedia secara optimal, baik yang menyangkut: penggunaan atau pemanfaatan sarana dan prasarana sesuai dengan fungsinya, pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana yang ada agar tetap terjaga kehandalan dan tetap layak fungsi serta pengelolaan yang terkait dengan penggunaan, pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana yang tersedia secara tepat.

## **B. Standar dan Peraturan**

Dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 35, ayat (1) disebutkan bahwa Standar Nasional Pendidikan terdiri atas standar isi, proses, kompetensi lulusan, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan, yang harus ditingkatkan secara berencana dan berkala. Standar sarana dan prasarana adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan kriteria minimal tentang ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan berekreasi, serta sumber belajar lain, yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.

Sarana dan prasarana pendidikan merupakan salah satu Standar Nasional Pendidikan yang harus dipenuhi oleh penyelenggara satuan pendidikan, sehingga melengkapi sarana dan prasarana merupakan hal yang mutlak. Hal tersebut adalah sesuai dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 45, ayat (1), yang berbunyi: "Setiap satuan pendidikan formal dan nonformal menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik. Hal tersebut juga diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, sebagaimana diperbaiki dengan PP 32 Tahun 2013, Bab VII, pasal 42, ayat (1) bahwa "Setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. Sedangkan untuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), standar sarana dan prasarana untuk satu SMK/MAK harus memiliki sarana dan prasarana yang mampu melayani minimum 3 rombongan belajar dan maksimum 48 rombongan belajar.

Selanjutnya, tiga poin tentang filosofi pendidikan kejuruan yang dikemukakan oleh Charles Prosser dalam *Vocational Education in Democracy* (Camp and Hillison, 1984: 15 - 16), yang terkait dengan pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan di SMK menyatakan bahwa:

- a. Pendidikan kejuruan akan efisien apabila disediakan lingkungan yang sesuai dengan kondisi nyata di mana lulusan akan bekerja. Hal ini dapat diartikan bahwa agar pendidikan di SMK efektif dan efisien, maka sekolah harus menyediakan sarana dan prasarana serta menciptakan lingkungan belajar yang sesuai dengan kondisi tempat kerja di mana kelak lulusan akan bekerja.
- b. Latihan kejuruan akan efektif apabila diberikan tugas atau program sesuai dengan apa yang akan dikerjakan lulusan kelak. Demikian pula, fasilitas atau peralatan beserta proses kerja dan operasionalnya juga dibuat sama dengan kondisi kerja nantinya. Hal ini berarti bahwa agar pendidikan di SMK efektif dan efisien, maka sekolah berkewajiban menyediakan sarana dan prasarana pembelajaran yang memungkinkan pemberian tugas yang sesuai dengan pekerjaan yang akan dikerjakan lulusan kelak.
- c. Pendidikan kejuruan akan efektif, bilamana dalam latihan kerja atau dalam pengerjaan tugas-tugas sudah dibiasakan seperti pada kondisi yang sebenarnya. Demikian pula, poin ini juga menegaskan bahwa sekolah berkewajiban menyediakan sarana dan prasarana pembelajaran yang memungkinkan pemberian tugas yang sesuai dengan pekerjaan yang akan dikerjakan lulusan kelak.

Sementara itu, dalam arah kebijakan revitalisasi SMK telah diberikan beberapa alternatif untuk meningkatkan mutu pendidikan di SMK, khususnya yang terkait dengan pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan, yaitu sebagai berikut.

## 1. Pelibatan Dunia Usaha dan Dunia Industri

Idealnya, pendidikan kejuruan menekankan pada pendidikan yang mampu menyesuaikan dengan: (1) permintaan pasar (*demand driven*); (2) kebersambungan (*link*) antara pengguna lulusan pendidikan dan penyelenggara pendidikan kejuruan; dan (3) kecocokan (*match*) antara kompetensi calon tenaga kerja (*employee*) dengan kebutuhan pengusaha (*employer*). Oleh karena itu, ukuran keberhasilan penyelenggaraan pendidikan kejuruan dapat dilihat dari tingkat mutu dan relevansi, yaitu jumlah penyerapan lulusan dan kesesuaian bidang pekerjaan dengan bidang keahlian yang dipelajari di SMK.

Kerjasama lembaga pendidikan kejuruan dengan DU/DI, dapat diwujudkan tidak sekedar sebagai tempat praktik, dan sebagai tempat magang untuk menambah wawasan tentang dunia kerja kepada peserta didiknya, tetapi juga dapat difungsikan untuk meningkatkan mutu pembelajaran di SMK dalam hal berikut.

- a. Dunia Usaha dan Industri sebagai Tempat Praktik Peserta Didik

Banyak satuan pendidikan kejuruan yang tidak memiliki sarana dan prasarana, peralatan dan fasilitas praktik yang memadai untuk melaksanakan praktik keahlian, agar lulusan mencapai standar kompetensi yang disyaratkan. Akibatnya, industri harus mengadakan pelatihan tambahan untuk menyiapkan tenaga kerjanya, pihak industri harus mengalokasikan biaya ekstra di luar biaya produksi.

Disparitas yang terjadi antara kemampuan yang dibutuhkan di dunia kerja dan kompetensi lulusan yang dihasilkan oleh satuan pendidikan

kejuruan, terutama yang diakibatkan oleh kesenjangan tingkat kelengkapan dan kemutakhiran sarana dan prasarana, merupakan permasalahan yang tak pernah selesai. Sebenarnya, pihak sekolah maupun pihak industri memiliki keterbatasan masing-masing dalam membentuk dan mendapatkan tenaga kerja yang siap pakai. Pihak sekolah memiliki keterbatasan dalam pembiayaan dan penyediaan sarana dan prasarana pembelajaran, termasuk fasilitas pelaksanaan praktik, sedangkan pihak DU/DI memiliki keterbatasan sumber daya pendidikan untuk membentuk tenaga kerja yang dibutuhkan. Oleh karena itu, keterlibatan DU/DI sebagai tempat praktik peserta didik menjadi salah satu solusi untuk mengurangi disparitas sarana dan prasarana pendidikan yang terjadi, sehingga mampu memenuhi kriteria minimal atau standar sarana dan prasarana, untuk menciptakan kemampuan kerja para lulusan SMK yang adaptif dan sesuai dengan dunia kerja.

Kegiatan praktik kerja di dunia kerja, yang dikenal dengan istilah praktik kerja industri (dalam istilah sekarang Praktik Kerja Lapangan atau PKL), memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk memanfaatkan sarana dan prasarana pelatihan yang dimiliki oleh DU/DI, yang sekaligus juga akan memperoleh kompetensi yang tidak didapatkan di sekolah, memperoleh pengetahuan tentang perkembangan yang terjadi di DU/DI, dan wawasan tentang dunia kerja.

b. Dunia Usaha dan Industri sebagai Tempat Magang Kerja

Sistem magang merupakan sistem yang cukup efektif untuk mendidik dan menyiapkan seseorang untuk memperdalam dan menguasai keterampilan yang lebih rumit yang tidak mungkin atau tidak pernah diberikan melalui pendidikan massal di sekolah. Dalam sistem magang seseorang yang belum ahli (*novices*) belajar dengan orang yang telah ahli (*expert*) dalam bidang kejuruan tertentu. Sistem magang kerja di DU/DI memberikan pengalaman langsung bagi para peserta didik mengenai kegiatan bekerja langsung pada pekerjaan yang sesungguhnya, dengan tujuan untuk menguasai kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan DU/DI, serta memahami budaya kerja, sikap profesional yang diperlukan, budaya mutu, dan pelayanan konsumen.

Oleh karena itu, siswa SMK peserta magang kerja akan diberikan kesempatan untuk memanfaatkan sarana dan prasarana atau fasilitas kerja yang dimiliki DU/DI untuk mengembangkan kompetensinya yang sesuai dengan kebutuhan DU/DI. Dalam hal ini, keterlibatan DU/DI sebagai tempat magang kerja bagi peserta didik SMK juga dapat menjadi salah satu solusi untuk mengurangi disparitas sarana dan prasarana pendidikan yang terjadi, sehingga mampu memenuhi kriteria minimal atau standar sarana dan prasarana, untuk menciptakan kemampuan kerja para lulusan SMK yang adaptif dan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.

c. Penyelarasan Kurikulum

Penyelarasan kurikulum SMK perlu dilakukan secara periodik dengan

melibatkan penggunaan lulusan. Penyelarasan adalah mempertemukan antara sisi pasokan (*supply*) dan sisi permintaan (*demand*) yang mencakup beberapa dimensi, yaitu kualitas, kompetensi, kuantitas, lokasi dan waktu.

Salah satu strategi untuk memastikan agar kurikulum SMK dapat selaras dan memenuhi kebutuhan DU/DI adalah model *dual system*. *Dual system* pada pendidikan kejuruan merupakan suatu bentuk penyelenggaraan pendidikan keahlian profesional yang memadukan secara sistematis dan sinkron program pendidikan di sekolah dan program penguasaan keahlian yang diperoleh melalui kegiatan bekerja langsung di dunia kerja, terarah untuk mencapai suatu tingkat keahlian profesional tertentu.

Tujuan utama *dual system* adalah untuk menjamin keberlanjutan keterserapan tenaga kerja pada pasar kerja sesuai dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan DU/DI. Secara umum, struktur *dual system* meliputi: (1) kurikulum harus dirancang dengan berorientasi pada penggabungan antara *instruction* dan *construction* sehingga pendekatan utama dalam pembelajaran mengacu pada fase pembelajaran di sekolah dan praktik/pelatihan di DU/DI; dan (2) kegiatan praktik kerja, dilaksanakan menggunakan sistem blok pembelajaran yang dapat disesuaikan dengan tahapan pekerjaan di DU/DI.

Penyelarasan kurikulum juga menyangkut pengorganisasian pembelajaran praktik baik yang dilakukan di SMK maupun DU/DI pasangan, yang dapat diatur sebagai berikut:

- 1) *Tahun Pertama*, adalah Praktik Keterampilan Kejuruan yang merupakan bagian dari rencana pembelajaran kejuruan tingkat dasar yang dilaksanakan di Ruang Praktik Sekolah. Pada tahap ini, peserta didik di SMK dilayani dan memanfaatkan sarana dan prasarana praktik kerja yang dimiliki oleh sekolah. Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pembelajaran praktik pada tahap Praktik Keterampilan Dasar pada umumnya belum terlalu sulit untuk dipenuhi oleh pihak sekolah, karena masih berupa peralatan sederhana (peralatan tangan/manual) yang digunakan untuk melatih keterampilan motorik dasar.
- 2) *Tahun Kedua*, adalah Praktik Kompetensi Kerja untuk 6 bulan pertama, dan Praktik Realisasi Produk untuk 6 bulan kedua. Praktik kompetensi kerja dilakukan di Ruang Praktik Sekolah, sedangkan Praktik Realisasi Produk dapat dilakukan di Unit Produksi dan Jasa (UPJ) ataupun *Teaching Factory*. Pada pelaksanaan Praktik Kompetensi Kerja, biasanya sudah mulai menerapkan peralatan yang lebih kompleks, seperti misalnya penggunaan mesin-mesin, dsb. yang produknya berupa komponen yang siap dirakit. Sementara itu, pada Praktik Realisasi Produk, job yang dikerjakan sudah merupakan benda kerja yang sebenarnya, baik ukuran maupun standar kualitasnya. Oleh karena itu, praktik ini hanya dapat dilakukan pada *Teaching Factory*, yang merupakan "*Factory to Classroom*" atau kelas industri di SMK

ataupun kegiatan rintisan *Teaching Factory*, yang berupa Unit Produksi dan Jasa (UPJ) yang ada di SMK.

- 3) *Tahun Ketiga*, adalah Praktik Magang Industri pada 6 bulan pertama, yang diikuti dengan Pelaksanaan UN, dan Sertifikasi Kompetensi, pada 6 bulan kedua. Praktik Magang Industri atau Praktik Kerja Lapangan (PKL) dilakukan di Industri/Dunia Kerja, yang difokuskan pada spesialisasi keterampilan khusus dari suatu bidang keahlian dan yang secara khusus diperlukan oleh tempat kerja. Pada tahun ketiga 6 bulan pertama, peserta didik sepenuhnya akan memanfaatkan sarana dan prasarana kerja yang dimiliki oleh DU/DI tempat mereka PKL, atau sarana dan prasarana *Teaching Factory* yang telah dimiliki sekolah. Sementara itu, tahap Sertifikasi Kompetensi dapat dilakukan di DU/DI, *Teaching Factory*, atau SMK yang telah memiliki Tempat Uji Kompetensi (TUK).

## C. Hasil Kajian dan Pembahasan

Evaluasi tata kelola SMK yang berkaitan dengan pemenuhan standar sarana dan prasarana, dilakukan dengan responden Kepala Sekolah, atau Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana Prasarana dengan menggunakan angket. Responden terdiri atas 13 orang Kepala Sekolah, atau diwakili oleh Wakasek Bidang Sarpras di SMK. Data mengenai pencapaian standar sarana dan prasarana pendidikan di SMK sampel, yang ditunjukkan oleh skor rata-rata perolehan dari semua responden tersebut, disajikan pada Tabel 17 berikut.

**Tabel 17. Deskripsi Nilai Rata-rata Pemenuhan Standar Sarana dan Prasarana**

Responden	N	Minimum	Maksimum	Jumlah	Rata-rata	SD
KEPSEK	13	52,50	91,75	937,70	72,13	12,24

Tabel 17 menunjukkan bahwa dilihat dari nilai reratanya maka kondisi sarana dan prasarana di SMK yang menjadi sampel penelitian masih belum mencapai kriteria minimal, yakni dengan skor sebesar 75. Sementara itu, jika dicermati berdasarkan nilai standar deviasinya, menunjukkan bahwa kondisi dan kelengkapan sarana dan prasarana pada sekolah-sekolah sampel masih cukup variatif. Selanjutnya, secara lebih detail disajikan beberapa SMK yang memiliki sarana dan prasarananya yang masih dibawah standar minimal, atau bahkan sangat kurang atau masih jauh dari kriteria minimal, yaitu dengan skor capaian 75. Adapun beberapa SMK tersebut adalah sebagaimana disajikan pada Tabel 18 berikut.

**Tabel 18. Kondisi Sarana dan Prasarana SMK**

<b>NAMA SEKOLAH</b>	<b>KOMPETENSI KEAHLIAN</b>	<b>SKOR CAPAIAN</b>	<b>PERSENTASE (%)</b>
SMK NEGERI 3 DENPASAR	AKOMODASI PERHOTELAN	47.32	71.75
SMK NEGERI 8 MAKASAR	PARIWISATA	45.54	71.00
SMK NEGERI 6 BANDUNG	PERMESINAN	45.54	63.53
SMK NEGERI 9 MAKASAR	NKPI	49.11	48.25

Berdasarkan data pada Tabel 18 di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa SMK yang kondisi sarana dan prasarana masih di bawah standar minimal, yaitu: (1) SMKN 3 Denpasar, untuk kompetensi keahlian Akomodasi Perhotelan, (2) SMKN 8 Makassar, untuk kompetensi keahlian Pariwisata, (3) SMKN 6 Bandung, untuk kompetensi keahlian Permesinan, dan (4) SMKN 9 Makassar, untuk kompetensi keahlian Nautika Kapal Penangkapan Ikan (NKPI). Sementara itu, tiga belas SMK lainnya, kondisi sarana dan prasarannya telah memenuhi kriteria minimal, atau memiliki capaian skor  $\geq 75$ .

Hasil observasi ke sekolah sampel menunjukkan bahwa pada sekolah-sekolah yang kondisi sarana dan prasarana kurang, bukan semata-mata tingkat ketersediaannya yang rendah, akan tetapi juga disebabkan oleh rendahnya pendayagunaan, pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana yang tersedia di sekolah. Sebagai implikasinya adalah bahwa sarana dan prasarana yang tersedia di sekolah tersebut kurang dimanfaatkan secara optimal, memiliki nilai *use-factor* atau keberfungsian yang rendah, sehingga cepat menurun dari segi kelayakan fungsinya, dan cenderung cepat rusak.

Pemanfaatan, pendayagunaan, pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana pendidikan yang belum dilakukan secara optimal tersebut kemungkinan besar disebabkan oleh kurangnya pengetahuan dan pemahaman para pengelola sekolah mengenai aturan penggunaan, tata cara pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana pendidikan secara baik.

Berdasarkan hasil identifikasi mengenai kondisi dan kelengkapan sarana dan prasarana yang ada di SMK, maka akan dapat ditentukan alternatif pemecahan masalahnya, yaitu upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk pemenuhan sarana dan prasarana (fasilitas) pendidikan di sekolah menengah kejuruan, sehingga dapat menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan yang memenuhi standar. Adapun upaya-upaya yang dapat ditempuh dalam pemenuhan mutu sarana dan prasarana pendidikan, adalah dengan melibatkan berbagai pihak yang memiliki kepentingan berkaitan dengan eksistensi lembaga pendidikan kejuruan tersebut. Beberapa alternatif pemecahan tersebut antara lain:

- a. Pemberdayaan sarana dan prasarana (fasilitas) yang dimiliki oleh sekolah. Upaya ini dimaksudkan untuk mengupayakan secara mandiri dari kekurangan atau kebutuhan sarana dan prasarana (fasilitas), termasuk upaya menghambat kerusakan sarana dan prasarana yang ada melalui program perawatan dan perbaikan/pemeliharaan (*maintenance and repair*), pemanfaatan untuk kegiatan pelatihan (*production based training*), dan pemanfaatan sarana dan prasarana untuk kegiatan unit produksi & jasa (UPJ), atau *Teaching Factory*. Upaya-upaya di atas memiliki manfaat ganda,

baik meningkatkan keberfungsian (nilai *use factor*), pemeliharaan dan perbaikan terhadap sarana dan prasarana yang ada sehingga tidak cepat rusak atau menurun dari segi kelayakan fungsinya, maupun mendayagunakan sarana dan prasarana agar memperoleh sumber dana untuk perawatan, pemeliharaan, atau perbaikan, atau pengadaan sarana dan prasarana baru.

- b. Pelibatan masyarakat, termasuk orang tua siswa dalam memecahkan masalah untuk pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana sekolah yang masih kurang. Dalam realisasinya, partisipasi masyarakat ini sangat penting, tidak hanya dalam bentuk bantuan dana bagi penyelenggaraan pendidikan, atau bantuan dana untuk pemenuhan sarana dan prasarana yang kurang, tetapi juga partisipasi masyarakat dan keluarga dalam penyelenggaraan pendidikan yang berupa: melengkapi dan memanfaatkan sarana dan prasarana belajar di rumah (*home resources*), memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada di masyarakat (*community resources*), seperti: lembaga atau pusat-pusat pelatihan keterampilan (*training center*), Balai Latihan Kerja (BLK), dan lembaga-lembaga kerja yang relevan, melengkapi sarana dan prasarana yang dimiliki sekolah (*school resources*).
- c. Pelibatan dunia usaha dan industri (DU/DI), dalam perannya sebagai: (1) tempat praktik peserta didik, sebagai salah satu solusi untuk mengurangi disparitas sarana dan prasarana pendidikan yang terjadi, sehingga mampu memenuhi kriteria minimal atau standar sarana dan prasarana; (2) tempat magang kerja, yang akan memberikan kesempatan untuk memanfaatkan sarana dan prasarana atau fasilitas kerja yang dimiliki DU/DI untuk mengembangkan kompetensinya yang sesuai dengan kebutuhan DU/DI; dan (3) pelibatan DU/DI dalam penyelenggaraan dan pengembangan *Teaching Factory*, yang juga dapat menjadi alternatif tempat praktik kerja siswa SMK.
- d. Pelibatan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah, yang merupakan suatu kewajiban sebagai sumber suporting utama dalam menjaga keberlangsungan sekolah, baik proses maupun investasi (UU RI No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada pasal 10 dan 11), suporting tersebut meliputi: pengaturan melalui perundang-undangan/peraturan-peraturan/kebijakan-kebijakan, pendanaan dan atau pengadaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan, perancangan dan pengembangan kerangka program, penetapan standar pelaksanaan, dan sebagainya.

## D. Kesimpulan

Berdasarkan kajian kondisi ideal (kriteria dan peraturannya) dan kondisi faktual mengenai sarana dan prasarana yang ada di SMK, maka dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Secara faktual, sebagian SMK sampel memiliki sarana dan prasarana pembelajaran yang di bawah standar minimal. Bahkan ada satu SMK yang kondisi sarana dan prasarannya jauh di bawah kriteria minimal. Oleh karena itu, permasalahan ini harus segera diatasi, sehingga dapat menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan yang memenuhi standar.

2. Upaya untuk mengatasi permasalahan kekurangan sarana dan prasarana pendidikan tersebut dapat ditempuh dengan beberapa jalur: (1) Pemberdayaan sarana dan prasarana yang ada di SMK, yaitu untuk mengupayakan secara mandiri dari kekurangan atau kebutuhan fasilitas, termasuk upaya menghambat kerusakan sarana dan prasarana melalui program perawatan, pemeliharaan, dan perbaikan, *production based training*, unit produksi & jasa dan *Teaching Factory*; (2) Pelibatan masyarakat, termasuk orang tua siswa dalam memecahkan masalah untuk pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana sekolah yang masih kurang. Dalam realisasinya, partisipasi masyarakat ini dapat berupa: melengkapi dan memanfaatkan sarana dan prasarana belajar di rumah (*home resources*), melengkapi sarana dan prasarana yang dimiliki sekolah (*school resources*), memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada di masyarakat (*community resources*); (3) Pelibatan dunia usaha dan industri (DU/DI), dalam perannya sebagai: (a) tempat praktik peserta didik, (b) tempat magang kerja bagi peserta didik di SMK, dan (c) pelibatan DU/DI dalam penyelenggaraan dan pengembangan *Teaching Factory*; dan (4) Pelibatan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah, yang merupakan suatu kewajiban sebagai sumber suporting utama dalam menjaga keberlangsungan sekolah, baik proses maupun investasi.

## E. Rekomendasi

Sesuai dengan ruang lingkupnya, maka rekomendasi untuk pemenuhan standar sarana dan prasarana pendidikan di SMK, yaitu agar sekolah:

1. Memberdayakan sarana dan prasarana (fasilitas) yang dimiliki oleh sekolah, yaitu untuk mengupayakan secara mandiri dari kekurangan atau kebutuhan sarana dan prasarana (fasilitas), termasuk upaya menghambat kerusakan sarana dan prasarana yang ada melalui program perawatan dan perbaikan/pemeliharaan (*maintenance and repair*), pemanfaatan untuk kegiatan pelatihan (*production based training*), dan pemanfaatan sarana dan prasarana untuk kegiatan unit produksi & jasa (UPJ), atau *Teaching Factory*, untuk mendayagunakan sarana dan prasarana, serta memperoleh sumber dana untuk perawatan, pemeliharaan, atau perbaikan, atau pengadaan sarana dan prasarana baru.
2. Melibatkan masyarakat, termasuk orang tua siswa, dalam memecahkan masalah untuk pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana sekolah yang masih kurang, yaitu dalam bentuk: (a) melengkapi dan memanfaatkan sarana dan prasarana belajar di rumah (*home resources*), (b) memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada di masyarakat (*community resources*), seperti: lembaga atau pusat-pusat pelatihan keterampilan (*training center*), Balai Latihan Kerja (BLK), dan lembaga-lembaga kerja yang relevan, dan (c) melengkapi sarana dan prasarana yang dimiliki sekolah (*school resources*).
3. Melibatkan dunia usaha dan industri (DU/DI), dalam perannya sebagai: (1) tempat praktik peserta didik; (2) tempat magang kerja; dan (3) pelibatan DU/DI dalam penyelenggaraan dan pengembangan *Teaching Factory*, yang juga

dapat menjadi alternatif tempat praktik kerja siswa SMK.

4. Pelibatan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah, yang merupakan suatu kewajiban sebagai sumber suporting utama dalam menjaga keberlangsungan sekolah, baik proses maupun investasi, yang meliputi: pengaturan melalui perundang-undangan/peraturan-peraturan/kebijakan-kebijakan, pendanaan dan atau pengadaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan, perancangan dan pengembangan kerangka program, penetapan standar pelaksanaan, dan sebagainya.

# STANDAR PEMBIAYAAN

## A. Pendahuluan

Keuangan dan pembiayaan merupakan salah satu sumber daya yang secara langsung mempengaruhi efektifitas dan efisiensi pengelolaan pendidikan. Setiap sekolah dituntut mampu untuk merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi serta mempertanggungjawabkan pengelolaan dana secara transparan kepada masyarakat dan pemerintah (Mulyasa, 2007: 34).



Perencanaan keuangan erat kaitannya dengan rencana anggaran biaya. Pengeluaran keuangan harus disesuaikan dengan anggaran biaya yang sudah ditetapkan. Realisasi pengeluaran uang ini kemudian dibandingkan dengan anggaran yang telah dibuat untuk mengukur keberhasilan pencapaian kinerja manajemen sekolah.

Biaya dalam pendidikan meliputi biaya langsung dan tidak langsung. Biaya langsung terdiri atas biaya-biaya yang dikeluarkan untuk keperluan pelaksanaan pembelajaran dan kegiatan-kegiatan belajar siswa berupa pembelian alat-alat pembelajaran, sarana belajar, biaya transportasi, gaji guru, baik yang dikeluarkan oleh pemerintah, orang tua maupun siswa sendiri. Sementara itu, biaya tidak langsung berupa keuntungan

yang hilang dalam bentuk biaya kesempatan yang hilang yang dikorbankan oleh siswa selama belajar.

Dalam rangka penyelenggaraan sekolah yang efektif dan efisien dibutuhkan pedoman pengelolaan keuangan dan pembiayaan. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Suharsono & Edy Supriyadi (2013: 134) yang merekomendasikan agar sekolah memiliki pedoman pengelolaan keuangan dan pengelolaan sekolah yang efektif dan efisien. Lebih lanjut lagi, penelitian Soeharto (2012: 32) menyatakan bahwa berbagai aspek untuk meningkatkan keterpenuhan standar pembiayaan adalah dengan mengenal sumber daya keuangan, pembukaan keuangan yang tertib, pengetahuan dan skill pengelolaan keuangan yang transparan, efisien, dan akuntabel.

## **B. Standar dan Peraturan**

Peraturan pemerintah yang mengatur tentang standar pembiayaan yakni Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 69 Tahun 2009 tentang Standar Biaya Operasi Nonpersonalia Tahun 2009 untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), dan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB).

Pada Pasal 1 Permendiknas Nomor 69 Tahun 2009 menjelaskan bahwa standar biaya operasi nonpersonalia untuk SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK, SDLB, SMPLB, dan SMALB adalah standar biaya yang diperlukan untuk membiayai kegiatan operasi nonpersonalia selama 1 (satu) tahun untuk SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK, SDLB, SMPLB, dan SMALB sebagai bagian dari keseluruhan dana pendidikan agar satuan pendidikan dapat melakukan kegiatan pendidikan secara teratur dan berkelanjutan sesuai Standar Nasional Pendidikan.

Permendiknas Nomor 69 Tahun 2009 juga mengatur ketentuan jumlah rombongan belajar per sekolah/program keahlian dan jumlah peserta didik per rombongan belajar untuk perhitungan biaya operasi nonpersonalia sebagai berikut.

1. SD/MI : 6 rombongan belajar dengan setiap rombongan belajar berisi 28 peserta didik,
2. SMP/MTs: 6 rombongan belajar dengan setiap rombongan belajar berisi 32 peserta didik,
3. SMA/MA: 6 rombongan belajar dengan setiap rombongan belajar berisi 32 peserta didik,
4. SDLB: 6 rombongan belajar dengan setiap rombongan belajar berisi 5 peserta didik,
5. SMPLB: 3 rombongan belajar dengan setiap rombongan belajar berisi 8 peserta didik,
6. SMALB: 3 rombongan belajar dengan setiap rombongan belajar berisi 8 peserta didik, dan
7. Program-program Keahlian SMK: 6 rombongan belajar dengan setiap rombongan belajar berisi 32 peserta didik.

Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) menjelaskan bahwa pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal. Biaya investasi satuan pendidikan sebagaimana dimaksud di atas meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumberdaya manusia, dan modal kerja tetap.

Biaya personal sebagaimana dimaksud di atas meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan. Biaya operasi satuan pendidikan sebagaimana dimaksud di atas meliputi:

1. Gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji,
2. Bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan
3. Biaya operasi pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lain sebagainya.

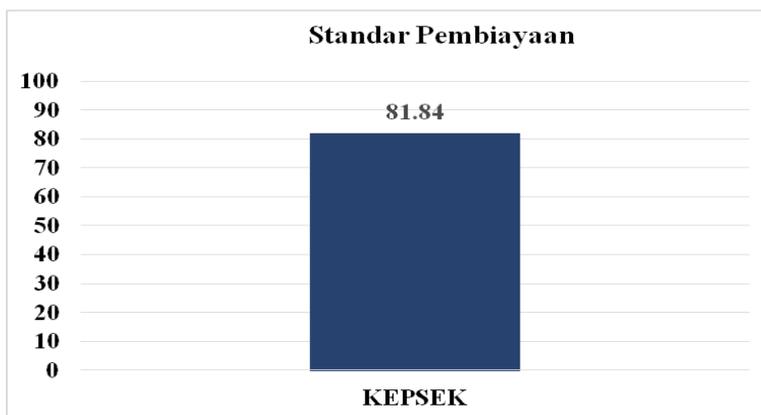
(BSNP, 2017)

### C. Hasil dan Pembahasan

Standar pembiayaan adalah standar yang mengatur komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun. Dalam penelitian ini, pencapaian standar pembiayaan SMK dilihat dari rata-rata skor perolehan 13 Kepala Sekolah SMK. Hasil analisis standar pembiayaan disajikan pada Tabel 19 dan Gambar 25 di bawah ini. Tabel tersebut menunjukkan bahwa skor standar pembiayaan bergerak dari rentang 47,22 sampai 97,22 dengan rerata 81,84 dan simpangan baku 12,35. Berdasarkan tabel tersebut, terlihat bahwa secara keseluruhan semua SMK yang diteliti untuk standar pembiayaan sudah mencapai batas tuntas.

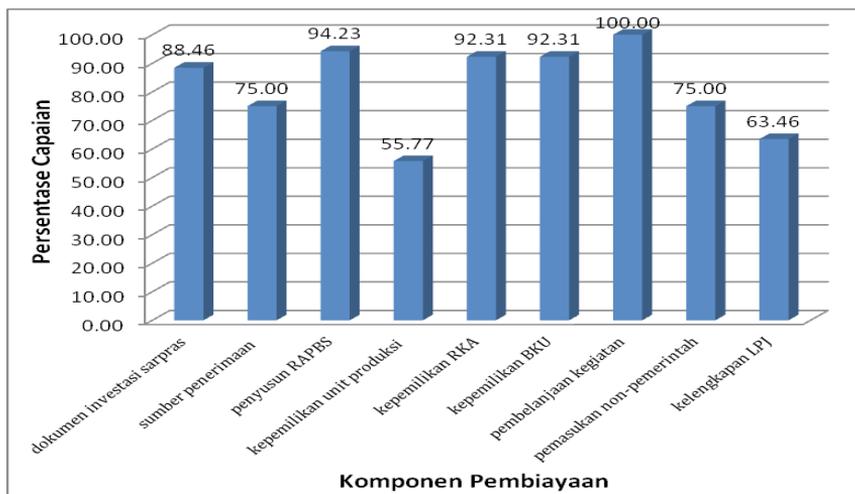
**Tabel 19. Pencapaian Standar Pembiayaan Menurut Kepsek**

Responden	N	Min.	Max.	Jumlah	Rata-rata	SD
KEPSEK	13	47,22	97,22	1.063,89	81,84	12,35



Gambar 25. Pencapaian Standar Pembiayaan Menurut Kepsek

Persentasi capaian masing-masing komponen pembiayaan di SMK dinyatakan dalam Gambar 26.



Gambar 26. Komponen Pembiayaan

Berdasarkan Gambar 26 komponen yang sangat rendah rendah ada 2 komponen kepemilikan unit produksi (55,7%) dan kelengkapan LPJ (63,6%). Adapaun 2 komponen yang batas rendah sumber penerimaan dan pemasukan non pemerintah masing-masing (75,00%).

Berbagai penelitian mengenai urgensi pembiayaan telah banyak dilakukan di Indonesia. Hasil analisis jalur dari penelitian yang dilakukan oleh Sudarmanto (2009) tentang *Pengaruh Pembiayaan Pendidikan terhadap Kualitas Pelaksanaan Pembelajaran dan Prestasi Belajar Siswa Sekolah Menengah Kejuruan Ekonomi di Bandar Lampung* menunjukkan bahwa kontribusi variasi variabel bebas yang berupa biaya sosial (*sosial cost*), biaya pribadi (*private cost*), dan kualitas pelaksanaan pembelajaran secara total dan bersama-sama terhadap variasi variabel terikat terakhir yaitu prestasi belajar siswa tidak dapat diabaikan. Sumbangan yang diberikan oleh variabel-variabel bebas terpilih termasuk dalam kategori yang sangat tinggi dalam membentuk variasi variabel terikat (prestasi atau hasil belajar siswa). Biaya sosial (*sosial cost*), biaya pribadi (*private cost*), dan kualitas pelaksanaan pembelajaran secara total dan bersama-sama memiliki peran yang sangat strategis dalam meningkatkan kualitas pendidikan khususnya dalam upaya meningkatkan prestasi belajar siswa.

Selaras dengan hasil penelitian tersebut, hasil analisis jalur dari penelitian yang dilakukan oleh Gaffar (2012) tentang *Pengaruh Manajemen Pembiayaan Pendidikan terhadap Mutu Sekolah Menengah Kejuruan di Kota Sukabumi* menunjukkan bahwa variabel perencanaan penganggaran ( $X_1$ ), pelaksanaan pembiayaan ( $X_2$ ), dan pengawasan pembiayaan pendidikan ( $X_3$ ) memberikan pengaruh nyata terhadap variabel mutu sekolah ( $Y$ ). Ketiga variabel tersebut berpengaruh secara simultan dengan kontribusi sebesar 71,4%.

Meskipun menggunakan teknik analisis yang berbeda, namun hasil analisis regresi dari penelitian yang dilakukan oleh Yudithia (2014) pada kompetensi keahlian Teknik Instalasi Tenaga Listrik (TITL) SMK 1 Sedayu Bantul juga menyimpulkan bahwa terdapat

pengaruh yang positif dan signifikan antara pembiayaan Pendidikan Sekolah terhadap kompetensi siswa. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa pembiayaan pendidikan sekolah yang diberikan kepada siswa harus memperhatikan kebutuhan siswa dalam pembiayaan pendidikan sekolah tersebut, agar permasalahan siswa dapat terpecahkan sehingga mampu meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi siswa.

Menurut Totok Sumaryanto, Sunyoto, Margunani (2014) tentang pembiayaan adalah:

1. Biaya penyelenggaraan pendidikan di SMK belum didasarkan pada kebutuhan ideal pihak sekolah.
2. Dana BOS yang diberikan Pemerintah Pusat atau Pendamping BOS dari Pemerintah daerah untuk siswa SMK tidak membedakan bidang atau program keahlian yang ada, tidak dibedakan antara SMK non teknik dan SMK teknik, baik untuk SMK negeri maupun SMK swasta, tentunya untuk SMK teknik biaya operasionalnya lebih tinggi.
3. Selain memperhatikan bidang/program keahlian, dana BOS atau Pendamping BOS pada SMK tidak memperhatikan tingkat inflasi.
4. Biaya personal langsung terkait proses belajar-mengajar (PBM) pada SMK swasta lebih besar daripada SMK negeri.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa standar pembiayaan sangatlah penting untuk diperhatikan mengingat pembiayaan berfungsi sebagai pendukung berjalannya sistem pendidikan. Oleh sebab itu, untuk menyiapkan semua satuan pendidikan agar berstandar nasional diperlukan biaya yang memadai dan pengelolaan yang benar sehingga semua kebutuhan pembiayaan pendidikan tercukupi sesuai standarnya.

## **D. Kesimpulan**

Berdasarkan analisis hasil penelitian, kajian, dan pembahasan, maka dapat disimpulkan:

1. Standar pembiayaan di SMK sudah baik, hanya komponen yang sangat rendah ada 2 komponen kepemilikan unit produksi (55,7%) dan kelengkapan LPJ (63,6%), 2 komponen yang batas rendah sumber penerimaan dan pemasukan non pemerintah masing-masing (75,00%).
2. Dana BOS yang diberikan Pemerintah Pusat atau Pendamping BOS dari Pemerintah daerah untuk siswa SMK belum membedakan bidang atau program keahlian serta belum memperhatikan inflasi
3. Biaya penyelenggaraan pendidikan di SMK belum semua didasarkan pada supaya didasarkan pada kebutuhan ideal tetapi realistis.

## **E. Rekomendasi**

Berdasarkan analisis hasil kajian, pembahasan, dan simpulan, maka dapat direkomendasikan:

1. Agar standar pembiayaan di SMK dapat memenuhi capaian, maka perlu:

- a. dikembangkan dan ditingkatkan kepemilikan unit produksi
  - b. ditingkatkan kelengkapan LPJ
2. Dana BOS yang diberikan Pemerintah Pusat atau Pendamping BOS dari Pemerintah daerah untuk siswa SMK supaya:
    - a. dibedakan bidang atau program keahlian yang ada, paling tidak dibedakan antara SMK non teknik dan SMK teknik, karena untuk SMK teknik biaya operasionalnya lebih tinggi.
    - b. memperhatikan tingkat inflasi sehingga besarnya dapat ditingkatkan
  3. Untuk merencanakan biaya dalam penyelenggaraan pendidikan di SMK supaya didasarkan pada kebutuhan ideal tetapi realistis.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agung Kuswanto. (2014). *Teaching Factory: Rencana dan Nilai Entrepreneurship*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Amat Jaedun dkk. (2014). *Kesiapan Guru Bidang Keahlian Teknik Bangunan dalam Implementasi Kurikulum 2013 SMK Negeri di DIY*. Laporan Penelitian Kolaborasi. Yogyakarta: FT UNY.
- Anderson, L. W., dan Krathwohl, D.R. (2001). *A Taxonomy for Learning, Teaching and Assesing; A revision of Bloom's of Education Objectives*. New York: Addison Wesley Lonman Inc.
- Arends, R.I. dan A. Kilcher. (2010). *Teaching for Student Learning: Becoming an Accomplished Teacher*. Rotledge Taylor & Francis Group. New York and London.
- Badrun Kartowagiran, Amat Jaedun, dan Heri Retnowati. (2012.) *Evaluasi implementasi standar proses dan standar penilaian di SMK Jurusan Teknik Mesin di D.I. Yogyakarta*. Laporan penelitian. Yogyakarta: tidak diterbitkan.
- Badrun Kartowagiran, dkk. (2014). *Penilaian Otentik yang Humanis dan Profesional untuk Meningkatkan Karakter Lulusan*. Makalah disiapkan dalam rangka Dies UNY ke 50 pada Mei 2014
- Barnett Berry, (2013). *The Teachers of 2030: Creating a Student-Centered Profession for the 21st Century*, Teachers College Press.
- Camp, G. W., dan Hillison. (1984). *Prosser's Sixteen Theorems, Time For Consideration*. Omocron: Tau Theta.
- Danim (2010). *Kemimpinan Pendidikan (Kepimpinan Jenius, IQ+EQ, Etika, Perilaku Motivasional dan Mitos)*. Bandung: Alfabeta CV.
- Departemen Pendidikan Nasional, (2003). *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional*, Jakarta: Depdiknas.
- Departemen Pendidikan Nasional, (2005). *Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, Tentang Standar Nasional Pendidikan*, Jakarta: Depdiknas.
- Departemen Pendidikan Nasional, (2005). *Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, Tentang Guru dan Dosen*, Jakarta: Depdiknas.
- Depdiknas. (2009). *Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan*. Jakarta: Pusat Kurikulum, Balitbang Depdiknas.
- Diranna, K. et.al., (2008). *Assessments centered teaching*. Thousand Oaks, CA: Corwin Press.
- Buku Pedoman Teknis Evaluasi Mutu Tata Kelola Kelembagaan dan Pembelajaran SMK 3 Tahun*

- Dyers, J.H. et al. (2011). *Innovators DNA: Mastering the Five Skills of Disruptive Innovators*. Harvard Business Review.
- Earl, L; Hargreaves, A; dan Schmidt, M. (2002). *Perspective on reform*. American Educational Research Journal., Spring 2002, Vol. 39. No. 1.
- Firmansyah Aditya. (2013). *Analisis Pelaksanaan Praktek Kerja Industri (Prakerin) Pada Program Keahlian Administrasi Perkantoran Kelas XI SMK Negeri 4 Surabaya*. Jurnal Administrasi Perkantoran. Vol.2, No.1.
- Hamalik, Oemar. (2003). *Proses Belajar Mengajar*. Jakarta. Bumi Aksara.
- Harbiyah Gani, Husein Usman, dan Soenarto. (2015). *Pengembangan Model Manajemen Kemitraan Sekolah Menengah Kejuruan dengan Dunia Kerja dalam Praktik Kerja Industri*. Disertasi (Tidak diterbitkan). Yogyakarta: PPs UNY.
- Impres RI Nomor 9 Tahun (2016). *Tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan dalam Rangka Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia Indonesia*. Jakarta.
- Kirk, J. & Miller, M. L., (1986). *Reliability and Validity in Qualitative Research*. Beverly Hills, CA, Sage Publications.
- Krathwohl, D.R., Bloom, B.S., dan Masia, B.B. (1973). *Taxonomy of Educational Objectives. The classification of educational goals. Handbook II: Affective Domain*. New York: David MacKay.
- Marzano, R. J., & Pickering, D. J. (with Heflebower, T.). (2011). *The highly engaged classroom*. Bloomington, IN: Marzano Research Laboratory.
- Moore, B dan Stanley, T. (2010). *Critical Thinking and Formative Assessment*. Larchmont: Eye on Education
- Newhouse, David & Daniel Suryadarma. (2009). *The Value Of Vocational Education : High School Type And Labor Market Outcomes In Indonesia*. Policy Research Working Paper (WPS) 5035. Washington DC : World Bank.
- Nuryake Fajarwati. (2012). *Evaluasi Pelaksanaan Teaching Factory SMK di Surakarta*. Skripsi UNY Yogyakarta: FT UNY.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 20 Tahun 2016.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 54 Tahun 2013.
- Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005.
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005.
- Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
- Permendikbud No. 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Permendikbud Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah.

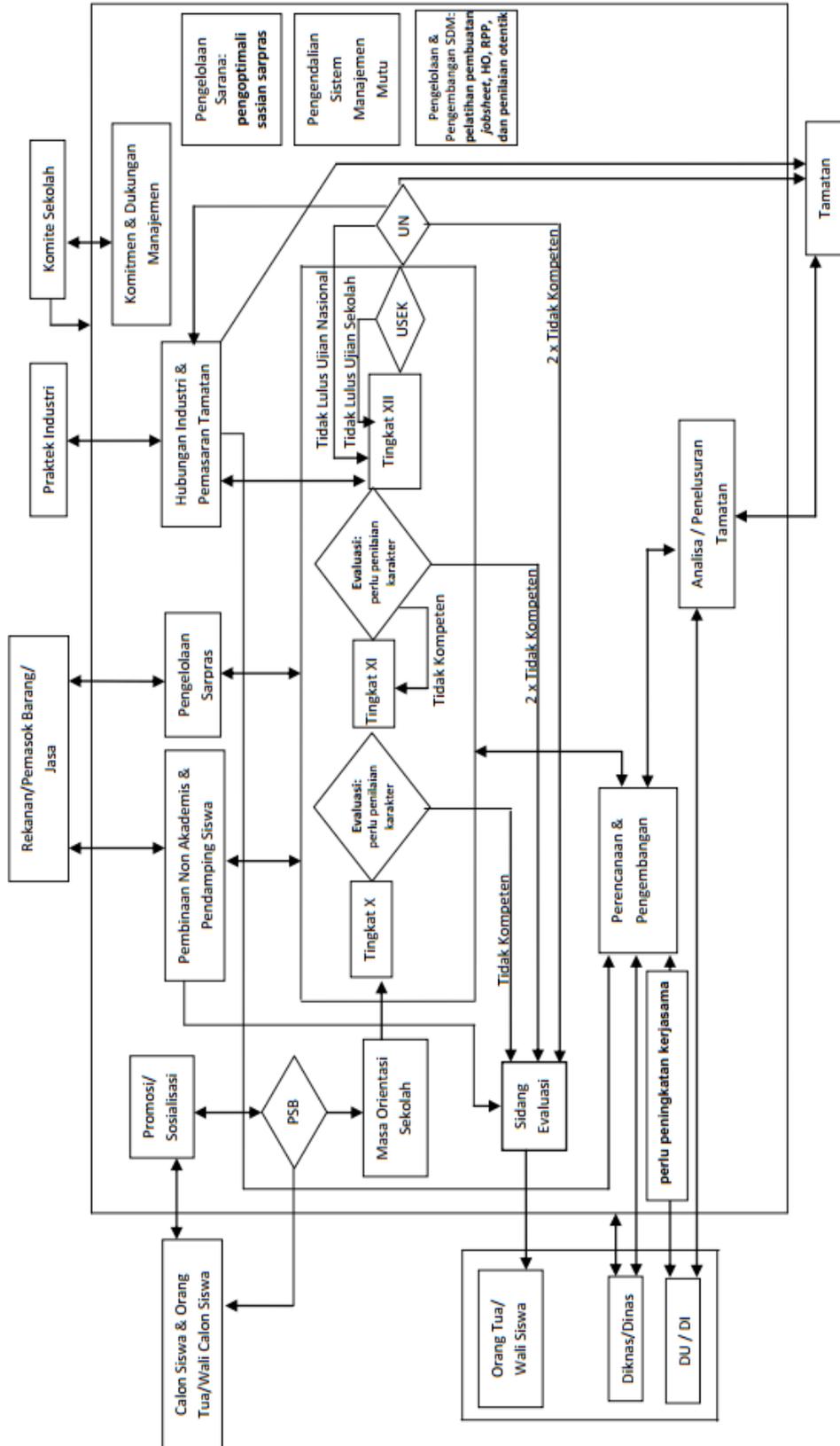
- Permendikbud Nomor 22 tahun 2016 tentang Standar Proses.
- Permendikbud Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian.
- Permendikbud Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Penilaian Hasil Belajar Oleh Satuan Pendidikan.
- Permendiknas Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan.
- Permendiknas Nomor 3 Tahun 2017 tentang Standar Penilaian.
- Reeves, D.B. (2009). *Leading change in your school*. Alexandria: ASCD.
- Reeves, D.B. (2010). *Transforming profesional development into student result*. Alexandria: ASCD.
- Saud, Udin Syaefudin (2009). *Pengembangan Profesi Guru*. Bandung: Alfabeta.
- Staron, M., Jasinski, M and Weatherley, R. (2006). Life-Based Learning: A Strength-Based Approach For Capability Development In Vocational And Technical Education. *Australian Government Department for Education Science and Training and TAFE NSW Available online at:*<http://learningtobe.professional.pbworks.com/w/page/32893040/Life-based-learning>. Diakses pada tanggal 30 Juli 2017.
- Stiggins, Rick, J & Chappuis, Jan. (2012). *An-Introduction to Student-Involved Assessment for Learning (Sixth Edition)*. Columbus: Person Education.
- Thomas, A. dan Thorne, G. (2009). *Higher-Order Thinking*. [Online]. [30 Juli 2017. <http://www.adlit.org/article/34651/>].
- Totok Sumaryanto, Sunyoto, Margunani (2014). *Analisis Pembayaran Pendidikan SMK Kota Semarang*. Riptek Vol. 8, No. 2, Tahun 2014, Hal. 23 - 34.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 ayat (3).
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Vindy Nilayanti Iriani. 2012. *Evaluasi Pelaksanaan Teaching Factory di Sekolah Menengah Kejuruan Kota Yogyakarta*. Skripsi UNY Yogyakarta: FT UNY.



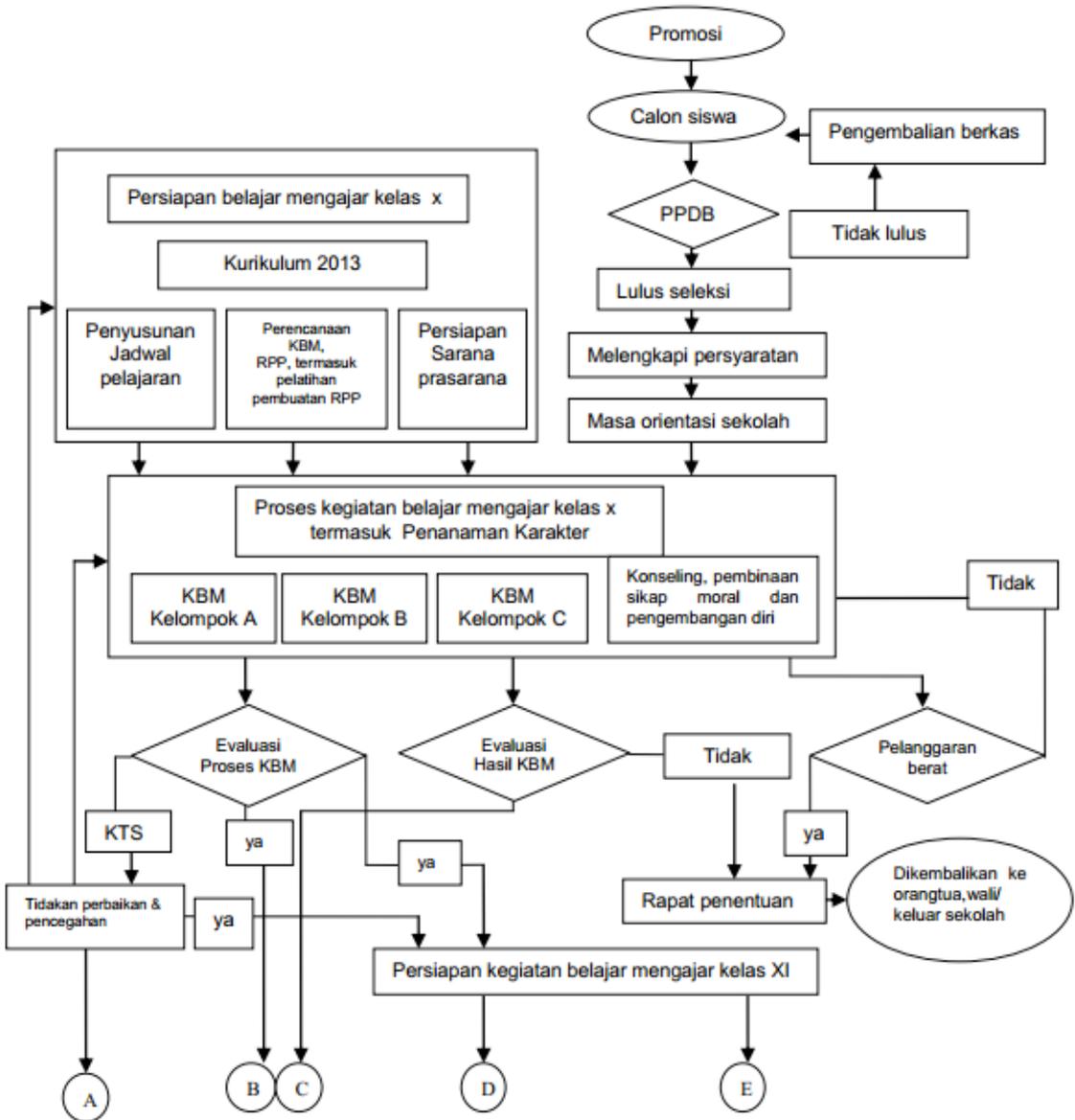
# **RANGKUMAN BUKU PEDOMAN TEKNIS**



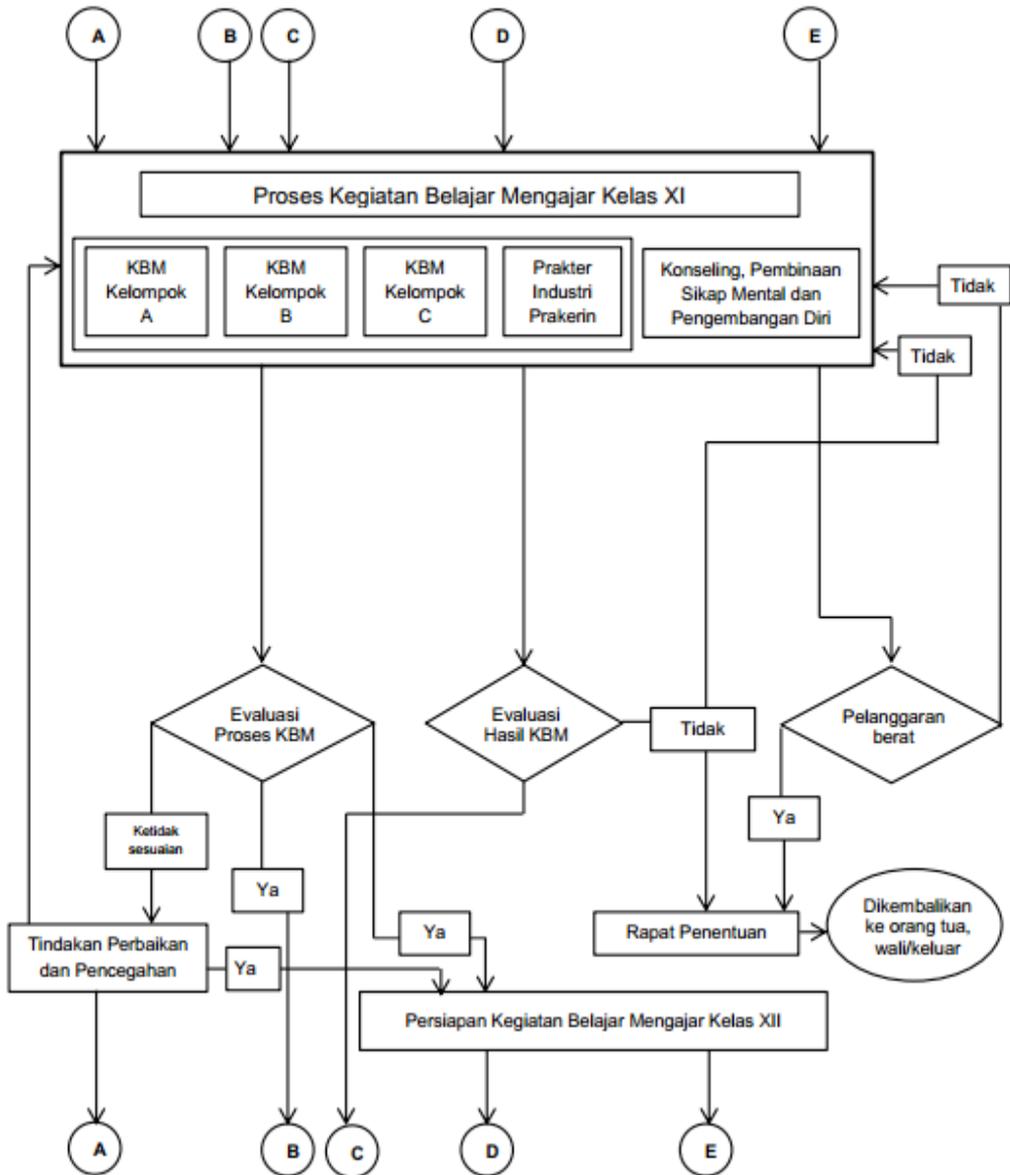
## Proses Pendidikan di SMK 3 Tahun



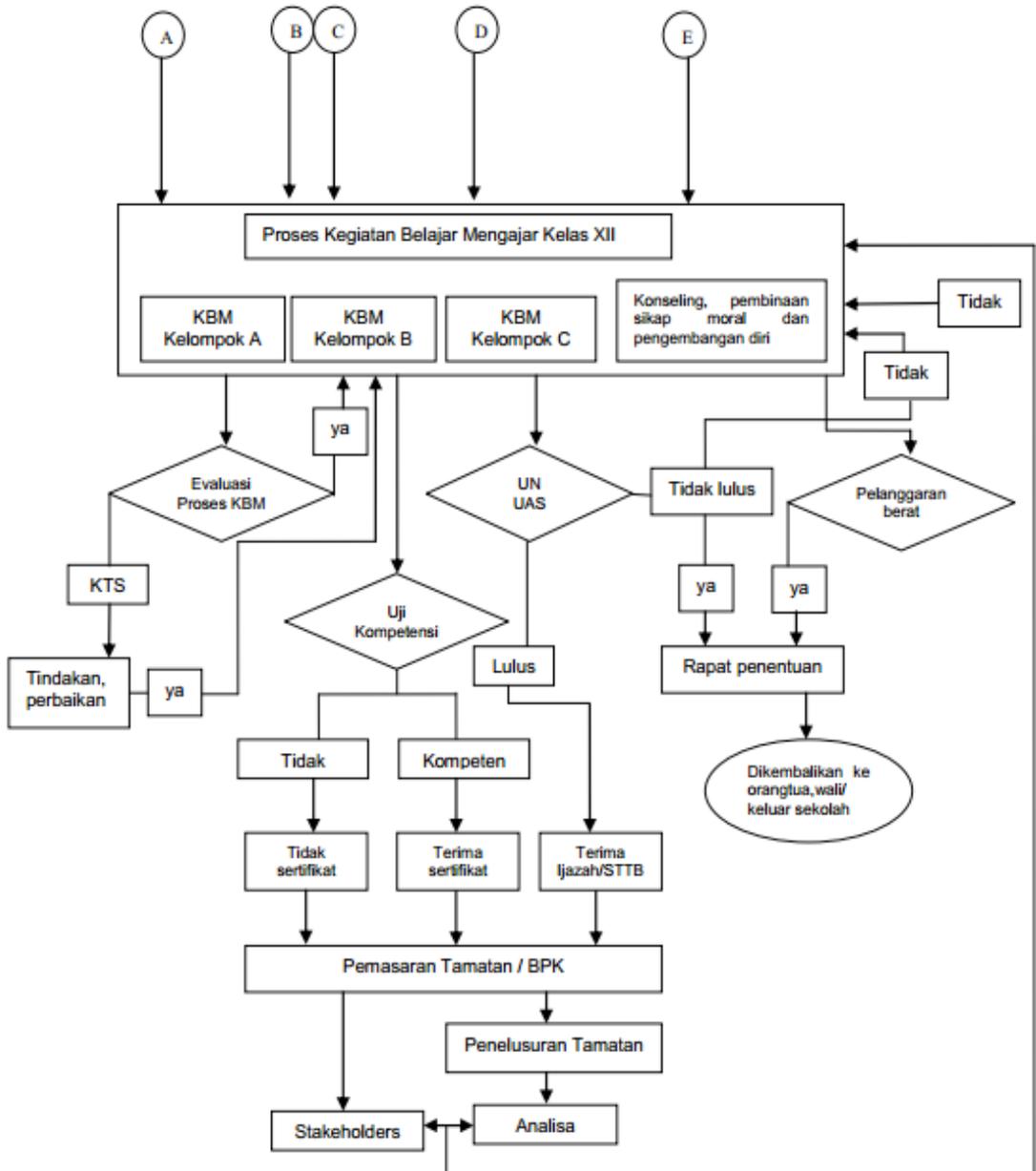
## Detail Proses Pendidikan di SMK 3 Tahun (Kelas X)



## Detail Proses Pendidikan di SMK 3 Tahun (Kelas XI)



Detail Proses Pendidikan di SMK 3 Tahun (Kelas XII)



## A. Evaluasi Mutu Tata Kelola dan Pembelajaran SMK 3 Tahun

Evaluasi mutu tata kelola dan pembelajaran tidak terlepas dari program-program sekolah yang secara umum tertuang dalam Rencana jangka panjang atau dikenal juga Rencana Program Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana jangka pendek yang dikenal dengan Rencana Kerja Tahunan (RKT).

### 1. Penyiapan data kondisi sekolah

Tahap penyiapan data kondisi sekolah adalah data kondisi eksisting atau profil sekolah yang dikumpulkan oleh satuan tugas perencanaan sekolah. Data tersebut meliputi profil sekolah, sejarah pendirian, hasil survei pengaduan pengguna layanan pendidikan sekolah, serta data capaian SPM pendidikan di tingkat sekolah. Data tersebut dikumpulkan melalui berbagai teknik pengumpulan data, yaitu studi dokumentasi, angket, wawancara, dan teknik survei pengaduan pengguna layanan pendidikan. Sumber data berasal dari seluruh bagian dan unit sekolah, mulai dari bagian pembelajaran, bagian kesiswaan, bagian personalia, bagian keuangan, bagian sarana prasarana dan bagian humas.

Contoh profil sekolah

#### A. IDENTITAS SEKOLAH

Nama Sekolah	:	
Alamat	:	
		Jl. ... / RT/RW
		Kecamatan
		Kabupaten
		Provinsi
		Kode Pos
		Telepon/Fax
		Email
		Website
NSS	:	
Status	:	
Tahun Berdiri	:	
Status Tanah	:	
		Luas Tanah
		Luas Bangunan
		Halaman
		Lain-lain
		:
Bidang Keahlian	:	
Program Keahlian Kompetensi Keahlian	:	
Keahlian	:	
		KK1

	KK2	:
	KK3	:
	Dst	:
Kepala Sekolah		:
	Nama	:
	NIP	:
	Nomor SK	:
	Tanggal	:
	TMT	:
Akreditasi		:
	Lembaga yang mengkreditasi	:
	Nomor SK	:
	Tanggal Peringkat	:
	Akreditasi	:
Rekening Bank		:
	Nama Bank	:
	Nomor	:
	Rekening	:
	Atas Nama	:

- B. **UNIT PRODUKSI** :
- C. **LSP-1** :
- D. **Dst** :

## CONTOH EVALUASI DATA PROFIL SEKOLAH

- a. Tujuan
  - 1) Menentukan tujuan evaluasi profil sekolah
- b. Prosedur
  - 1) Persiapan
  - 2) Menentukan penanggungjawab/evaluator/tim
  - 3) Pengembangan instrumen (daftar cek, dan dokumentasi)
  - 4) Pelaksanaan / verifikasi data / pemutakhiran data dsb
  - 5) Pelaporan
  - 6) Tindak lanjut (up date / ganti / hapus profil)
- c. Dokumen
  - 1) Sertifikat
  - 2) Website
  - 3) Rekening bank
  - 4) Dokumentasi foto, gambar, dll
  - 5) Dst

## 2. Analisis situasi kondisi sekolah

Rangkaian kegiatan analisis situasi dan kondisi sekolah adalah pencermatan atas aturan perundang-undangan pendidikan yang sedang berlaku dan mempelajari renstra SKPD pendidikan Provinsi. Agar dapat menyusun analisis situasi dan kondisi secara komprehensif, maka perlu dilakukan penajaman terhadap profil sekolah, yang dimulai dari identifikasi identitas sekolah, kemudian peserta didik, tenaga kependidikan, sarana prasarana, keuangan, partisipasi orang tua dan masyarakat, serta prestasi-prestasi yang dimiliki oleh sekolah, baik yang bersifat akademik maupun non akademik. Selanjutnya, profil sekolah tersebut, hendaknya dibandingkan dengan, dan dikerucutkan dari standar-standar pendidikan yang dipergunakan oleh sekolah (standar pelayanan minimal/SPM) dan standar nasional pendidikan.

## 3. Perumusan Visi Misi dan Tujuan (VMT) Sekolah

Visi adalah imaji moral yang tergambar dalam profil sekolah juga berarti wawasan atau pandangan jauh (biasanya 5 - 15 tahun) ke depan dan gambaran masa depan yang diinginkan sekolah dan menjadi sumber acuan/arahan misi sekolah. Misi adalah tindakan untuk mewujudkan dan merealisasikan visi. Misi merupakan penjabaran dari visi yang berbentuk layanan untuk memenuhi tuntutan yang dituangkan dalam visi. Sementara Tujuan sekolah merupakan indikator dan tahapan perwujudan dari misi sekolah yang. VMT ini selayaknya dievaluasi pada periode tertentu.

Contoh evaluasi VMT

- a. Tujuan
  - 1) Menentukan tujuan evaluasi VMT sekolah
- b. Prosedur
  - 1) Persiapan
  - 2) Menentukan penanggungjawab/evaluator/tim
  - 3) Pelaksanaan / musyawarah stakeholder sekolah
  - 4) Pelaporan
  - 5) Tindak lanjut (up date / ganti VMT)
- c. Dokumen
  - 1) Daftar hadir
  - 2) Sosialisasi VMT
  - 3) Dst

## 4. Analisis tantangan nyata

Tantangan nyata adalah kesenjangan (gap) antara tujuan yang ingin dicapai dengan kondisi sekolah saat ini. Selisih antara tujuan yang diinginkan dengan kenyataan saat ini. Dibuat rincian pada beberapa tahun misalnya tahun I, II,, III, dst).

5. Menentukan sasaran
6. Mengidentifikasi fungsi
7. Analisis SWOT (Strenght Weakkness Opportuniiti and Treat)

## ANALISIS SWOT

Faktor Internal Faktor Eksternal	<b>Kekuatan</b> <i>[S]</i>	<b>Kelemahan</b> <i>[W]</i>
<b>Peluang</b> <i>[O]</i>	<b>Strategi SO</b> ----- <b>Gunakan "S" untuk memanfaatkan "O"</b>  <b>Perluasan</b>	<b>Strategi WO</b> ----- <b>Menghilangkan "W" dan memanfaatkan "O"</b>
<b>Ancaman</b> <i>[T]</i>	<b>Konsolidasi</b>	
	<b>Strategi ST</b> ----- <b>Gunakan "S" untuk Menghindarkan "T"</b>	<b>Strategi WT</b> ----- <b>Minimalkan "W" untuk Menghindarkan "T"</b>

\*Courtesy: Pedoman Evaluasi Diri BAN

### 8. Identifikasi solusi alternatif

**Tabel Identifikasi Solusi Alternatif**

	<b>MEENDESAK (M)</b>	<b>TIDAK MEENDESAK (TM)</b>
<b>PENTING (P)</b>	<b><u>Faktor PM</u></b> Muncul karena suka Menunda program atau Keterbatasan sumber daya	<b><u>Faktor PTM</u></b> Penyusunan skala Prioritas tepat
<b>TDK PENTING (TP)</b>	<b><u>Faktor TPM</u></b> Terlalu sering menunggu reaktif dan ikut-ikutan	<b><u>Faktor TPTM</u></b> Revisi bila perlu Hapus program

## 9. Menyusun program pemenuhan SNP sekolah

**Tabel. Evaluasi Mutu Tata Kelola dan Pembelajaran SMK 3 Tahun**

No.	Kondisi yang ada	Kondisi yang diharapkan	Gap	Capaian surplus/minus	Ham batan	Upaya solutif	Ket
1.	Standar Kompetensi Lulusan						
<i>a</i>	Bidang akademik:						
	Rata2 pencapaian KKM semua mapel 6,00 Rata2 nilai UN 7,00 Rata2 nilai UKK 7,00 Dan sebagainya	Rata2 pencapaian KKM semua mapel 8,00 Rata2 nilai UN 8,00 Rata2 nilai UKK 8,00 Dan sebagainya	2,00				
<i>b</i>	Bidang non akademik:						
	Belum memperoleh juara LKS untuk KK ... Memperoleh juara 3 LKS untuk KK ... Perolehan jumlah kejuaraan: 2 jenis/bidang pada tk kab/kota Perolehan jumlah kejuaraan: 2 jenis/bidang pada tk provinsi Perolehan jumlah kejuaraan: 1 jenis/bidang pada tk nasional Memperoleh juara ke-2 tk kab/kota bidang bola voli Memperoleh juara ke-4 tk provinsi bidang bola voli Memperoleh juara ke-10 tk nasional bidang bola voli Dan sebagainya	Perolehan jumlah kejuaraan: 5 jenis/bidang pada tk kab/kota Perolehan jumlah kejuaraan: 3 jenis/bidang pada tk provinsi Perolehan jumlah kejuaraan: 2 jenis/bidang pada tk nasional Memperoleh juara ke-1 tk kab/kota bidang bola voli Memperoleh juara ke-2 tk provinsi bidang bola voli Memperoleh juara ke-6 tk nasional bidang bola voli Dan sebagainya	3 buah 1 tingkat 1 tingkat 2 tingkat 4 tingkat				
<i>c</i>	Kelulusan:						
	Jumlah kelulusan 75%	Jumlah kelulusan 100%	25%				
<i>d</i>	Kewirausahaan:						
	Jumlah lulusan yang berwirausaha 20%	Jumlah lulusan yang berwirausaha 50%	20%				
2	Standar Isi						
<i>a</i>	Buku Kurulum 2013:						
	Belum lengkap	lengkap					
<i>b</i>	Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP):						
	Tersusun RPP : 50% dari semua mapel Tersusun RPP sebagian mapel kelas X / XI /XII	Tersusun RPP : 100% dari semua mapel Tersusun RPP semua mapel dan semua kelas	50% RPP kelas X / XI /XII				
3.	Standar Proses						
<i>a</i>	Persiapan pembelajaran:						
	Persiapan pembelajaran:	Persiapan pembelajaran:					

No.	Kondisi yang ada	Kondisi yang diharapkan	Gap	Capaian surplus/minus	Ham batan	Upaya solutif	Ket
	Kepemilikan RPP oleh guru: 50% memiliki Kepemilikan sumber belajar/bahan ajar: 50% Pengembangan perangkat instrumen untuk pemahaman guru terhadap karakteristik siswa: 50% DII	Kepemilikan RPP oleh guru: 100% memiliki Kepemilikan sumber belajar/bahan ajar: 100% Pengembangan perangkat instrumen untuk pemahaman guru terhadap karakteristik siswa: 100% DII	50% 50% 50%				
<i>b</i>	Persyaratan Pembelajaran						
	Jumlah siswa per rombel: 40 anak Beban mengajar guru: 10 jam/minggu Ratio antara jumlah siswa dengan buku teks mapel 3:1 Pengelolaan kelas: 50% DII	Jumlah siswa per rombel: 32 anak Beban mengajar guru: $\geq$ 24 jam/minggu Ratio antara jumlah siswa dengan buku teks mapel 1:1 Pengelolaan kelas: 100% DII	<i>Pengurangan 8 siswa/rombel</i> <i>Penambahan 14 jam/minggu</i> <i>Penambahan 2 buku/siswa 50%</i>				
<i>c</i>	Pelaksanaan pembelajaran:	Pelaksanaan pembelajaran:					
	Cakupan pendahuluan dalam pembelajaran oleh guru di kelas: 60% Cakupan penerapan prinsip pembelajaran yang: eksploratif, elaboratif, dan konformatif: 40% Penerapan pembelajaran berbasis proye: 20% Pembajaran Tefa 10% Penerapan pembelajaran tuntas: 35% Penerapan PAIKEM/PAKEM: 40% Penerapan pembelajaran di luar kelas/sekolah: 30% Cakupan pelaksanaan penutup dalam pembelajaran: 70% DII	Cakupan pendahuluan dalam pembelajaran oleh guru di kelas: 100% Cakupan penerapan prinsip pembelajaran yang: eksploratif, elaboratif, dan konformatif: 100% Penerapan PBP: 70% Penerapan Tefa 50% Penerapan pembelajaran tuntas: 100% Penerapan PAIKEM/PAKEM: 100% Penerapan pembelajaran di luar kelas/sekolah: 100% Cakupan pelaksanaan penutup dalam pembelajaran: 100% DII	40% 60% 60% 80% 65% 60% 70% 30%				
<i>d</i>	Pelaksanaan penilaian pembelajaran:	Pelaksanaan penilaian pembelajaran:					
	Pengembangan instrumen penilaian hasil belajar: 70% Variasi model penilaian: 2 model Pengolahan/analisis hasil penilaian: 1 jenis manual Pemanfaatan/tindak lanjut hasil penilaian: 1 manfaat DII	Pengembangan instrumen penilaian hasil belajar: 100% Variasi model penilaian: 5 model Pengolahan/analisis hasil penilaian: 2 jenis manual Pemanfaatan/tindak lanjut hasil penilaian: 3 manfaat DII	30% 3 model 1 jenis berbasis TIK 2 kemanfaatan/ tindak lanjut				
<i>e</i>	Pengawasan proses pembelajaran:	Pengawasan proses pembelajaran:					

No.	Kondisi yang ada	Kondisi yang diharapkan	Gap	Capaian surplus/minus	Ham batan	Upaya solutif	Ket
	Cakupan kegiatan pemantauan pembelajaran: 40% Cakupan kegiatan supervisi pembelajaran: 40% Cakupan kegiatan evaluasi pembelajaran: 40% Dokumen pelaporan hasil evaluasi pembelajaran: 40% Cakupan tindak lanjut hasil evaluasi pembelajaran: 60% DII	Cakupan kegiatan pemantauan pembelajaran: 100% Cakupan kegiatan supervisi pembelajaran: 100% Cakupan kegiatan evaluasi pembelajaran: 100% Dokumen pelaporan hasil evaluasi pembelajaran: 100% Cakupan tindak lanjut hasil evaluasi pembelajaran: 100% DII	60% 60% 60% 60% 40%				
<b>8.</b>	Standar Penilaian Pendidikan:	Standar Penilaian Pendidikan:					
<i>a</i>	Frekuensi ulangan harian oleh guru: 50%	Frekuensi ulangan harian oleh guru: 100%	50%				
<i>b</i>	Ulangan tengah semester yang dilakukan oleh guru: 50%	Ulangan tengah semester yang dilakukan oleh guru: 100%	50%				
<i>c</i>	Cakupan materi ulangan akhir semester yang dilakukan sekolah: 90%	Cakupan materi ulangan akhir semester yang dilakukan sekolah: 100%	50%				
<i>d</i>	Cakupan materi ulangan kenaikan kelas oleh sekolah: 90%	Cakupan materi ulangan kenaikan kelas oleh sekolah: 100%	10%				
<i>e</i>	Teknik-teknik penilaian yang dipergunakan guru dalam pembelajaran: 50%	Teknik-teknik penilaian yang dipergunakan guru dalam pembelajaran: 100%	50%				
<i>f</i>	Instrumen yang dikembangkan guru untuk ulangan harian: 80%	Instrumen yang dikembangkan guru untuk ulangan harian: 100%	20%				
<i>g</i>	Variasi instrumen yang dikembangkan sekolah untuk ulangan akhir semester: 80%	Variasi instrumen yang dikembangkan sekolah untuk ulangan akhir semester: 100%	20%				
<i>h</i>	Variasi instrumen yang dikembangkan sekolah untuk ulangan kenikan kelas: 80%	Variasi instrumen yang dikembangkan sekolah untuk ulangan kenikan kelas: 100%	20%				
<i>i</i>	Mekanisme dan prosedur penilaian pendidikan oleh guru: 75% terpenuhi	Mekanisme dan prosedur penilaian pendidikan oleh guru: 100% terpenuhi	25%				
<i>j</i>	Mekanisme dan prosedur penilaian pendidikan oleh sekolah: 90% terpenuhi	Mekanisme dan prosedur penilaian pendidikan oleh sekolah: 100% terpenuhi	10%				
<i>k</i>	DII	DII					
<b>4</b>	<b>Standar Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan:</b>	<b>Standar Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan:</b>					
<i>a</i>	Kepala sekolah:						

No.	Kondisi yang ada	Kondisi yang diharapkan	Gap	Capaian surplus/minus	Ham batan	Upaya solutif	Ket
	Belum pelatihan bahasa Inggris atau TOEFL = 400 Belum pelatihan TIK Belum pelatihan kepemimpinan Belum pelatihan kewirausahaan Belum pelatihan supervisi, monitoring, dan evaluasi sekolah Belum pelatihan administrasi persekolahan Belum pelatihan K.13 DII	TOEFL = 500 pelatihan TIK min. 5 kali pelatihan kepemimpinan min. 3 kali pelatihan kewirausahaan min. 3 kali pelatihan supervisi, monitoring, dan evaluasi sekolah min. 3 kali pelatihan administrasi persekolahan min. 3 kali Pelatihan K.13 min 2 kali DII	100 GS Niai TOEFL 5 kali 3 kali 3 kali 3 kali  3 kali 2 kali .....				
<i>b</i>	Guru: (bersifat rata-rata)	Guru: (bersifat rata-rata)					
	Jumlah guru keseluruhan: 90 orang Pelatihan TEFA: 50% Pelatihan pembelajaran tuntas: 50% Pelatihan penilaian dan evaluasi pembelajaran: 40% Pelatihan bahasa Inggris: 20% Pelatihan TIK: 35% Pelatihan K.13: 75% Pelatihan penelitian pendidikan: 20% Pelatihan kepribadian: 10% Pengabdian masyarakat: 10% Pelatihan PAIKEM/PAKEM: 25% Jumlah guru S1/D4: 75% Jumlah guru bersertifikasi profesi: 25% Jumlah guru yang memiliki komputer/laptop: 10% DII	Jumlah guru keseluruhan sesuai kebutuhan mapel dan rasio Pelatihan TEFA: 100% Pelatihan pembelajaran tuntas: 100% Pelatihan penilaian dan evaluasi pembelajaran: 100% Pelatihan bahasa Inggris: 100% Pelatihan bahasa Inggris: 100% Pelatihan TIK: 100% Pelatihan K.13: 100% Pelatihan penelitian pendidikan: 100% Pelatihan kepribadian: 100% Pelatihan PAIKEM/PAKEM: 100% Jumlah guru S1/D4: 100% Jumlah guru bersertifikasi profesi: 25% Jumlah guru yang memiliki komputer/laptop: 100% DII	10 orang  50% 50% 60%  80% 25% 80% 90% 90% 75% 25% 75%  90%  .....				
<i>c</i>	<i>Tenaga TU, Laboran, Pustakawan, dll: (bersifat rata-rata)</i>	Tenaga TU, Laboran, Pustakawan, dll: (bersifat rata-rata)					
	Jumlah tenaga TU: 10 orang Pelatihan TIK: 50% Pelatihan bahasa Inggris: 10% Pelatihan bidangnya: 10% Pelatihan manajemen sesuai bidangnya: 5% Jumlah laboran: 1 orang DII	Jumlah tenaga TU: 15 orang Pelatihan TIK: 100% Pelatihan bahasa Inggris: 100% Pelatihan bidangnya: 100% Pelatihan manajemen sesuai bidangnya: 100% Jumlah laboran: 3 orang DII	5 orang 50% 90% 90% 95%  2 orang				

No.	Kondisi yang ada	Kondisi yang diharapkan	Gap	Capaian surplus/minus	Ham batan	Upaya solutif	Ket
5	Standar Sarana dan Prasarana	Standar Sarana dan Prasarana					
a	Sarana dan Prasarana Minimal	Sarana dan Prasarana Minimal					
	Ruang kepala sekolah: 10 m2 Ruang wakil KS tidak ada Ruang kelas : 2 tidak standar Ruang perpustakaan: tidak standar Ruang Bengel: 1 buah Ruang guru: tidak standar (< 4m2 / guru) Gudang: tidak ada Ruang UKS : tidak ada DII	Ruang kepala sekolah: min. 12 m2 Ruang wakil KS ada Ruang kelas : standar 7X9m2 Ruang perpustakaan: standar Ruang Lab dan bengel: 2 buah Ruang guru: standar (< 4m2 / guru) Gudang: ada Ruang UKS : ada DII	Terbangun ruang KS standar Terbangun R WK KS Terbangun 2 R kelas Terbangun R perpustakaan Terbangun R lab/bengel 1 bh Terbangun ruang guru standar Terbangun 1 gudang Terbangun ruang UKS				
b	Sarana dan Prasarana Lainnya	Sarana dan Prasarana Lainnya					
	Ruang Lab. Bahasa: tidak ada Ruang Lab. Komputer: tidak ada Ruang multi media: tidak ada Ruang akademik dan pengembangan SIM: tidak ada Ruang kantin: tidak standar (<10m2) DII	Ruang Lab. Bahasa: 2 buah Ruang Lab. Komputer: 2 buah Ruang multi media: tidak ada Ruang akademik dan pengembangan SIM: 2 buah Ruang kantin: ada s/ tandar DII	Terbangun 2 R Lab Bahasa Terbangun 2 R Lab Komputer Terbangun R multi media Terbangun 2 R akademik dan SIM Terbangun R kantin standar				
c	Fasilitas Pembelajaran dan Penilaian	Fasilitas Pembelajaran dan Penilaian					
	Daya listrik rendah (< 3000W) Komputer Guru: 5% Komputer TU: 1 buah Komputer perpustakaan: tidak ada Komputer Lab IPA: tidak ada Jaringan internet: tidak ada Sarana olah raga: 50% DII	Daya listrik naik (6000W) Komputer Guru: 25% Komputer TU: 5 buah Komputer perpustakaan: 20 buah Komputer Lab IPA: 1 buah Jaringan internet: ada Sarana olah raga: 100% DII	3000W 20% 4 buah 20 buah 1 buah Terpasang jaringan 50%				
6.	Standar Pengelolaan	Standar Pengelolaan					
a	Perangkat dokumen pedoman pelaksanaan rencana kerja/kegiatan:	Perangkat dokumen pedoman pelaksanaan rencana kerja/kegiatan:					

No.	Kondisi yang ada	Kondisi yang diharapkan	Gap	Capaian surplus/minus	Ham batan	Upaya solutif	Ket
	Dokumen RPS (RKS dan RKAS): 50% Dokumen PSB: 60% Dokumen Pedoman pembinaan kesiswaan: 50% Dokumen tata tertib sekolah: 50% Dokumen kode etik sekolah: 50% Dokumen penugasan guru: 80% Dokumen administrasi sekolah lainnya: 50% DII	Dokumen RPS (RKS dan RKAS): 100% Dokumen PSB: 100% Dokumen Pedoman pembinaan kesiswaan: 100% Dokumen tata tertib sekolah: 100% Dokumen kode etik sekolah: 100% Dokumen penugasan guru: 80% Dokumen administrasi sekolah lainnya: 100% DII	50% 40% 50%  50%  20% 50%				
<i>b</i>	<i>Struktur organisasi dan mekanisme kerja:</i>	<i>Struktur organisasi dan mekanisme kerja:</i>					
	Struktur organisasi: 75% lengkap Dokumen pembagian tugas/kewenangan/tupoksi: 60% Dokumen mekanisme fungsi/tugas organisasi: 50% DII	Struktur organisasi: 100% lengkap Dokumen pembagian tugas/kewenangan/tupoksi: 100% Dokumen mekanisme fungsi/tugas organisasi: 100% DII	25% 40%  50%				
<i>c</i>	Supervisi, monitoring, evaluasi, dan akreditasi sekolah:	Supervisi, monitoring, evaluasi, dan akreditasi:					
	Tidak ada tim khusus Tidak ada instrumen supervisi Tidak ada instrumen monitoring Tidak ada instrumen evaluasi Tidak ada instrumen akreditasi Tidak ada pelaporan supervisi Tidak ada pelaporan monitoring Tidak ada pelaporan evaluasi Tidak ada pelaporan akreditasi internal Pendokumentasian : 50% Tindak lanjut: 50% DII	Ada tim khusus: 100% Ada instrumen supervisi: 100% Ada instrumen monitoring: 100% Ada instrumen evaluasi: 100% Ada instrumen akreditasi: 100% Ada pelaporan supervisi: 100% Ada pelaporan monitoring: 100% Ada pelaporan evaluasi: 100% Ada pelaporan akreditasi internal: 100% Pendokumentasian : 100% Tindak lanjut: 100% DII	100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 50% 50%				
<i>d</i>	Kemitraan dan peran serta masyarakat:	Kemitraan dan peranserta masyarakat:					

No.	Kondisi yang ada	Kondisi yang diharapkan	Gap	Capaian surplus/minus	Ham batan	Upaya solutif	Ket
	Dokumen keberadaan Komite Sekolah: 90% Dokumen program kerja komite sekolah: 60% Kepengurusan komite sekolah: 75% lengkap Perolehan kerjasama dengan pihak lain: 2 instansi/industri Bantuan biaya pendidikan dari orang tua siswa: 10.000 rupiah/bulan DII	Dokumen keberadaan Komite Sekolah: 100% Dokumen program kerja komite sekolah: 100% Kepengurusan komite sekolah: 100% lengkap Perolehan kerjasama dengan pihak lain: 5 instansi Bantuan biaya pendidikan dari orang tua siswa: 150.000 rupiah/bulan DII	10% 40% 25% 3 instansi 140.000,- rupiah/bulan				
e	SIM sekolah:	SIM sekolah:					
	Tidak terpasang PAS (Paket Aplikasi Sekolah) Tidak terpasang jaringan SIM DII	Terpasang PAS (Paket Aplikasi Sekolah): 100% Terpasang jaringan SIM: 100% DII	100% 100%				
7.	Standar Pembiayaan	Standar Pembiayaan					
a	Sumber dana: 2 buah	Sumber dana: minimal 5 buah	Minimal 3				
b	Pengalokasian dana: 5 SNP	Pengalokasian dana: minimal 8 SNP	3 atau lebih				
c	Penggunaan dana: 75% benar	Penggunaan dana: 100% benar	25%				
d	Pelaporan penggunaan dana: 75%	Pelaporan penggunaan dana: 100%	25%				
e	Dokumen pendukung pelaporan: 80%	Dokumen pendukung pelaporan: 100%	20%				
f	DII	DII					
<b>9</b>	<b><i>Pengembangan Budaya dan Lingkungan Sekolah:</i></b>	<b><i>Pengembangan Budaya dan Lingkungan Sekolah:</i></b>					
a	Pengembangan budaya bersih: 80%	Pengembangan budaya bersih: 100%	20%				
b	Penciptaan lingkungan sehat, asri, indah, rindang, sejuk, dll (tamanisasi): 50%	Penciptaan lingkungan sehat, asri, indah, rindang, sejuk, dll (tamanisasi): 100%	50%				
c	Pemenuhan sistem sanitasi/drainasi: 30%	Pemenuhan sistem sanitasi/drainasi: 100%	70%				
d	Penciptaan budaya tata krama "in action": 70%	Penciptaan budaya tata krama "in action": 100%	30%				
e	Peningkatan kerjasama dengan lembaga lain relevan: 2 lembaga	Peningkatan kerjasama dengan lembaga lain relevan: 5 lembaga	3 lembaga				
f	Pengembangan lomba-lomba kebersihan, kesehatan, dll: 2 lomba	Pengembangan lomba-lomba kebersihan, kesehatan, dll: 5 lomba	3 jenis lomba				
g	DII	DII					

## 10. Menyusun jadwal

### JADWAL KEGIATAN RENCANA KERJA TAHUNAN SEKOLAH

NO	Program	Bulan													
		7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6		
<b>I</b>	<b>Kesiswaan</b>														
1	Penambahan peserta didik.														
2	Penambahan jumlah siswa penerima bantuan yang kurang mampu secara ekonomi.														
3	Pendataan calon peserta didik														
4	Bantuan terhadap siswa yang kurang siap dalam pembelajaran.														
<b>II</b>	<b>Kurikulum dan Kegiatan Pembelajaran</b>														
1	Pembuatan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran.														
2	Pelatihan guru tentang sistem penilaian kelas.														
<b>3</b>	Pelatihan guru tentang cara penyesuaian K.13 dgn RPP														
4	Peningkatan Wawasan Kepala Sekolah.														
<b>III</b>	<b>Pendidik dan Tenaga Kependidikan</b>														
1	Peningkatan kualifikasi pendidikan guru														
2	Pelatihan guru untuk menguasai materi pembelajaran.														
<b>3</b>	Pelaksanaan Manajemen Terbuka														
<b>IV</b>	<b>Manajemen</b>														
1	Sosialisasi dengan semua anggota komite														
<b>V</b>	<b>Sarana dan Prasarana</b>														
1	Pengecatan gedung sekolah														
2	Pengadaan buku pegangan buku														
3	Pengadaan 1 set komputer dan 1 set printer														
<b>VI</b>	<b>Keuangan dan Pembiayaan</b>														
1	Penambahan dana anggaran sekolah.														
<b>VII.</b>	<b>Budaya dan Lingkungan Sekolah</b>														

NO	Program	Bulan											
		7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6
1	Peningkatan kebersihan lingkungan sekolah.												
<b>VIII</b>	<b>Peran Serta Masyarakat dan Kemitraan</b>												
1	Pelatihan Komite Sekolah tentang manajemen sekolah.												

